

BUMDES DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Pembangunan pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kemandirian, termasuk pembangunan perdesaan. Pembangunan dan kemajuan ekonomi nasional ditentukan salah satunya oleh besarnya kontribusi perdesaan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan membangun kesejahteraan masyarakat desa, akan berimbas pada kemajuan ekonomi di suatu kabupaten, provinsi, hingga kemajuan taraf kesejahteraan nasional.

Buku ini memberi gambaran tentang manfaat dan progresivitas program BUMDes yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai program andalan pemerintah dalam menstimulus dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Karena itu buku penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mempelajari BUMDes.

Perpustakaan DPR R



13008173

ISBN: 978



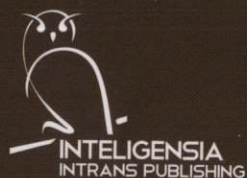
9 786026 103673

362
BUM

Nurhayati, M.Si.



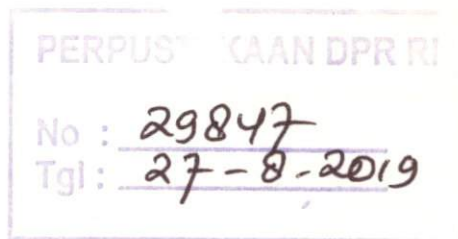
BUMDES DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA



Editor:
Dr. Cucu Nurhayati, M.Si.

362
Bum

BUMDES DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA



Editor:
Dr. Cucu Nurhayati, M.Si.

Judul:

BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xviii+196 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-60367-7-3

Cetakan Pertama, 2018

Penulis:

Rohani Budi Prihatin

Mohammad Mulyadi

Nur Sholikhah Putri Suni

Editor:

Dr. Cucu Nurhayati, M.Si.

Desain Sampul:

Fajar Wahyudi

Tata Letak:

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Inteligencia Intrans Publishing, Anggota IKAPI

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

redaksi.intrans@gmail.com

www.intranspublishing.com

Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka bunga rampai yang berjudul **“BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”** dapat diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu buku bunga rampai yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian pada tahun 2018 dan ditulis oleh para peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Buku ini juga merupakan hasil penelitian dan kajian dari para peneliti bidang Kesejahteraan Sosial atas fenomena Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan antara Maret-September 2018. Hasil penelitian dan tinjauan dari berbagai disiplin ilmu memberikan warna tersendiri terhadap buku bunga rampai ini sehingga memberikan manfaat banyak bagi para pembaca untuk memahami permasalahan BUMDes.

Terdapat tiga tulisan yang terdapat dalam buku ini. Bagian pertama ditulis oleh Rohani Budi Prihatin dan Nurhadi Wiyono yang membahas mengenai **“BUMDes Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Desa.”** Bagian selanjutnya berjudul **“Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDes: Studi pada BUMDes Cahaya Makmur di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan BUMDes Tirta Mandiri di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.”** Sementara itu, tulisan terakhir berjudul **“BUMDes dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan”** yang ditulis oleh Nur Sholikhah Putri Suni.

Buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan terhadap kebijakan dan manfaat BUMDes dalam menggerakkan perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemikiran dan beberapa hasil temuan lapangan dalam buku ini secara khusus disumbangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang

dalam tugasnya membutuhkan data, fakta, serta analisis yang terkait dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Sebagai Kepala Pusat Penelitian (Kapuslit) Badan Keahlian DPR RI, saya menghargai segenap penulis dan mendorong agar pada masa mendatang dapat dihasilkan buku-buku lain yang bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta untuk masyarakat pada umumnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Cucu Nurhayati, M.Si. atas sumbangan pemikirannya dan upayanya dalam melakukan kegiatan editorial sehingga buku ini layak dibaca.

Kritik dan saran dari pembaca atas buku ini sangat saya harapkan demi penyempurnaan penerbitan buku selanjutnya di kemudian hari. Akhirnya, saya berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 17 Oktober 2018

Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, M.Si.

NIP. 19711117 199803 1 004

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xii
Daftar Gambar/Diagram	xviii
Prolog	1

BAGIAN 1

BUMDES SEBAGAI GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DESA

Robani Budi Pribatin dan Nurbadi Wijono

1. Pendahuluan	5
2. Landasan Hukum	7
3. BUMDes sebagai Gerakan Sosial	14
a. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten	16
b. BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul DI	17
c. BUMDes Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kab. Gunung Kidul	19
d. BUMDes Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor dan BUMDes Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro	22
e. BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci	25

f. BUMDes Gerbang Nusantara, Desa Dataran Kempas Kab. Tanjung Jabung Barat	28
4. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes	30
5. Kesimpulan	33
Daftar Pustaka	35

BAGIAN 2

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES (STUDI PADA BUMDES CAHAYA MAKMUR DI KAB. SIGI SULAWESI TENGAH DAN BUMDES TIRTA MANDIRI DI KAB. KLATEN JAWA TENGAH)

Mohammad Mulyadi

Pendahuluan	39
Partisipasi Masyarakat	42
Pengembangan BUMDes	52
Kesejahteraan Masyarakat	56
Variabel Kesejahteraan Masyarakat	83
Variabel Kesejahteraan Masyarakat	127
Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes	156
Simpulan dan Saran	160
Daftar Pustaka	162

BAGIAN 3
BUMDES DAN RELEVANSINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI SEKTOR KESEHATAN

Nur Sholikah Putri Suni

A. Pendahuluan	165
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	168
C. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kesehatan	172
D. Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan	174
E. Kontribusi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan	177
F. Penutup	182
Daftar Pustaka	184
Epilog	187
Indeks	191
Indeks Pengarang	195

Daftar Tabel

Tabel 1	Hasil Validitas Variabel X	65
Tabel 2	Hasil Validitas Variabel Y	66
Tabel 3	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	72
Tabel 4	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	72
Tabel 5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	77
Tabel 6	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	77
Tabel 7	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	81
Tabel 8	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan Perumahan Kesehatan dan Perlindungan	84
Tabel 9	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan	84
Tabel 10	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	85
Tabel 11	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	86

Tabel 11	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	96
Tabel 12	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	96
Tabel 13	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	100
Tabel 14	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	100
Tabel 15	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan, Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	103
Tabel 16	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	103
Tabel 17	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	107
Tabel 18	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	108
Tabel 19	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	121

Tabel 20	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Benefit</i>	121
Tabel 21	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	125
Tabel 22	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	125
Tabel 23	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan	128
Tabel 24	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan	128
Tabel 25	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	129
Tabel 26	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar	130
Tabel 27	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	136
Tabel 28	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	136
Tabel 29	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	141

Tabel 30	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	141
Tabel 31	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	145
Tabel 32	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan	146
Tabel 33	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	149
Tabel 34	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa	149
Tabel 35	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	153
Tabel 36	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat	154
Tabel 37	Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah	157
Tabel 38	Hasil Uji Pengaruh Partisipasi terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Tirta Mandiri Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah	159

Daftar Diagram

Diagram 1	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Decision Making</i>	68
Diagram 2	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Menghadiri Rapat	68
Diagram 3	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Memberikan Pendapat/Saran	69
Diagram 4	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Memberikan Data/Informasi dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes	70
Diagram 5	Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan	71
Diagram 6	Persentase Kontribusi Tenaga dalam Kegiatan BUMDes	73
Diagram 7	Persentase dalam Memberikan Kontribusi Ide/ Pemikiran dalam Kegiatan BUMDes	74
Diagram 8	Persentase dalam Kontribusi Uang dalam Kegiatan BUMDes	75
Diagram 9	Persentase dalam Kontribusi Bahan/Material dalam Kegiatan BUMDes	76
Diagram 10	Kajian terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Desa yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan Ekonomi Keluarga (n=79)	78
Diagram 11	Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layanan yang Dihasilkan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)	79

Diagram 12	Kajian Terhadap Memelihara/Merawat/Merasa Memiliki Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)	80
Diagram 13	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Evaluation</i>	81
Diagram 14	Kajian Terhadap Melakukan Kritik/Koreksi terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79)	82
Diagram 15	Kajian Terhadap Memberikan Saran terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79)	83
Diagram 16	Kajian terhadap Mampu Membeli Sembako (n=79)	87
Diagram 17	Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)	87
Diagram 18	Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)	88
Diagram 19	Kajian Terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=79)	89
Diagram 20	Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Permukimannya (n=79)	90
Diagram 21	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	91
Diagram 22	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar	91
Diagram 23	Kajian terhadap Mudah Mendapatkan Sembako (n=79)	92

Diagram 24	Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)	93
Diagram 25	Kajian Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)	94
Diagram 26	Kajian Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya (n=79)	95
Diagram 27	Kajian terhadap Kualitas Hidup yang Lebih Baik (n=79)	97
Diagram 28	Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Menjadi makin meningkat (n=79)	98
Diagram 29	Kajian terhadap Pendidikan Menjadi Lebih Baik (n=79)	99
Diagram 30	Kajian Terhadap Saling Menghargai/Menghormati antar-Warga Masyarakat (n=79)	101
Diagram 31	Kajian Terhadap Saling Bekerja Sama/Membantu Antarwarga Masyarakat (n=79)	102
Diagram 32	Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/Ikutan (n=79)	104
Diagram 33	Kajian terhadap Munculnya Usaha Rintisan (n=48)	105
Diagram 34	Kajian terhadap Menurunnya Tingkat Pengangguran (n=79)	106
Diagram 35	Kajian terhadap Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal (n=79)	107
Diagram 36	Kajian terhadap Menggunakan Komputer/Laptop (n=79)	109
Diagram 37	Kajian terhadap Menggunakan <i>Handphone</i> (n=79)	110

Diagram 38	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation In Decision Making</i>	111
Diagram 39	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation In Decision Making</i>	111
Diagram 40	Kajian terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Menghadiri Rapat Perencanaan Pengembangan BUMDes tersebut (n=95)	112
Diagram 41	Kajian Terhadap Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes (n=95)	113
Diagram 42	Kajian Terhadap Memberikan Data/Informasi dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes (n=95)	114
Diagram 43	Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan (n=95)	115
Diagram 44	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	116
Diagram 45	Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi <i>Participation in Implementation</i>	116
Diagram 46	Kajian terhadap Kontribusi dengan Tenaga (n=95)	117
Diagram 47	Kajian terhadap Kontribusi Ide/Pemikiran (n=95)	118
Diagram 48	Kajian terhadap Kontribusi dengan Uang (n=95)	119
Diagram 49	Kajian terhadap Kontribusi dengan Bahan (Material)	120

Diagram 50	Kajian terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Desa yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan Ekonomi Keluarga (n=95)	122
Diagram 51	Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layanan yang Dihasilkan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=95)	123
Diagram 52	Kajian terhadap Memelihara/Merawat/Merasa Memiliki Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=95)	124
Diagram 53	Kajian terhadap Melakukan Kritik/Koreksi terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=95)	126
Diagram 54	Kajian terhadap Memberikan Saran terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=95)	127
Diagram 55	Kajian terhadap Mampu Membeli Sembako (n=95)	131
Diagram 56	Kajian terhadap Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni (n=95)	132
Diagram 57	Kajian Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)	133
Diagram 58	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=95)	134
Diagram 59	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Permukimannya (n=95)	135
Diagram 60	Kajian terhadap Mudah Mendapatkan Sembako (n=95)	137

Diagram 61	Kajian terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni (n=95)	138
Diagram 62	Kajian terhadap Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)	139
Diagram 63	Kajian terhadap Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya (n=95)	140
Diagram 64	Kajian terhadap Kualitas Hidup yang Lebih Baik (n=95)	143
Diagram 65	Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Makin Meningkat (n=95)	144
Diagram 66	Kajian terhadap Pendidikan Menjadi Lebih Baik (n=95)	145
Diagram 67	Kajian terhadap Saling Menghargai Menghormati Antarwarga Masyarakat (n=95) ...	147
Diagram 68	Kajian terhadap Saling Membantu Antarwarga Masyarakat (n=95)	148
Diagram 69	Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/ Ikutan (n=95)	150
Diagram 70	Kajian terhadap Munculnya Usaha Rintisan (n=95)	151
Diagram 71	Kajian terhadap Menurunnya Tingkat Pengangguran (n=95)	152
Diagram 72	Kajian terhadap Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal (n=95)	153
Diagram 73	Kajian terhadap Menggunakan Komputer/ Laptop (n=95)	155
Diagram 74	Kajian terhadap Menggunakan Handphone (n=95)	156

Daftar Gambar

Gambar 1	Kajian terhadap Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)	179
Gambar 2	Kajian terhadap Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)	180
Gambar 3	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=79)	181
Gambar 4	Kajian terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=95)	182

Prolog

Jalan tanah yang masih becek jika hujan, minim fasilitas dan penuh nestapa, mungkin itulah gambaran umum desa pada masa lalu. Barangkali, saat ini pun masih ada benarnya jika ditemukan kondisi mengenaskan tersebut. Namun, tidak sedikit pula gambaran masa lalu tersebut kini keliru karena kesadaran di desa untuk berubah dengan disokong ketersediaan dana negara, swasta, dan pendampingan para pihak yang pada akhirnya memunculkan geliat perubahan besar pedesaan di Indonesia.

Memang ada benarnya bahwa desa saat ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten; akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola '*ijon*'; kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca-produksi. Hadirnya BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Di Yogyakarta misalnya, tumbuh subur desa-desa wisata, seperti di Gunung Kidul dan Kulon Progo, serta desa wirausaha di Bantul yang kian dikenal publik. Begitu pula di Jawa Tengah, seperti di desa Ponggok, Klaten, yang beberapa tahun terakhir membentuk tren desa wisata yang viral di media sosial. Umumnya diawali dari pembangunan fisik infrastruktur sambil meletakkan dasar-dasar meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Banyak contoh pengelolaan desa sukses di tengah banyaknya laju desa yang jalan di tempat atau malah tertinggal. Kolaborasi para pihak menjadi kunci, selain keberadaan tokoh lokal sebagai eksekutor dan

pengarah. Desa Pujon Kidul salah satu contohnya. Desa di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu dulu tidak dikenal. Kini ia tenar sebagai tujuan wisata kuliner, agrowisata, dan swafoto yang unik. Setiap akhir pekan ada 3.000an pengunjung dan sekitar 500 pengunjung di hari kerja. BUMDes Pujon Kidul ini memiliki enam unit usaha. Sejak 2017, warga mendirikan Kafe Sawah di atas tanah kas desa seluas 8.500-meter persegi, plus lahan parkir. Usaha kafe ini mampu menampung 80 karyawan lokal. Dalam satu tahun, kafe tersebut memberi pemasukan Rp. 75 juta. Itu belum warung di sekitarnya yang diatur peraturan desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya

itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keterlibatan banyak pihak ke desa selama mengikuti gerak kemajuan masyarakat. Misalnya, ada perusahaan yang ingin

membantu sebuah desa, maka tidak seenaknya membuat program sendiri. Harus melihat dokumen perencanaan yang dimiliki desa tersebut. Pada kasus ini, Undang-Undang tentang Desa telah menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek, masyarakat desa berwenang memetakan persoalan mereka, merencanakan program pembangunan mengatasi persoalan, serta mengontrol pelaksanaan program.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Salah satu indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh BUMDes dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat desa ke depannya harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengukur sejauhmana keberhasilan program BUMDes.

BAGIAN 1

BUMDES SEBAGAI GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DESA

Rohani Budi Prihatin¹ dan Nurbadi Wiyono²

1. Pendahuluan

Desa merupakan ujung tombak pembangunan bangsa karena sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Dengan membangun desa, penduduk yang tinggal di desa akan terangkat kesejahteraannya. Selama ini, dalam hal penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan, umumnya penduduk desa selalu tertinggal jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Ditambah lagi dengan sempitnya lapangan pekerjaan di desa, kondisi ini kemudian mendorong penduduk untuk mencari pekerjaan di kota sebagai pekerja musiman atau sebagai pekerja sektor informal.

Desa juga merupakan unit terkecil dari negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan aparat pemerintah. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) telah disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Peneliti Madya pada Pusat Penelitian (Puslit) Badan Keahlian DPR RI.

² Peneliti pada Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

(NKRI). Kepala desa sebagai wakil pemerintah di tingkat paling bawah memiliki tanggung jawab agar masyarakatnya sejahtera dengan berbagai program pembangunan di desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui program kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam bentuk BUMDes. BUMDes merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi negara Indonesia terutama di desa.

Definisi BUMDes menurut UU Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan masyarakat memperoleh manfaat melalui kegiatan yang dilakukan BUMDes seperti simpan-pinjam, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, penyediaan *saprodi* (bibit, pupuk, obat hama dan peralatan pertanian), pemasaran produk pertanian dan sebagainya.

Menurut Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) hingga Juli 2018, jumlah BUMDes di seluruh Indonesia sudah mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di Indonesia. Jumlah tersebut lima kali lipat dari target Kemendesa PDTT yang hanya mematok 5000 BUMDes.³ Namun, tidak semua BUMDes yang terdaftar aktif melakukan kegiatan. Penelitian di Jambi, misalnya, dari 349 BUMDes yang terdata hanya 193 BUMDes (55%) yang aktif dan sisanya 156 BUMDes tidak aktif lagi.⁴ Di Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), sejak tahun 2016 telah

³ Lihat <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-BUMDes-yang-harus-anda-ketahui/>

⁴ Syaputra, et al 2017. Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakat Di Provinsi Jambi, Laporan Penelitian, tidak diterbitkan.

berdiri sebanyak 419 BUMDes, namun yang aktif tinggal 21 BUMDes (5%).⁵ Kebanyakan BUMDes yang tidak aktif dikarenakan hanya mengharapkan bantuan modal dari dana desa atau alokasi dana desa tanpa didasari adanya visi dan *business plan* yang jelas.

Meskipun pembentukan BUMDes harus melalui musyawarah desa, tapi di sisi lain modal BUMDes berasal dari kekayaan desa sehingga peran kepala desa di sini menjadi penting bagi kelangsungan BUMDes. Pertanyaannya adalah, mungkinkah BUMDes mampu menjadi sebuah gerakan masyarakat yang mendorong perubahan sosial di desa? Bisakah BUMDes menjadi pelopor dan penggerak ekonomi di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Tulisan ini berusaha menyoroti permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDes berdasarkan studi kasus dan penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Landasan hukum

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah melalui BUMDes. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007).

Beberapa di antara tujuan UU Desa ini antara lain pertama, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan

⁵ Puguh Budiono. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 116-125.

bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Ketiga, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Keempat, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Kelima adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa harus mencari sendiri dana desanya untuk mengembangkan desanya. Dalam Pasal 72 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah disebutkan beberapa sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Akan tetapi tidak semua sumber dana desa bersumber dari yang disebutkan di atas menguntungkan bagi desa, dana yang dianggarkan tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan dan mencari jalan keluar agar dapat menambah sumber pendapatan desa tersebut. Salah satu caranya desa harus memaksimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut, sehingga sumber pendapatan yang didapat dari SDA dan SDM tersebut dapat dimasukkan dalam kas desa. Suatu desa dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan desa yang berarti desa tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan tingkat ketergantungan kepada bantuan pusat dan daerah yang rendah. Akan tetapi sumber pendapatan kas desa yaitu karena bantuan yang besar berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga apabila mengandalkan pendapatan asli desa tidak dapat perkembangnya infrastruktur desa tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD) muncul menjadi isu yang sangat 'seksi' dalam panggung kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran desa sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 14 miliar. Tentu bagi beberapa desa di Indonesia yang berjumlah 74.910 desa, jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang kecil. Jika benar satu desa akan mendapatkan kucuran dana 1 miliar rupiah, maka harus dialokasikan dana APBN sekitar Rp. 73 triliun untuk desa. Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada perubahan wajah desa. Tidak hanya infrastruktur, tetapi program-program penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan menjadi basis pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait langsung dengan kehidupan warga. Untuk mengubah desa menjadi basis ekonomi harus diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggung jawab perangkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan terhadap perangkat desa agar mengetahui bagaimana memanfaatkan dana desa untuk kepentingan transformasi sosial di sebuah desa menjadi lebih baik. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan perangkat desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan.

Dalam UU N0. 6/2014 tentang Desa Pasal 72 dan ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam UU Desa disebutkan, desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa.

Ada empat tujuan penting pendirian BUMDes yaitu a. meningkatkan perekonomian desa; b. meningkatkan Pendapatan Asli Desa; c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Untuk bisa mencapai empat tujuan BUMDes di atas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (pihak luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme

kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015, BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang disesuaikan dengan kondisi potensi desa dan atas persetujuan musyawaran desa yaitu:

a. *Bisnis Sosial/Serving*

BUMDes dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan BUMDes dan memperoleh keuntungan finansial. Jenis bisnis sosial ini misalnya pengelolaan air minum, listrik desa, lumbung pangan, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. *Bisnis Keuangan/Banking*

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, misalnya memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Bisnis keuangan dengan bunga ringan diharapkan dapat menghilangkan rentenir yang mencari nasabah di desa-desa.

c. *Bisnis Penyewaan/Renting*

BUMDes dapat menjalankan usaha penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa misalnya penyewaan alat transportasi/ traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes dan lainnya.

d. *Lembaga Perantara/Brokering*

BUMDes dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, misalnya jasa perantara hasil bumi dari petani ke pasar sehingga memperpendek tataniaga dan menguntungkan petani, jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, jasa pelayanan lainnya.

e. Perdagangan/ *Trading*

BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan barang yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan pompa bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes dapat mendirikan pabrik es pada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka, perdagangan hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan lainnya.

f. Usaha Bersama/ *Holding*

BUMDes dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu, pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif dan sebagainya.

Menentukan jenis usaha bagi BUMDs harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Cocok dan tidaknya sebuah unit usaha sehingga sebuah desa melakukan pendirian BUMDes tidak bisa didasarkan atas suka atau tak suka melainkan melihat potensi dan kebutuhan warga desa. Maka sebelum memutuskan untuk bergerak pada tipe tertentu BUMDes harus melakukan survei dan identifikasi potensi desa. Soalnya, BUMDes harus mampu menyediakan juga ruang partisipasi bagi warga karena lembaga ini pada dasarnya milik warga. Jangan sampai kepala desa untuk membentuk BUMDes ini hanyalah kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa tersebut.

Terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya (PKDSP, 2007), yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa; dan
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Pada dasarnya BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; adanya uni-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang masih dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Singkatnya, BUMDes merupakan wahana bagi masyarakat desa dalam menjalankan usahanya di desa seperti.

Keberadaan BUMDes ini diharapkan menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber

pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi.

3. BUMDes sebagai Gerakan Sosial

Gerakan sosial (*social movement*) didefinisikan gerakan suatu organisasi atau kelompok orang yang bermaksud mengadakan perubahan terhadap struktur sosial yang ada. Gerakan sosial dibedakan menjadi dua istilah yaitu aksi (*action*) dan kolektif (*collective*) Wiggins (1994).⁶

Aksi ini dibagi lagi menjadi:

- Aksi sipil (*civil actions*),
- Aksi protes (*protest actions*),
- Aksi menghalangi-halangi (*obstruction actions*), dan
- Aksi kekerasan (*violant actions*).

Perilaku kolektif yang dilakukan lebih satu orang dibedakan menjadi 3 hal yaitu:

- Organisasi (*organizations*): gerakan sosial bisa dari organisasi tunggal atau jaringan beberapa organisasi. Organisasi yang bertujuan mengubah disebut organisasi gerakan sosial (*social movement organization/SMOs*),
- Kelompok dengan ciri-ciri tertentu yaitu gerakan sosial lebih didasarkan oleh kategori yang sama atau sejenis, misalnya gerakan wanita/*feminist*, gerakan kulit hitam pekerja dan lainnya,
- *Crowd* (kumpulan orang banyak): gerakan sosial dari orang-orang yang berkumpul bersama pada waktu terbatas untuk mempertanyakan atau protes pada isu atau masalah tertentu.

⁶ Seperti dikutip dalam Power Point "Perubahan Sosial Melalui Gerakan Sosial" <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/> diakses 2 Oktober 2018

Gerakan masyarakat yang cenderung politis melibatkan aksi termasuk aksi kekerasan dan berorientasi kelas menurut Rahmat (2014) disebut sebagai gerakan masyarakat lama. Gerakan sosial baru merujuk pada suatu konsep yang bersifat kultural, tidak melibatkan aksi massa, lebih dekat dengan isu sehari-hari, misalnya masalah air bersih, jalan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat.

Gerakan sosial dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menyebut kelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi melalui perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dua karakteristik dari perubahan sosial yaitu adanya tindakan kolektif serta adanya orientasi menuju pada perubahan sosial yang dikehendaki.

BUMDes dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial jika dikembalikan pada filosofinya bahwa, BUMDes sebagaimana tercantum dalam UU Desa, pendiriannya disepakati dalam musyawarah desa dan BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes adalah organisasi yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Keterlibatan sekelompok masyarakat yaitu masyarakat desa menentukan keberadaan BUMDes. BUMDes yang berhasil umumnya melibatkan partisipasi masyarakat dan kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas.

Hasil penelitian di bawah ini menggambarkan keberhasilan BUMDes yang dikelola oleh pemimpin yang memiliki visi yang kuat dan dukungan yang solid dari masyarakat menentukan keberhasilan BUMDes:

a. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten

BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok adalah salah satu BUMDes yang maju dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Pada tahun 2014 saja, pendapatan asli Desa Ponggok yang dihasilkan dari hasil usaha BUMDes Tirta Mandiri sebesar Rp. 350.000.000,-. Dengan keberadaan BUMDes ini, Desa Ponggok bertransformasi menjadi desa mandiri.

Jenis-jenis usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri meliputi pengelolaan air bersih, perikanan, pariwisata, perkreditan, kios kuliner dan mini market. Sejak terbentuk pada tahun 2009, BUMDes Tirta Mandiri telah mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, yang dibuktikan dengan besaran pendapatan bersih tahun 2014 atau dari neraca sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp. 140.388.300,-. BUMDes Tirta Mandiri juga berkontribusi terhadap perkembangan infrastruktur desa serta bantuan sosial dan permodalan seperti pembangunan kantor Desa Ponggok, pemberian bantuan sosial seperti program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa, program pemberian bantuan dalam iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Jamkesmas, serta bantuan permodalan bagi para pengusaha UMKM. BUMDes Tirta Mandiri dapat berjalan efektif sejak adanya peningkatan yang signifikan dari pemasukan tiket masuk Umbul Ponggok yang mulai meningkat pada tahun 2013 dan sejak itu pendapatan BUMDes Tirta Mandiri juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari pemasukan pariwisata Umbul Ponggok tersebut, BUMDes Tirta Mandiri mulai berkembang dan membangun usaha-usaha lain dengan melibatkan masyarakat, seperti keterlibatan masyarakat dalam penanaman modal (saham), dan masyarakat berperan sebagai investor.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 19 disebutkan bahwa BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa

untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif berkelanjutan dan akseptabel. Agar prinsip-prinsip tersebut bisa tercapai, harus terdapat suatu pengawasan karena peranan pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai hal yang sangat penting, artinya apabila dalam kehidupan organisasi terjadi suasana ketidaktertiban, dengan adanya pengawasan dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Berdasarkan Perda tersebut, jelas sekali bahwa pendirian BUMDes di Kabupaten Klaten adalah dalam rangka: (a) menggali sumber pendapatan asli desa; (b) menumbuhkembangkan perekonomian; dan (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan (Perda 21/2013).

Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi lebih didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi ekonomi desanya yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

b. BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan, Kabupaten Gunungkidul DI⁷

Desa Wisata Bleberan yang dikenal dengan ikon Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang, sebelumnya merupakan dukuh yang terpelosok, dengan angka kemiskinan tinggi dan kondisi perekonomian yang tertinggal dibanding dengan dukuh sekitarnya. Namun, desa tersebut kini telah menjadi salah satu objek wisata primadona di Kabupaten Gunungkidul. Keberhasilan ini karena kontribusi BUMDes dalam mengelola tempat di desa tersebut. 27 BUMDes yang ada di Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Bleberan telah mampu menjadikan Bleberan sebagai desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

⁷ Fajar Sidik. 2015. “Menggali Potensi Lokal, Mewujudkan Kemandirian Desa”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol 19 No 2 - November 2015.

Pendirian BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan secara resmi dikukuhkan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Bleberan Nomor 06/ KPTS/2009 tentang BUMDes. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) BUMDes “SEJAHTERA” di Desa Bleberan dilakukan oleh pemerintah desa beserta lembaga yang ada di desa. BUMDes ini tidak hanya hadir sebagai institusi ekonomi, tetapi juga dapat dijadikan sebagai institusi jembatan sosial warga masyarakat. Dengan demikian, BUMDes dapat dijadikan sebagai wadah dalam mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan desa wisata.

Desa Bleberan memiliki potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang potensial untuk dikembangkan sebagai tempat wisata antara lain Gua Rancang Kencono, Air Terjun Sri Gethuk, Air Terjun Slempret, Tebing Indah, Situs Purbakala, Bumi Perkemahan, Hutan Masyarakat, dan wisata pendidikan pembangkit tenaga surya. Desa Bleberan memiliki potensi untuk wisata religi atau budaya seperti upacara ritual *nyadran*, upacara *tumpeng robyong*, *doger panggah jati*, *reog*, *hadrah*, dan *shalawatan*.

Pada awal pengembangan BUMDes yang ada di Desa Bleberan berfokus pada masalah yang dihadapi warga yaitu air bersih. Setelah air bersih bagi warga terselesaikan BUMDes “SEJAHTERA” mengembangkan dan mengelola desa wisata. Proses merealisasikan/ membentuk Desa Wisata Bleberan berjalan sangat alot melalui proses yang panjang karena mendapat pertentangan dari para tokoh agama setempat yang tidak setuju desanya menjadi desa wisata, karena dengan menjadi desa wisata akan banyak menerima kunjungan tamu dan dikhawatirkan dapat merusak tradisi masyarakat. Namun dengan upaya negosiasi secara kekeluargaan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa setempat, desa wisata tersebut akhirnya terwujud. BUMDes “SEJAHTERA” sendiri saat ini telah memiliki tiga unit usaha yakni Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Pengelolaan Air Bersih (PAB) dan Pengelolaan Desa Wisata.

Secara ekonomi keberhasilan BUMDes “SEJAHTERA” dapat dilihat dari neraca keuangan BUMDes hingga 31 Desember 2014 dengan pemasukan sebesar Rp. 1.164.515.474,- dan laba sebesar Rp. 394.319.383,-. Adapun keuntungan BUMDes yang dialokasikan untuk PADes sebesar Rp98.579.846,00 tahun 2014. Sebelum ada BUMDes PADes hanya Rp 5 juta.

Dalam penyerapan tenaga kerja, BUMDes “SEJAHTERA” mampu menyerap tenaga kerja baik dari masyarakat umum maupun Karang Taruna sebanyak 74 orang yang berstatus sebagai pegawai tetap dengan penghasilan Rp. 35.000,- hingga Rp. 50.000,- per-hari sesuai dengan jabatan dan tugasnya. BUMDes unit wisata tersebut juga mampu merekrut tenaga bantu pada saat jumlah wisatawan mengalami kenaikan terutama di musim liburan dan hari raya dengan besaran upah berkisar minimal Rp. 35.000,- per-hari.

Multiplier effect dari desa wisata ini selain penyerapan tenaga kerja, juga menghidupkan usaha kecil (kios dan warung) yang melayani pengunjung. Jumlah kios yang dibangun secara permanen ada 15 buah kios, dan terdapat sekitar 44 pedagang di lokasi wisata Gua Rancang Kencono dan Sri Gethuk yang tergabung dalam satu paguyuban yang berasal dari masyarakat lokal.

c. BUMDes Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kab Gunung Kidul⁸

Secara resmi BUMDes Karangrejek didirikan pada tahun 2008 dengan prakarsa dari masyarakat desa Karangrejek bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Provinsi DIY. Kebutuhan untuk mendirikan BUMDes dilandasi dari masalah bersama yang dihadapi oleh masyarakat desa yaitu kekeringan yang melanda desa, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Pendirian

⁸ Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Tersedia di <http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.RINGKASAN.pdf>

BUMDes ini mendapatkan dana dari pemerintah kabupaten setelah mengajukan proposal. Kemudian dana tersebut dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dengan bantuan dari pemerintah desa. Masyarakat berpartisipasi dan bergotong royong membangun sarana air bersih yang memberi dampak bagi kehidupan masyarakat Desa Karangrejek.

Sejak didirikan BUMDes yang mengelola air bersih sudah banyak konsumen yang menggunakan layanan tersebut, dan sampai sekarang jumlah konsumen terus meningkat. Jumlah konsumen yang terus bertambah ini akan meningkatkan pendapatan BUMDes yang pada gilirannya meningkatkan laba BUMDes. Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh masyarakat untuk terlibat dalam gotong-royong dalam membangun. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur air bersih dilakukan dengan bergotong-royong di lingkungan RT mereka. Dengan selesainya pembangunan sarana air bersih, masyarakat turut berpartisipasi dengan menjadi konsumen penggunaan air bersih.

BUMDes Desa Karangrejek mengelola banyak unit usaha. Salah satunya adalah BUMDes Tirta Kencana yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Kini dengan hadirnya BUMDes warga Karangrejek sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, BUMDes Desa Karangrejek juga mengelola kredit mikro atau simpan-pinjam yaitu Usaha Kredit Mikro (UKM), Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD), dan masih banyak unit-unit usaha yang ada di dalamnya namun belum

semua berjalan dengan efektif. Pemerintah desa berharap dengan hadirnya BUMDes ini dengan unit-unit usaha yang ada di dalamnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat Desa Karangrejek, sebelum BUMDes berdiri, kondisinya jauh dari sejahtera, kemiskinan ada dimana-mana. Angka kemiskinan mencapai 68,8% pada tahun 1993 sehingga desa ini ditetapkan sebagai desa IDT (Inpres Desa Tertinggal). Upaya menurunkan kemiskinan terus dilakukan, namun belum semua masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan BUMDes dan BUMDes Desa Karangrejek berdiri, kondisi masyarakat mulai ada perubahan. Pengembangan BUMDes di desa ini telah membuka peluang usaha bagi masyarakat. Misalnya industri rumah tangga (*home industry*) seperti tahu, tempe, toge, dan usaha perikanan yang sangat meningkat. Pada tahun 2011 sampai tahun 2012 sebanyak lebih dari 800 pekerja kini terlibat kegiatan *home industry*. Dengan demikian pengangguran di Desa Karangrejek jauh berkurang dan ekonomi desa meningkat. Secara umum kesejahteraan masyarakat dari tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan.

Melalui BUMDes dengan unit usaha pengelolaan air bersih, masyarakat yang sebelum dibentuk BUMDes mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih yang menyebabkan gangguan kesehatan, sekarang kebutuhan air telah tercukupi bahkan melimpah. Masyarakat tidak perlu berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air. Pada musim kemarau panjang pun, masyarakat tetap masih bisa mendapatkan air. Air tetap mengalir di rumah masyarakat. Begitu pula kebutuhan untuk minum, memasak, dan mandi pun sudah tercukupi. Hewan ternak pun tidak lagi mengalami penyakit akibat kekurangan air dan langkanya rumput. Secara tidak langsung, masyarakat juga merasakan dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDes yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di desa bisa dibangun, seperti pengaspalan jalan desa, *drainase*, pagar

pekarangan, gapura pintu masuk, gardu ronda, sanitasi, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan balai padukuhan dan balai desa.

Dari sisi ekonomi, pada tahun 2011 keuntungan BUMDes Karangrejek mencapai Rp. 184 juta. Angka ini menyumbang hampir sepertiga dari pendapatan asli desa. Seluruh kebutuhan dana bagi pengembangan Desa Karangrejek diperoleh dari BUMDes Karangrejek.

Manfaat dari kegiatan BUMDes di Karangrejek dari sisi ekonomi bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain:

- Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain:

- Kegiatan pembangunan sumber daya masyarakat desa
- Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat
- Penyerapan tenaga kerja lokal
- Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, kesehatan dan pengelolaan BUMDES.

d. BUMDes Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor dan BUMDes Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro⁹

Di Kabupaten Bojonegoro pendirian BUMDes ada payung hukumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 dan di tingkat desa

⁹ Puguh Budiono. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 116-125

menggunakan payung hukum peraturan desa. Dalam Perda disebutkan pembentukan BUMDes harus dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa yang dihadiri masyarakat dan pemerintah desa. Melalui musyawarah tersebut, akan menjangkau semua aspirasi baik dari masyarakat maupun pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes. Dalam Perda tersebut juga disebutkan keuntungan BUMDes dialokasikan untuk Pendapatan Asli Desa. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus BUMDes. Pelatihan bagi pengelola BUMDes adalah manajemen dan strategi menentukan jenis usaha BUMDes.

BUMDes di Desa Kedungprimpen berdiri sejak tahun 2006. BUMDes ini merupakan lanjutan dari usaha desa yang telah ada sejak tahun 1994. Usaha desa bergerak di bidang pengairan lahan pertanian milik warga desa. Latar belakang pembentukan usaha desa tersebut adalah kurang maksimalnya hasil pertanian ketika musim kemarau. Waktu itu pihak pemerintah desa bekerja sama dengan pihak pengusaha dalam kegiatan pompaisasi untuk mengairi sawah warga dengan sistem bagi hasil kepada pemerintah desa. Sayangnya, hasilnya kurang maksimal karena pendapatan yang diperoleh dari hasil pembagian dengan pihak pengusaha terhadap pemasukan PADes kecil. Kondisi ini mendorong kepala desa bersama para pamongnya untuk mengelola usaha ini secara mandiri oleh pihak desa tanpa melibatkan swasta. Pelaksanaan usaha pompanisasi pada awalnya melibatkan masyarakat untuk permodalannya. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola dan menjalankan usaha desa tersebut. Kesamaan visi antara pemerintah desa dan masyarakat yaitu agar hasil panen lebih baik memunculkan gagasan pengelolaan usaha pompanisasi lewat BUMDes. Pelibatan masyarakat

dalam usaha pengairan/pompanisasi ini terbilang berhasil apabila melihat hasil panen meningkat dan pemasukan bagi pendapatan asli desa juga meningkat yang berguna untuk pembangunan desa. Adanya kesamaan kepentingan antara pihak pemerintah desa melalui kebijakan BUMDes dan masyarakat desa mendorong keberhasilan BUMDes, meskipun jauh sebelum ada kebijakan tersebut telah berdiri usaha desa.

Pembentukan dan pemilihan pengelola BUMDes di Desa Kedungprimpen dilakukan melalui Musyawarah Desa. Pemilihan pengurus BUMDes yang ada di Desa Kedungprimpen melalui seleksi yang dilakukan oleh pemerintah desa di setiap dusun. Hal tersebut untuk menjaring sumber daya manusia yang lebih baik serta untuk menghindari kecemburuan antar-dusun. Pemilihan secara terbuka ini juga untuk menunjukkan transparansi sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan BUMDes dievaluasi oleh pemerintah desa Kedungprimpen setiap minggu. Tujuan evaluasi-mingguan ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dan mencari solusi bersama. Dengan evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangan pelaksanaan program BUMDes. Selain evaluasi mingguan tersebut, evaluasi juga dilaksanakan setiap bulan dan juga setiap tahun melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Melalui evaluasi, pemerintah desa Kedungprimpen bisa menjadi pengawas dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes tersebut.

Secara ekonomi, dengan adanya BUMDes ini telah memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 11.450.000,- pada tahun 2011 dan Rp. 16.200.000,- pada tahun 2012 dari usaha pompanisasi.

Kondisi yang berbeda dialami oleh BUMDes Desa Ngringinrejo. BUMDes ini berdiri tahun 2011 sebagai respon adanya kebijakan BUMDes di Kabupaten Bojonegoro. Jenis usaha yang dijalankan adalah simpan-pinjam. Sayangnya, sejak berdiri sampai dengan tahun 2013, BUMDes ini belum mampu memberikan pemasukan kepada kas desa.

Keuangan BUMDes Desa Ngringinrejo pada awal berdiri sejumlah Rp. 37.000.000,- dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 41.560.000,- dari hasil usaha simpan-pinjam. Penyebab BUMDes tidak memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Desa karena ada kepentingan individu terkait dengan pengelolaan potensi ekonomi yang terjadi di desa Ngringinrejo yang membuat pelaksanaan BUMDes di desa tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan. Penguasaan potensi ekonomi yang dilakukan oleh kepala desa yang menjabat adalah pengelolaan saluran irigasi sawah pertanian. Ada konflik kepentingan antara kepala desa dan BUMDes ketika BUMDes berusaha memperluas jenis usaha ke arah pompanisasi pengairan sawah. Pengelola BUMDes mengalami kesulitan ketika mengusulkan pelebaran jenis usaha pengairan. Usaha untuk memperluas jenis usaha mengalami jalan buntu berbenturan dengan pengelolaan saluran irigasi milik kepala desa.

e. **BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam Kec. Siulak Kab. Kerinci¹⁰**

Desa Dusun Dalam merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Kondisi demografi penduduk Desa Dusun Dalam berjumlah 260 KK, bila dilihat dari kesejahteraannya, mayoritas berada pada kondisi Prasejahtera (81 KK), Sejahtera 1 (69 KK) dan Sejahtera 2 (50 KK), mayoritas penduduk Desa Dusun Dalam bekerja pada sektor pertanian dan perdagangan/wiraswasta.

Pendirian BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam berawal dari usaha simpan-pinjam dalam bentuk koperasi yang berdiri sekitar tahun 1990, namun dalam operasional kegiatannya belum berjalan secara maksimal dan selalu mengalami kerugian. Kemudian koperasi simpan-pinjam tersebut dilebur menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

¹⁰ M. Rialdi Syaputra, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. *Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakat di Provinsi Jambi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi.

Alasan lain pendirian BUMDes adalah permasalahan masyarakat terutama petani yang hasil pertaniannya selalu dipermainkan oleh tengkulak dalam hal harga hasil-hasil pertanian, seperti padi, kopi, coklat. Pendirian BUMDes ditetapkan melalui Peraturan Desa Dusun Dalam No. 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Dermawan. Dalam peraturan desa tersebut juga terdapat AD/ART Badan Usaha Milik Dusun. Kemudian untuk menjalankan roda organisasi BUMDus Karya Dermawan tersebut dibuatlah Surat Keputusan Desa Dusun Dalam Nomor 412.6/010/Kep.DD/2014 Tahun 2014 Tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan.

Tujuan pembentukan BUMDes Karya Dermawan adalah untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat, seperti lembaga ekonomi adat dan kegiatan/proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada masyarakat Desa Dusun Dalam. Hasil keuntungan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, menciptakan lapangan kerja, menghindarkan masyarakat desa dari pinjaman bunga tinggi, meningkatkan peranan masyarakat dalam mengelola bantuan modal, meningkatkan kebiasaan bergotong-royong, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong usaha sektor informal untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan kreativitas berwirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Karya Dermawan bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, serta keuangan yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Desa Dusun Dalam dengan tujuan agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi desa dapat terlembaga dalam satu wadah. BUMDes Karya Dermawan mempunyai delapan unit usaha yaitu: bank desa, usaha perbengkelan, penggilingan padi, kolam renang anak-anak, budidaya ikan Lele, pembuatan kompos, penjualan sarana produksi (Saprodi) dan alat mesin pertanian (Alsintan).

Semua unit usaha yang dikembangkan BUMDes merupakan usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Dusun Dalam. Bank desa dengan unit simpan-pinjamnya menjadi unit usaha yang paling menonjol apalagi didukung oleh bank nasional. Namun, unit usaha tersebut belum diaktanotariskan sebagai bentuk legalitasnya selain Perdes Desa Dusun Dalam. Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang tertuang dalam AD/ART BUMDes.

BUMDes Karya Dermawan Desa Dusun Dalam saat ini mengelola sebuah bangunan dengan peralatan penggilingan padi (*rice mill*) yang sangat berprospek berkembang karena sangat dibutuhkan jasanya oleh masyarakat sekitarnya yang umumnya bekerja sebagai petani padi. Selain itu terdapat unit usaha lain yaitu bengkel terali dan kolam pemandian anak-anak yang juga dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan merupakan peluang penyerapan tenaga kerja pemuda di desa tersebut.

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan laba usaha yang dihasilkan BUMDes. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa. BUMDes Karya Dermawan sejak berdiri tahun 2014 telah menyumbang PADes sebesar Rp. 16.000.000,- kemudian di tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 26.000.000,- dan di akhir tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan bagi PADes sebesar Rp. 120.000.000,-.

f. BUMDes Gerbang Nusantara, Desa Dataran Kempas Kab. Tanjung Jabung Barat¹¹

Keadaan Topografi Desa Dataran Kempas dilihat secara umum merupakan daerah dataran rendah sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Dataran Kempas. Awal mula pembentukan BUMDes Gerbang Nusantara berawal dari Musrembangdes Desa Dataran Kempas disepakati membentuk BUMDes karena desa ini tidak memiliki KUD. Hasil dari Musrembangdes tersebut terbentuklah pengurus inti-BUMDes. Namun sebelumnya telah ada rintisan dari potensi desa dari Desa Dataran Kempas yaitu budidaya ikan air tawar dan organisasinya telah didaftarkan ke Kemenkumham RI. Diharapkan budidaya air tawar tersebut dapat dikelola oleh BUMDes menjadi unit usaha BUMDes.

Dalam sektor perkebunan, petani menghadapi proses penuaan kelapa sawit yang telah berproduksi selama 25 tahun artinya tinggal sisa 4-5 tahun lagi dan harus diremajakan. Untuk menambah penghasilan selama masa peremajaan sawit, masyarakat memanfaatkan limbah ternak dan kelapa sawit menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. Selain itu, ada juga usaha peternakan sapi. Selanjutnya dengan semakin maraknya pola tanam organik, produksi pupuk organik jadi potensi yang terbuka untuk peluang perekonomian masyarakat. Warga yang tergabung dalam Kelompok tani Mekar Jaya memproduksi pupuk organik dengan merek “Raja Kompos” dan “Ratu Kompos”. Produksi pupuk kompos memiliki mitra yaitu PT. WKS dan PetroChina. Selain itu juga bermitra dengan Bank Indonesia (BI), Universitas Jambi (UNJA) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Usaha produksi pupuk kompos tersebut merupakan salah satu unit usaha

¹¹ M. Rialdi Syaputra, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. *Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakat di Provinsi Jambi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi

BUMDes Gerbang Nusantara. Omzet usaha pupuk kompos mencapai Rp. 1.135.000.000,- dengan produksi per 1.000 ton.

Saat ini BUMDes Gerbang Nusantara telah memiliki 58 ekor sapi dan memperkerjakan 55 tenaga kerja lokal untuk pengolahan pupuk kompos. Dengan berkembangnya usaha BUMDes ini dibutuhkan lebih banyak kotoran sapi sehingga hal ini menjadi pasar baru kotoran ternak bagi pemilik ternak yang ada di desa tersebut.

Dalam hal pemasaran pupuk kompos yang diproduksi BUMDes Gerbang Nusantara tidak mengalami kendala karena semua produksi pupuk komposnya diserap oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. WKS, bahkan masih terdapat peluang pasar yang potensial atau permintaan pupuk yang belum dapat dipenuhi.

Dasar hukum pembentukan BUMDes Gerbang Nusantara adalah Peraturan Desa Dataran Kempas No.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Di dalam peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini juga mengelola usaha simpan-pinjam melalui Lembaga Keuangan Agribisnis (LKM-A) "Mitra Usaha Mandiri" yang dibina oleh BI Perwakilan Jambi.

Pengembangan BUMDes di desa memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka peluang usaha-usaha baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat langsung ataupun tidak langsung dari keberadaan BUMDes. Manfaat langsung misalnya masyarakat menikmati air bersih, jasa penggilingan padi, dana pinjaman, tersedianya Saprodi dan Alsintan, menjadi karyawan BUMDes dan manfaat tidak langsung misalnya masyarakat membuka warung/kios di lokasi wisata, jalan yang lebih bagus, dan infrastruktur lainnya. Partisipasi dan dukungan masyarakat menjadi katalis bagi kemajuan BUMDes. Tanpa dukungan masyarakat yang ada di desa itu, BUMDes tidak akan bisa berjalan dengan baik.

4. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes

Walaupun BUMDes bermanfaat bagi masyarakat, tidak dipungkiri masih banyak masalah yang dihadapi mengingat keberadaan BUMDes baru seumur jagung. Berdasarkan temuan hasil penelitian berikut ini beberapa masalah yang dihadapi BUMDes saat ini.

a. Kemampuan Manajerial Pengelola BUMDes lemah

Kemampuan manajerial yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengatur, mengkoordinasikan dan menggerakkan para staf ke arah pencapaian tujuan pembentuk BUMDes. Dalam kasus BUMDes di Jambi misalnya, keberadaan BUMDes tergantung pada satu orang, kekurangan staf, dan tidak memiliki visi ke depan. Ada pengelola BUMDes yang sangat tergantung dari keputusan kepala desa karena dia mendominasi kepemimpinan di desa termasuk BUMDes. Kepala Desa memang secara *ex officio* adalah penasihat BUMDes, tapi pengelolaan BUMDes seharusnya otonom, bebas dari pengaruh Kepala Desa (Syaputra et 2017).

b. Terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola BUMDes.

Faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes juga menjadi kelemahan dalam mengembangkan BUMDes. Banyak pengelola BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga mereka lebih fokus ke pekerjaan utamanya daripada mengelola BUMDes (Agunggunanto, et. Al. 2016, Anggraini, 2016)

c. Manajemen keuangan yang kurang

Pencatatan keuangan BUMDes sering tidak transparan dan akuntabel karena SDM yang mengelola bagian keuangan tidak kompeten. Di sisi lain, ada BUMDes yang rutin membuat laporan keuangan namun masyarakat atau *stakeholder* tidak memahami laporan keuangan BUMDes.

d. Masalah komunikasi

Masalah komunikasi antara pengelola BUMDes dengan masyarakat muncul akibat kekecewaan masyarakat karena pendapatnya tidak didengar atau tidak ditanggapi oleh BUMDes, akibatnya kendala komunikasi menurunkan partisipasi masyarakat. Masyarakat hanya berani “*ngomong*” di belakang (Anggraeni, 2016).

e. Kecemburuan antar dusun

Kecemburuan biasanya berkaitan dengan pembagian keuangan BUMDes ke dusun-dusun yang menurut masyarakat tidak adil. Persoalan ini tidak akan muncul jika dalam musyawarah desa disepakati proporsi pembagian hasil keuntungan BUMDes untuk masing-masing dusun (Sidik, 2015).

f. Tidak transparan dalam merekrut pengelola BUMDes

Pengisian jabatan di BUMDes seringkali hanya ditentukan oleh Kepala Desa tanpa melalui seleksi, bahkan ada pengelola BUMDes merupakan “orangnya” Kepala Desa. Kasus lain perekrutan staf BUMDes tidak transparan karena direkrut dari luar desa, ini juga menimbulkan kecemburuan masyarakat. Namun pihak BUMDes beralasan staf yang dicari memenuhi kualifikasi tidak ada di desa. Karena itu, dalam musyawarah desa masalah-masalah harus mendapat perhatian agar dapat diselesaikan (Syaputra et 2017).

g. Permasalahan yang dialami BUMDes adalah keterbatasan modal sehingga BUMDes tidak mampu menjalankan jenis usaha yang beragam serta kurangnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes, sehingga kinerja kelembagaan BUMDes dalam pengembangan usaha kurang optimal. Modal BUMDes bersumber dari pemerintah desa melalui bantuan modal dari pemerintah kabupaten dan masyarakat desa (Agunggunanto, et. Al. 2016).

- h. Tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat desa rendah terkait pentingnya membentuk kelompok usaha. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan BUMDes dan rendahnya wawasan masyarakat desa dapat menjadikan program BUMDes yang direncanakan tidak berjalan lancar. Kurangnya koordinasi yang baik antar-pengurus memperburuk program BUMDes yang dijalankan (Agunggunanto, et. Al. 2016).
- i. Hubungan antara pengelola desa dan kepala desa. Idealnya pengambilan keputusan di BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan rapat dengan pemangku kepentingan. Namun karena pemerintah desa (terutama kepada desa) lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan pengurus BUMDES. Akhirnya pengelola BUMDes hanya mengikuti “apa kata kepala desa saja” dalam pengambilan keputusan (Anggraeni, 2016).

Isu lain adalah masalah pengawasan oleh pemerintah mengingat BUMDes menggunakan sebagian modal dari dana desa. Upaya untuk dengan cepat mengubah desa menjadi basis ekonomi jika tanpa diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggung jawab perangkat desa, dapat menjadi bumerang yang justru menghancurkan ikatan sosial warga. Fragmentasi masyarakat sangat mungkin terjadi, ketika pemerintah desa menjadi sumber daya yang semakin menarik orang-orang untuk berebut jabatan. Untuk itu, perlu disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya yang matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal alokasi dana desa tersebut termasuk tentang BUMDes, serta kemampuan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun daerah dan desa belum siap.

Payung hukum pembentukan BUMDes hanya berlandaskan Peraturan Desa juga menuai kritik.¹² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No. 4 Tahun 2015 Pasal 4, ayat 1 dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang BUMDes. Hal ini menjadi kontra produktif bagi sebagian besar pemerintah desa karena menurut kebiasaan yang berlaku, Peraturan Desa harus dinaungi oleh payung hukum seperti Peraturan Daerah. Namun hal ini disanggah oleh Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT yang menegaskan bahwa BUMDes yang terbentuk melalui Peraturan Desa telah memiliki kekuatan secara hukum. Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa BUMDes dengan Peraturan Desa berstatus berbadan hukum.¹³

5. Kesimpulan

Secara umum, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial maka BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial. Namun pada sisi lain, BUMDes juga harus menjadi pilar peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dengan cara mencari keuntungan melalui aktifitas penjualan barang dan jasa. BUMDes tidak hanya berorientasi pada laba dan profit saja, namun harus digunakan sebaik-baiknya untuk gerakan sosial pada level desa untuk kesejahteraan masyarakat.

BUMDes berperan sebagai gerakan sosial dalam arti BUMDes sebagai organisasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial pada masyarakat desa. Banyak kasus yang menunjukkan BUMDes berhasil mengangkat desa terpelosok dan miskin kini menjadi salah satu

¹² Lihat M. Rialdi Syaputra, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. *Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakat di Provinsi Jambi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi

¹³ www.kemendes.go.id, data diakses 15 Oktober 2018.

obyek wisata di Gunung Kidul. Begitu pula, kasus BUMDes di Desa Ponggok yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya melalui unit usaha yang dikelola BUMDes. BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian juga sangat membantu petani dalam menjual produk pertanian sehingga tidak melalui tengkulak. Sarana produksi pertanian yang jual BUMDes juga memudahkan petani untuk bercocok tanam tanpa harus membeli sarana produksi ke kota. Usaha simpan-pinjam membantu masyarakat yang akan memulai usaha tanpa harus repot ke bank di kota. Desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih berhasil mengubah kondisi itu dengan mendirikan BUMDes yang mengelola air bersih yang disalurkan ke warga dengan biaya yang terjangkau.

Sebagai badan usaha memperoleh keuntungan bagi BUMDes merupakan sesuatu yang wajar, karena tanpa ada keuntungan BUMDes tidak langgeng. Namun apakah ukuran keberhasilan BUMDes hanya dari keuntungan? Sesungguhnya, kehebatan BUMDes tak bisa diukur dari keuntungan saja, kehebatannya juga diukur dari seberapa besar manfaat sosial BUMDes tersebut. BUMDes yang berhasil mengatasi masalah air bersih yang mendera warga desa jika musim kemarau tiba lebih hebat dibandingkan BUMDes yang omsetnya milyaran. Ide-ide yang inovatif inilah yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan katalis BUMDes dengan segala aktivitasnya.

Sebagai lembaga baru, di desa BUMDes masih menghadapi banyak masalah. Seiring dengan waktu dan proses jatuh bangun serta belajar dari kegagalan, prospek BUMDes di masa depan akan cerah. Peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes perlu terus dilakukan terutama untuk mengatasi lemahnya manajemen dan administrasi keuangan. Tentu dengan syarat *political will* dan kebijakan dari pemerintah pusat tidak berubah-ubah. Jangan sampai inisiatif dari masyarakat mati karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Meskipun peran masyarakat menentukan, saat ini BUMDes masih tergantung pada pemerintah desa. Di masa depan untuk mengembangkan agar BUMDes mandiri maka perlu mempertimbangkan kepemilikan BUMDes yang diperluas dengan menjual “saham” ke masyarakat, sehingga BUMDes menjadi milik seluruh masyarakat desa. Skema kepemilikan tersebut bisa diatur persentase antara “saham” yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat desa. Agar kepentingan desa terjaga, misalnya, pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bisa menanamkan modal awal 60%, sedangkan warga sebagai manifestasi kepemilikan publik memiliki “saham” 40%. Skema inilah yang oleh Faedlulloh (2018) akan memungkinkan aktifitas BUMDes menjadi ruang belajar bagi warga desa untuk berdemokrasi secara ekonomi.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna. 2016. “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta”, *MODUS* Vol.28 (2): 155-167, 2016.
- Agunggunanto, Edy Yusuf; Fitrie Arianti; Edi Wibowo Kushartono dan Darwanto “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, No. 1 Vol 13, 2016.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- “Badan Usaha Milik Desa Memperkuat Ekonomi Desa”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/10/26/190837926/Badan.Usha.Milik.Desa.Memperkuat.Ekonomi.Desa>. Link diakses 23 Agustus 2018.

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, dan Suwondo. 2013. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.

Faedlulloh, Dodi. 2018. "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris" *Journal of Governance Volume 3, Issue 1, June 2018*.

Ridlwani, Zulkarnain. 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perkonomian Desa." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014*.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Pandungan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya: PKSDP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Rahmat, Abdi. 2014. "Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 19, No. 1, Januari 2014: 27-56.

Syaputra, M. Rialdi, Asnelly Ridha Daulay, Elwamendri. 2017. *Model Pengembangan BUMDes Guna Meningkatkan Inovasi dan Kemandirian Masyarakat di Provinsi Jambi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi

Sidik, Fajar. 2015. "Menggal Potensi Lokal, Mewujudkan Kemandirian Desa", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 19 No 2 - November 2015.

Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi, *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. (Ringkasan hasil Penelitian). Link dilihat pada <http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.RINGKASAN.pdf>. Data diakses pada 3 Oktober 2018.

BAGIAN 2

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUMDES (STUDI PADA BUMDES CAHAYA MAKMUR DI KAB. SIGI SULAWESI TENGAH DAN BUMDES TIRTA MANDIRI DI KAB. KLATEN JAWA TENGAH)

Mohammad Mulyadi¹

Pendahuluan

Berbagai hipotesis telah diuji, dan diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan. Khusus dalam artikel yang ditulis sebagai bagian dari buku ini, ingin dijelaskan tentang besarnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat desa tersebut berhasil. Begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin membuat pembangunan masyarakat desa tidak berhasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang desa, mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

¹ Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran UU tentang Desa dalam bentuk dana desa harusnya dapat dikapitalisasi sebagai penambahan aset pemerintah desa dan memicu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desa tampak mulai bergeliat dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) sebagai instrumen untuk mencapai misi yang terkandung dalam tujuan ini telah mencerminkan momentum politik yang penting. Dengan merujuk konsepsi BUMDes sebagaimana tercantum dalam UU tentang Desa menunjukkan arti pentingnya pengelolaan secara profesional dan akuntabel, inklusif dan partisipatoris, adil, dan berdasar pada sifat kegotongroyongan. Pengelolaan BUMDes menurut mandat UU tersebut tentu mensyaratkan adanya dimensi partisipasi yang tidak hanya dalam konteks hubungan sosial antar-masyarakat secara umum tetapi diharapkan lebih terstruktur ke dalam kelembagaan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, sifat pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel dapat semakin memperkuat peran partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.

Meskipun demikian, upaya pengelolaan BUMDes yang dapat semakin memperkuat peran partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah dicapai. Sejumlah faktor turut berperan, di antaranya, *pertama*, faktor sosial ekonomi. Hal ini mencakup beberapa aspek penting seperti tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan, konteks tingkat pendidikan, sosial budaya dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. *Kedua*, faktor peran kepemimpinan daerah untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam struktur kelembagaan baik dari tingkat perencanaan sampai tingkat evaluasi. *Ketiga*, faktor sumber daya ekonomis/sosial lokal yang dijadikan sebagai landasan

pembentukan sebuah BUMDes. Data menunjukkan bahwa sejumlah BUMDes yang dinilai berhasil lebih didominasi oleh 'nilai jual' sumber daya ekonomis/sosial lokal yang telah dikembangkan sebelumnya.

Fakta menyebutkan bahwa pasca-diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, jumlah BUMDes mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Hal ini memicu pembentukan BUMDes di seluruh Indonesia kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.

Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat karena salah satu amanah dalam penggunaan dana desa, selain untuk pembangunan infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui wadah bernama BUMDes. Di bawah pengelolaan BUMDes, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa menjadi sangat mandiri. Contoh nyata adalah Desa Ponggok (Klaten) yang beromzet Rp. 1,3 miliar per-tahun, Desa Bleberan (Gunung Kidul) beromzet Rp. 1 miliar per-tahun, atau Desa Kertayasa (Pangandaran) yang beromzet Rp. 300 juta per-tahun (Maulani, 2017). Desa-desa tersebut setidaknya mulai sadar dalam memetakan potensi yang dimilikinya.

Mendasarkan argumen pada hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat tidak menutup ruang argumen bahwa keberhasilan pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh sejumlah faktor lain. Hal ini karena dalam perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai aspek pembangunan sosial ekonomi secara umum ditentukan oleh faktor struktural, prosedural, dan kultural (Wirutomo, 2014). Partisipasi masyarakat baru mewakili aspek prosedural dan, dalam batas tertentu, aspek kultural.

Dalam pemahaman inilah, penelitian ini akan dibatasi pada dimensi pengaruh partisipasi masyarakat yang secara operasional akan disajikan dalam rumusan penelitian di bawah ini.

Partisipasi Masyarakat

Akhir-akhir ini partisipasi menjadi satu istilah yang cukup penting dan banyak digugat dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni; *to participate* yang berarti ikut serta, mengambil bagian atau terkadang juga sebagai berperan serta.

Partisipasi harus dibedakan dengan mobilisasi, karena memang kedua hal ini sangat berbeda walaupun pada masa yang lalu, hal ini dicampuradukkan untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah. Dalam mobilisasi sangat jelas ada unsur paksaan/keharusan di dalamnya, baik oleh pemerintah/penguasa ataupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih dari yang akan digerakkan.

Selanjutnya Oakley et. al., (1991:9) memberi pemahaman yang lebih luas tentang konsep partisipasi, yaitu:

Participation is considered a voluntary contribution by the people in one or another of the public programmes supposed to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or criticizing its contents (Economic Commission For Latin America, 1973).

With regard to rural development... participation includes people's involvement in decision-making processes, in implementing programmes, their sharing in the benefits of development programmes and their involvement in efforts to evaluate such programmes (Cohen and Uphoff, 1977).

Participation is concerned with... the organized efforts to increase control over resources and regulative institutions in given social situations on the part of groups and movements of those hitherto excluded from such control (Pearse and Stiefel, 1979).

Community participation [is] an active process by which beneficiary or client group influence the direction and execution of a development project with a view to enhancing their well-being in terms of income, personal growth, self reliance or other values they cherish (Paul, 1987).

Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, di mana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Janabrota (Ndraha, 1990:20) mengartikan bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”. Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena proses keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Akhir-akhir ini kritik terhadap konsep partisipasi oleh para ahli, menunjukkan pergeseran paradigma tentang arti partisipasi sebenarnya. Hal ini karena partisipasi yang selama ini terjadi adalah semu, keikutsertaan masyarakat dimobilisasi oleh kekuatan tertentu di luar masyarakat itu sendiri. Pemerintah sering menganggap masyarakat adalah kelompok yang lemah dan harus menerima apapun yang menjadi kebijakan pemerintah.

Kebijakan terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi oleh Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam Sirajuddin (2006: 14) dianggap suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbkan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).

Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga ditandai oleh adanya 'patron-klien' antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. Di sini terbentang hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang murni (*genuine*) dan substantif sebagai salah satu tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik (*degree of tokenism*), bahkan masih ditemukan partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi.

Hal ini disebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harapan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat

Dalam pelebagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat

sipil yang berbadan hukum formal (NGO/LSM). Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

Di banyak daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal Peraturan Daerah merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks partisipasi, peraturan daerah juga penting ditetapkan terutama yang berkaitan dengan pelebagaan partisipasi di tingkat daerah. Karena karakteristik sosial dan budaya daerah beragam, maka tidak mungkin ketentuan pelebagaan publik ini ditetapkan di tingkat pusat.

Secara umum, ruang bagi publik untuk berpartisipasi saat ini lebih bersifat spontan melalui beberapa wahana. Di antara wahana utama yang sering dipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar pendapat publik (*public hearing*) di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat tidak sampai pada tingkatan pengambilan keputusan bersama dan kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasi.

Untuk menumbuhkan partisipasi, diperlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat, di mana salah satu wujudnya yang ada di desa adalah dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai tugas dan fungsinya BPD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Artinya

lembaga ini mempunyai sistem kerja komunikasi dua arah yaitu pemerintah desa menawarkan berbagai kebijakan kepada masyarakat desa, begitupun sebaliknya masyarakat memberikan usulan kepada pemerintah desa. Menurut Canter (1977) dalam Sirajuddin (2006:13) bahwa:

“Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang (Canter, 1977). Secara sederhana, Canter mendefinisikan sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

Lebih lanjut menurut Sirajuddin (2006: 13-14) bahwa:

Beberapa ahli berpandangan lain tentang partisipasi yang sebenarnya. Goulet (1989), menyebut partisipasi sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Bahasan yang lebih khusus lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas *incentive material* yang mereka butuhkan. Dengan perkataan lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai “paspor” mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian partisipasi membutuhkan pemberdayaan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam kehidupan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Menurut Suharto (2005:58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam; (a) memenuhi kebutuhan dasarnya; (b) menjangkau sumber-sumber produktif; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam berpartisipasi.

Besarnya jumlah angka kemiskinan penduduk Indonesia yang berdomisili di desa, menjadikan mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dianggap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek saja, bukan subyek pelaku pembangunan.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan kekuatan masyarakat dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara (Mahardika, 2001 : 41). Pemikiran dasar dari perlunya partisipasi masyarakat adalah bahwa, merealisasikan proyek pembangunan mudah mengalami ancaman kegagalan-kegagalan sepanjang tidak memberdayakan penduduk terkait dalam semua proses yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pengawasan pembangunan. Hal itulah yang mendorong munculnya suatu dukungan agar ditinggalkannya strategi “*top-down*” dan sebagai gantinya menghadirkan model interaksi dengan partisipasi. Dengan demikian, partisipasi ditempatkan sebagai bagian terpenting dari proses pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat tentu membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama

partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Tanpa partisipasi masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut agaknya perlu dipertanyakan. Karena itu, dinamika partisipasi masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat juga dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari seseorang untuk membantu kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerahnya, karena partisipasi yang dilakukan dengan ikhlas (sukarela) akan membuat masyarakat merasa turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Keith Davis (1962 dalam Sastropetro, 1988:13) melalui pengertian partisipasi itu sendiri yang mengatakan: partisipasi sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Timpe (2002: 89) mengemukakan bahwa "partisipasi dapat didefinisikan sebagai melakukan oleh, dengan dan lewat orang lain dengan menciptakan situasi di mana mereka terlibat secara mental dan emosional dalam situasi yang mendorong sumbangan yang positif kepada tujuan."

Apabila menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat berjalan dengan baik, dan hal ini sangat tergantung pada cara-cara pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak mengikutsertakan mereka.

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Menurut Khairuddin (2000: 126) ditinjau dari segi motivasi, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena: takut atau terpaksa; ikut-ikutan; dan kesadaran. Partisipasi yang dilakukan dengan paksaan atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang ditentukan. Berpartisipasi dengan ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat desa. Apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi budaya masyarakat desa.

Motivasi partisipasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri. Dalam

hal ini, warga masyarakat dapat menerima pembangunan karena mereka sadar bahwa pembangunan tersebut semata-mata adalah kepentingan mereka juga. Karena itu apa yang mereka lakukan bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan, tetapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Partisipasi bentuk inilah yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang didasarkan atas kesadaran, maka masyarakat dapat diajak untuk memelihara dan merasa memiliki objek pembangunan yang diselenggarakan di desa tersebut, terutama pembangunan-pembangunan fisik. Banyak kegagalan dalam pembangunan fisik di daerah hanya karena masyarakat tidak merasa memiliki proyek pembangunan itu, dan akibatnya mereka tidak merasa berkewajiban untuk memelihara hasil pembangunan tersebut, meskipun hasil pembangunan tersebut sesungguhnya sangat mereka butuhkan.

Partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah. Ada bermacam-macam faktor yang mendorong kerelaan untuk keterlibatan ini, bisa karena kepentingan bisa karena solidaritas. Bisa karena memang mempunyai tujuan yang sama, bisa juga karena ingin melakukan langkah bersama walaupun tujuannya berbeda. Apapun aktor yang mendorong, partisipasi akhirnya harus membuahkan kesepakatan tentang tujuan yang hendak dicapai dan tindak yang akan dilakukan bersama. Artinya, apa yang semula bersifat individual harus secara sukarela diubah dan diolah menjadi tujuan dan kepentingan kolektif. Ini jelas merupakan persoalan yang tidak sederhana, sering harus terjadi dalam proses yang panjang dan berbelit. Dalam proses inilah terjadi argumen, negosiasi, kompromi untuk kemudian sampai pada kesepakatan.

Menurut Thoha (1990:73), partisipasi adakalanya dilakukan secara mandiri dan adakalanya dengan mobilisasi. Partisipasi mandiri adalah suatu usaha berperan serta yang dilakukan sendiri oleh pelakunya untuk mempengaruhi *policy* yang bakal dibuat. Partisipasi mobilitas adalah keikutsertaan rakyat dalam berperan serta untuk mempengaruhi

kebijaksanaan pemerintah dengan cara dimobilisasi pihak lain. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara sederhana, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Untuk itu peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada *monitoring* dan evaluasi merupakan “daya dorong” guna mewujudkan

sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai sebuah metodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

Kelemahan bentuk perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah biasanya terletak pada terbatasnya akses masyarakat untuk terlibat dalam tahap-tahap perencanaan tersebut, karena partisipasi dalam konteks pembangunan oleh pemerintah lebih diartikan sebagai mobilisasi. Oleh karenanya keberhasilan suatu pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kegiatan tersebut, sebaiknya dimulai pada tahap perencanaan pembangunan sampai dengan *monitoring* dan evaluasi.

Pengembangan BUMDes

Pengembangan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan saja, tetapi juga perlu memikirkan perluasan dan pemerataan aktivitas ekonomi pada berbagai elemen masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selama ini memiliki dampak yang lebih terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu saja. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak pada pemerataan akan menimbulkan kesenjangan sosial dan masalah kerawanan keamanan. Pertimbangan untuk melakukan pemerataan ekonomi dapat dilakukan dengan cara menciptakan dispersi pusat perekonomian pada seluruh wilayah di Indonesia.

Upaya memberdayakan BUMDes merupakan representasi kebijakan pemerintah untuk melakukan pemerataan kegiatan ekonomi hingga pada tingkat pedesaan. Bila selama ini kegiatan perekonomian lebih terkonsentrasi di perkotaan, maka penciptaan BUMDes akan ikut berperan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

BUMDes didukung melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Sebagai lembaga yang akan menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan, maka perlu diketahui karakteristik dari BUMDes. Terdapat 10 (sepuluh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan/atau penyerta modal;
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;

8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*);
9. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pemdes;
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Maksud pembentukan BUMDes adalah: (1) menumbuhkembangkan perekonomian desa; (2) meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa; dan (4) sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Sedangkan tujuan pembentukan BUMDes antara lain: (1) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; (2) menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa; (3) menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; (4) meningkatkan kreativitas wirauasaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and*

user-controlled), transparansi, emansipatif, akuntable, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.

Sementara itu BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes dapat diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes. Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci

pelaksanaan otonomi daerah. Karena semangat dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan Orde Baru lebih bercorak sentralistik (*Jakarta minded*).

Lebih dari satu dasawarsa, sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi di daerah. Pemerintah terlihat juga terus berupaya untuk selalu mengembangkan pola dan sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pendek kata, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Dalam tataran yang lebih operasional dan dengan kadar basis legalistik yang lebih komprehensif, nafas baru untuk mendorong keterlibatan masyarakat di daerah adalah disahkannya dengan kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui amanat UU ini, terlihat jelas penguatan relasi antara kepentingan penguatan partisipasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari satu dasawarsa, sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan, telah banyak hal yang terjadi di daerah. Pemerintah terlihat juga terus berupaya untuk selalu mengembangkan pola dan sistem pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pendek kata, desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Dalam sejumlah kajian akademik, konsepsi kesejahteraan masyarakat, untuk sebagian sebenarnya bisa dirujuk pada konsepsi tentang kesejahteraan sosial. Melalui Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, negara mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Secara umum definisi ini mencakup sejumlah dimensi penting, yakni kesejahteraan masyarakat secara umum, keberdayaan orang secara ekonomis, terpenuhinya

serangkaian layanan sosial, mampu mengembangkan potensi diri dan mampu melaksanakan fungsi sosial.

Definisi ini juga menegaskan adanya persamaan dengan definisi yang diberikan badan dunia PBB di mana salah satu dimensi penting tersebut mencakup penegasan pentingnya individu atau pribadi sebagai unsur bangunan masyarakat sebagai subjek pembangunan (Das et. al., 2017; Prayitno, 2013).

Selain itu, kesejahteraan sosial sebagai sebuah sistem. Dalam pengertian ini, Walter Friedlander mendefinikan kesejahteraan sebagai sistem yang diorganisasikan dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik dalam dimensi standar kehidupan, kemampuan diri, dan kesejahteraan individu maupun keluarganya. Definisi ini menyiratkan pentingnya sistem yang dibangun dari serangkaian kelembagaan dan pelayanan sosial dalam upaya memfasilitasi peningkatan standar kesejahteraan. Definisi ini juga sekaligus memperkuat definisi yang dikeluarkan badan dunia PBB bahwa keadilan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu relasi resiprokal setiap individu dengan lingkungan sosialnya (Pengertian Kesejahteraan sosial, <http://www.mainotes.com/2015/12/definisi-kesejahteraan.html>).

Beberapa ahli/akademisi Indonesia sendiri mendefinisikan konsepsi kesejahteraan sosial dari sudut pandang yang beragam. Dari sudut pandang pembangunan sosial, Suharto misalnya mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisasikan ke dalam bidang pembangunan sosial (Suharto, 2007).

Dari semua definisi di atas, satu karakteristik yang berbeda dengan pendefinisian konsepsi tersebut oleh negara-negara maju yang mengidentikan kesejahteraan sosial dengan konsepsi jaminan sosial (*social security*) dalam bentuk asuransi dan jaminan, yang diselenggarakan negara terutama khususnya untuk anggota masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*) (Suharto, 2007).

Namun demikian, pelembagaan otoritas publik yang menyelenggarakan jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan berdasarkan prinsip gotong-royong sedikit banyak merefleksikan cara pandang negara terhadap konsepsi kesejahteraan sosial dalam pemahaman jaminan sosial ala negara-negara maju (Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Pada sisi lain, setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera. Sejahtera menunjukan kepada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, damai, aman sentosa, makmur, serta selamat dari segala macam gangguan. Stiglitz (2009) mendefinisikan kesejahteraan dalam beberapa dimensi yang meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan) baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

Dari definisi luas seperti yang ditawarkan Stiglitz di atas membuktikan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. Memang betul bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk

nilai PDRB, secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain PDRB, ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita, tetapi juga diteropong melalui capaian di sektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek Huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH) adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM.

Beberapa pemerintah daerah biasanya menetapkan target dan fokus tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, PDRB per-kapita, indeks gini yang rendah, pemerataan pendapatan, penurunan penduduk miskin dan kriminalitas yang semakin menurun. Ke semua indikator ini memiliki ukurannya masing-masing dan bisa dijadikan sarana evaluasi apakah pemerintah sukses atau gagal dalam mengurus rakyatnya.

Fokus lain yang menjadi fokus pemerintah daerah biasanya adalah kesejahteraan masyarakat. Fokus yang kedua ini juga memiliki indikator antara lain angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi murni. Indikator ini tergabung dalam fokus kesejahteraan

masyarakat di bidang pendidikan. Selanjutnya fokus kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan memiliki indikator antara lain angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan persentase balita gizi buruk.

Paradigma yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu hanya ditangkap di sektor ekonomi saja otomatis gugur karena indeks pembangunan manusia (IPM) telah menjawabnya dengan menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat. Sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus digambarkan dalam indeks ini sehingga kesejahteraan umum dapat diukur dengan cakupan yang luas. IPM juga mampu menjelaskan ukuran-ukuran dalam infrastruktur dan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah hal inilah yang menyebabkan IPM mampu mendapatkan gambaran capaian pembangunan dalam sektor ekonomi dan sosial.

Penelitian ini akan mengarah pada pengaruh partisipasi masyarakat pada BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang akan diukur akan berkaitan erat dengan pengaruh beroperasinya BUMDes. Pengaruh tersebut bergantung dengan bidang usaha yang diusahakan oleh BUMDes yang umumnya bergerak dalam usaha simpan-pinjam, penjualan kebutuhan pokok, jasa, pariwisata, dan lainnya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan

dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi di mana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Teori kemasyarakatan menurut Todaro ini yang dinilai lebih sesuai untuk diimplementasikan dalam penelitian kali ini.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “besarnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat positif dan signifikan.”

Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah *explanatory survey* sebagai upaya mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan angket. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antarvariabel. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan tujuan dari metode survei adalah untuk menguji berbagai hipotesa tertentu dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesa tersebut.

Untuk menetapkan populasi dan ukuran sampel, maka terlebih dahulu perlu diketahui unit analisis dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan BUMDes di beberapa desa yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, terutama Kabupaten Klaten, dan Provinsi Sulawesi Tengah, terutama Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Untuk menentukan jumlah populasi yang akan dijadikan sampel, digunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang

dikembangkan dari Isaac dan Michael sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2008:98-99).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner (penyebaran angket) ini adalah suatu cara pengajuan pernyataan/pertanyaan tertulis serta pilihan jawabannya kepada para responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian ini berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data primer (data yang langsung dari sumbernya). Penyusunan kuesioner penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *Rating Scale*. Selain itu juga dilakukan wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan informan. Namun, bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Wawancara menjadi penting dalam upaya menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, agar supaya nilai pengaruh atau hubungan antara independen variabel dan dependen variabel yang diperoleh dari proses analisis data kuantitatif menjadi bermakna.

Analisis data dilakukan dengan terlebih dulu menguji validitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Sehubungan dengan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka kuesioner yang disusun tersebut harus dapat teruji validitasnya. Selanjutnya melakukan uji reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Untuk membahas data yang diperoleh melalui proses

kegiatan penelitian, penulis menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif adalah interpretasi dan pengukuran atas data-data hasil penelitian yang berwujud angka-angka atau bilangan tertentu. Selain itu untuk mengetahui lebih dalam tentang apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat maka dilakukan teknik analisis data dengan model interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman. Di mana terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian disebut valid. Jika sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen penelitian, yaitu pengujian validitas (kesahihan) atas data yang terkumpul. Pengujian terhadap validitas ini akan menentukan layak atau tidaknya data tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk menguji validitas setiap butir instrumen penelitian, maka skor-skor yang ada pada butir instrumen yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir instrumen dapat diketahui dengan pasti butir-butir instrumen yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti dapat mengganti ataupun merevisi butir-butir instrumen. Bagi peneliti, pengujian terhadap butir instrumen dapat dilakukan dengan mengorelasikan butir dengan skor total pada faktor.

Butir instrumen yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa butir instrumen tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya, syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0.3$. Apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3, maka butir instrumen tersebut tidak valid. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:152), bahwa “suatu *item* dikatakan valid, jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3”.

Hasil penelitian dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, hasil penelitian itu tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan. Untuk mengumpulkan data penelitian instrumen pada penelitian ini digunakan kuesioner, sehingga data yang diperoleh dari responden akan diuji kualitas datanya dengan menggunakan uji validitas.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0, maka untuk variabel Partisipasi Masyarakat diperoleh hasil uji, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Validitas Variabel X

Item Pertanyaan Variabel X	Koefisien Korelasi	t hitung	t tabel	Keputusan
1	2	3	4	5
1	0.303	3.099	1.660	Valid
2	0.790	12.559	1.660	Valid
3	0.623	7.763	1.660	Valid
4	0.457	5.008	1.660	Valid
5	0.247	2.484	1.660	Valid
6	0.651	8.359	1.660	Valid
7	0.589	7.104	1.660	Valid
8	0.631	7.928	1.660	Valid
9	0.671	8.821	1.660	Valid
10	0.298	3.043	1.660	Valid
11	0.513	5.825	1.660	Valid
12	0.586	7.049	1.660	Valid
13	0.340	3.524	1.660	Valid

Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa semua *item* pertanyaan valid untuk variabel Partisipasi Masyarakat, karena nilai r korelasinya lebih besar dari nilai r kritis = 0.3. Dikarenakan setiap nilai t hitungnya melebihi 1.96, maka semua *item* adalah valid.

Selanjutnya, berdasarkan uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0, maka untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat diperoleh hasil uji, sebagai berikut:

Tabel 2 .Hasil Validitas Variabel Y

Item Pertanyaan Variabel Y	Koefisien Korelasi	t hitung	t tabel	Keputusan
1	2	3	4	5
1	0.740	10.72339304	1.660	Valid
2	0.758	11.32697364	1.660	Valid
3	0.702	9.607513533	1.660	Valid
4	0.726	10.28970079	1.660	Valid
5	0.721	10.14155454	1.660	Valid
6	0.742	10.78777251	1.660	Valid
7	0.751	11.08559462	1.660	Valid
8	0.779	12.10919156	1.660	Valid
9	0.424	4.563115093	1.660	Valid
10	0.525	6.01228251	1.660	Valid
11	0.687	9.214861871	1.660	Valid
12	0.703	9.634553197	1.660	Valid
13	0.634	7.99069385	1.660	Valid
14	0.623	7.762827117	1.660	Valid
15	0.553	6.469153326	1.660	Valid
16	0.329	3.395736244	1.660	Valid
17	0.743	10.82020182	1.660	Valid
18	0.650	8.336795817	1.660	Valid
19	0.373	3.918335288	1.660	Valid
20	0.597	7.253225048	1.660	Valid

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua *item* pertanyaan valid untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat. Karena, nilai r korelasinya lebih besar dari nilai r kritis = 0.3, karena setiap nilai t hitungnya melebihi 1.96, maka semua *item* adalah valid.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, maka sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen penelitian, yaitu pengujian reliabilitas (keterandalannya) atas data yang terkumpul. Pengujian terhadap reliabilitas ini akan menentukan layak atau tidaknya data tersebut untuk dianalisis lebih lanjut.

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (*reliable*). Walaupun secara teoritis besarnya koefisien reliabilitas sekitar 0.00 s/d 1.00, akan tetapi pada kenyataannya koefisien sebesar 1.00 tidak pernah tercapai dalam pengukuran. karena manusia sebagai subjek penelitian merupakan sumber *error* yang potensial. Dari hasil pengolahan data diketahui, bahwa:

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 22.0, maka untuk variabel Partisipasi Masyarakat, diperoleh hasil uji reliabilitas sebesar 0.776, dan variabel Kesejahteraan Masyarakat diperoleh hasil uji reliabilitas sebesar 0.924. Hasil uji reliabilitas variabel-variabel tersebut menunjukkan reliabilitas hasil ukur yang tinggi. Hal ini berarti, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur dapat dipercaya.

Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden Dimensi *Participation In Decision Making* pada Variabel Partisipasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi *Participation In Decision Making*, sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation In Decision Making* dapat dilihat dalam diagram berikut:

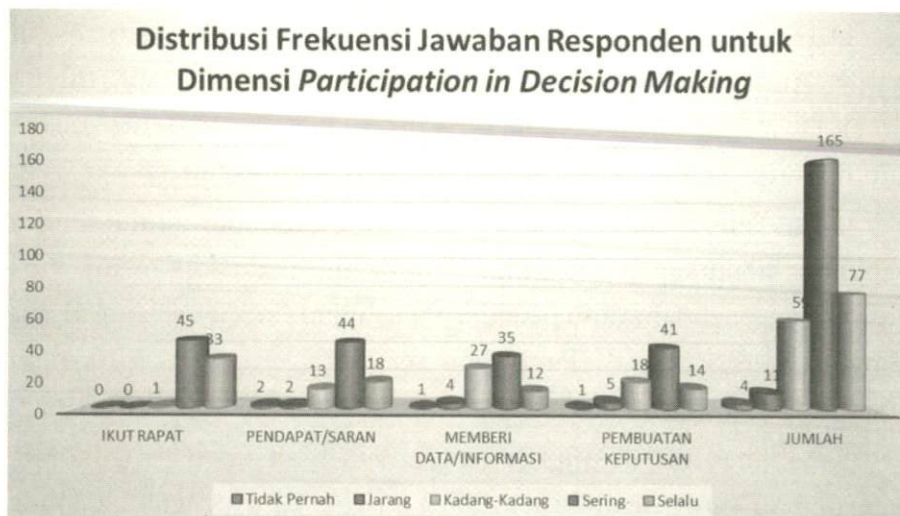


Diagram 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Decision Making*

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berpendapat warga masyarakat **sering** menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes. Kondisi seperti ini sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

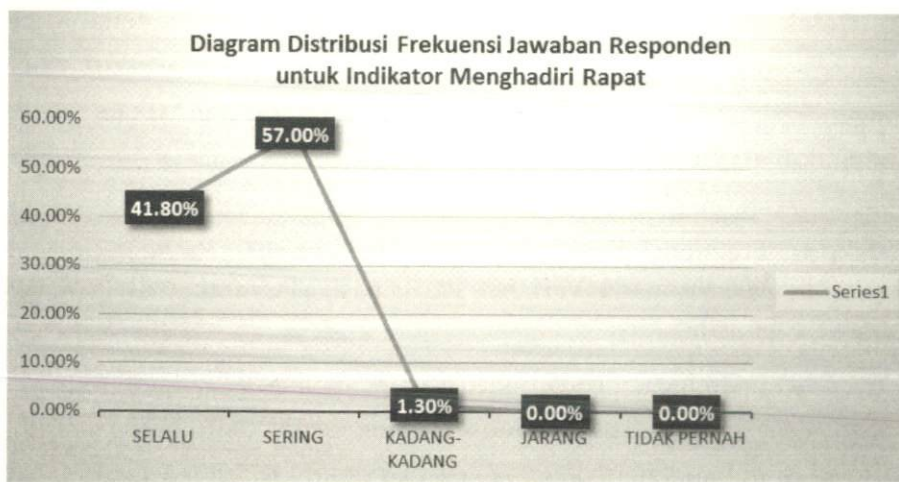


Diagram 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Menghadiri Rapat

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan masyarakat **sering** (45%), disusul kemudian **selalu** (33%), sementara yang berpendapat kadang-kadang (1.3%), jarang (0 %) dan tidak pernah (0 %) menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes tersebut. Artinya mayoritas responden berpendapat bahwa warga masyarakat **sering** menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:



Diagram 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Memberikan Pendapat/Saran

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (55.7%), disusul kemudian **selalu** (22.8%), sementara yang berpendapat kadang-kadang (16.5%), jarang (2.5%) dan tidak pernah (2.5%) mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering**

mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.

Adapun indikator memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:

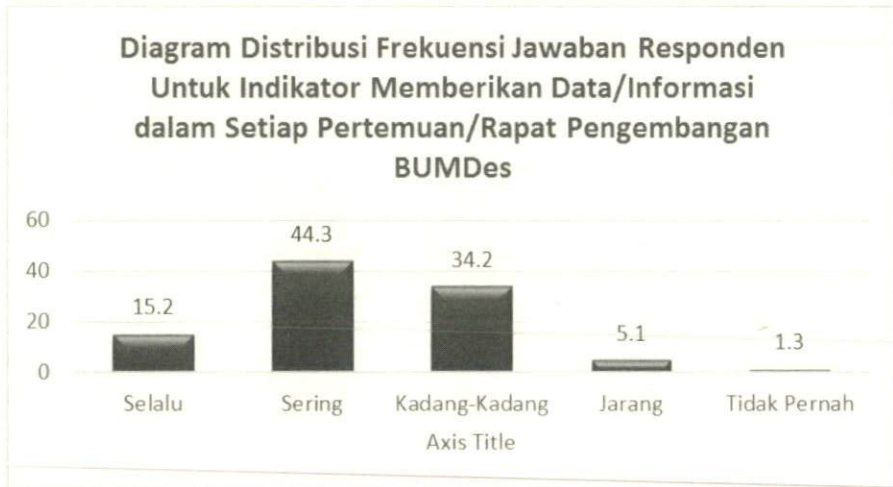


Diagram 4. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Memberikan Data/Informasi dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (44.3%) disusul kemudian kadang-kadang (34.2%) sementara yang berpendapat selalu (15.2%) jarang (5.1%) dan tidak pernah (1.3%) memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam proses/perumusan pembuatan keputusan dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



**Diagram 5. Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam
Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan (n=79)**

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (51.9%) disusul kemudian kadang-kadang (22.8%) sementara yang berpendapat selalu (17.7%) jarang (6.3%) dan tidak pernah (1.3%) ikut serta dalam proses/pembuatan keputusan dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** ikut serta dalam proses/pembuatan keputusan dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Dimensi Participation in Implementation

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi *Participation in Implementation*, sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation in Implementation* dapat dilihat dalam diagram berikut:

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi
*Participation in Implementation***

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
5	1	6	31	31	10
6	1	2	9	50	17
7	3	11	6	27	32
8	6	13	37	19	4
Jumlah	11	32	83	127	63

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk
Dimensi *Participation in Implementation***

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	63	315	27.46	2
4	127	508	44.29	1
3	83	249	21.71	3
2	32	64	5.58	4
1	11	11	0.96	5
Jumlah	316	1147	100.00	

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation in Implementation* ini adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 4 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 79 \text{ (jumlah responden)} = 1580$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1147 atau 72.59%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 72.59% tersebut terletak pada daerah **sering**

(dalam batas tertinggi yaitu 61-80). Artinya responden berpendapat bahwa warga masyarakat **sering** berpartisipasi dalam menjalankan BUMDes.

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi tenaga sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

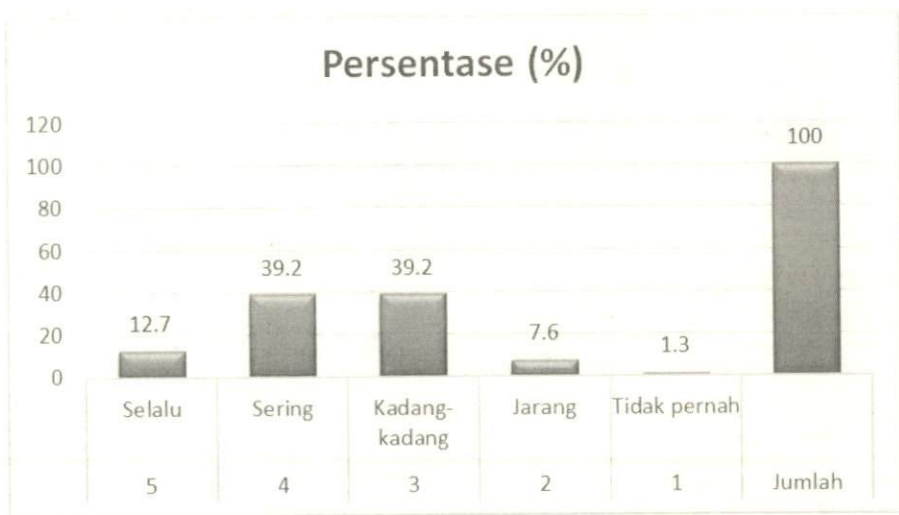


Diagram 6. Persentase Kontribusi Tenaga dalam Kegiatan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (39.2%) dengan persentase yang sama bagi responden yang menjawab masyarakat **kadang-kadang** (39.2%) sementara yang berpendapat selalu (12.7%) jarang (7.6%) dan tidak pernah (1.3%) memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** atau juga **kadang-kadang** memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

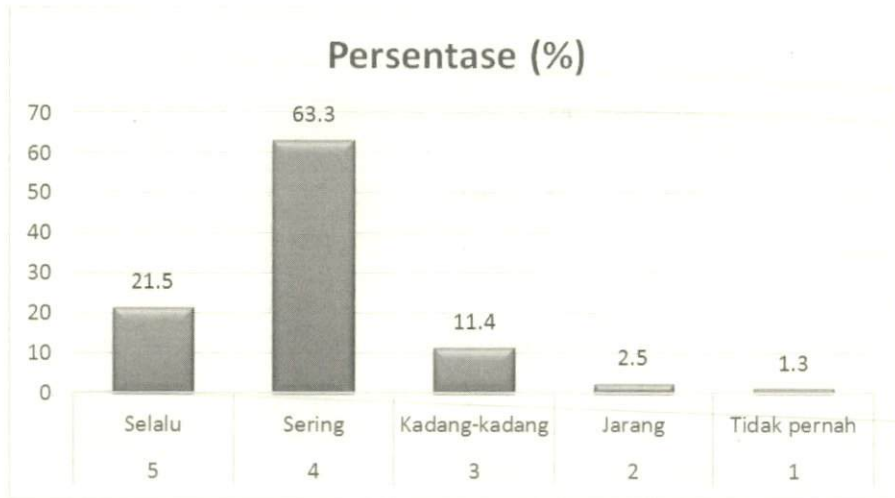


Diagram 7. Persentase dalam memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (63.3%) disusul kemudian kadang-kadang (21.5%) sementara yang berpendapat selalu (11.4%) jarang (2.5%) dan tidak pernah (1.3%) memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui uang dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:

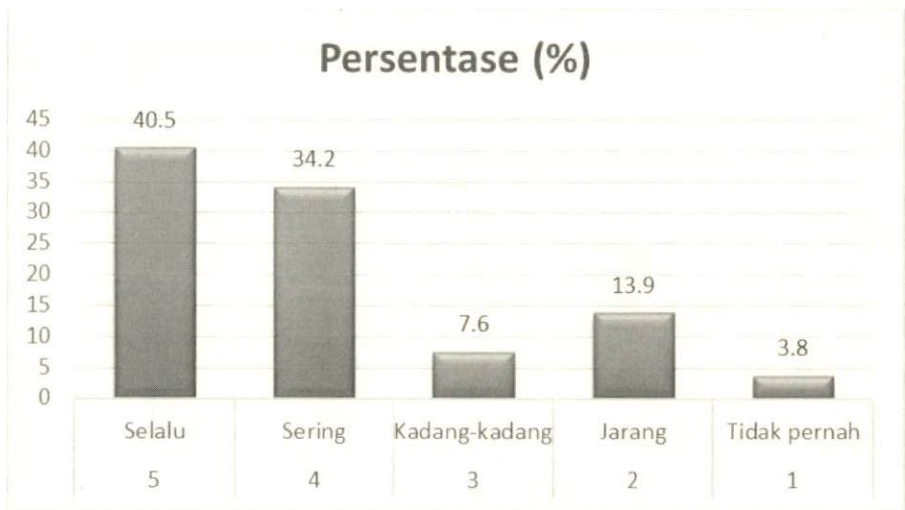


Diagram 8. Persentase dalam Kontribusi Uang dalam Kegiatan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **selalu** (40.5%) disusul kemudian kadang-kadang (34.2%) sementara yang berpendapat jarang (13.9%) kadang-kadang (7.6%) dan tidak pernah (3%) memberikan kontribusi uang dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **selalu** memberikan kontribusi uang dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui bahan/material dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

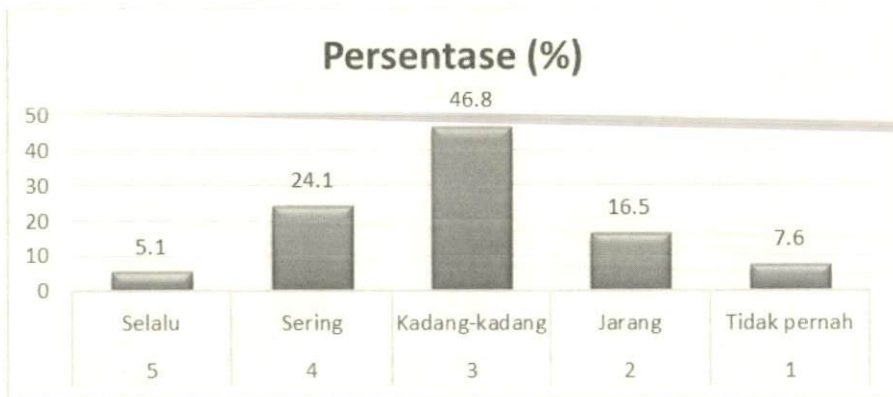


Diagram 9. Persentase dalam Kontribusi Bahan/Material dalam Kegiatan BUMDes

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (46.8%) disusul kemudian sering (24.1%) sementara yang berpendapat jarang (16.5%) tidak pernah (7.6%) dan selalu (5.1%) memberikan bahan/material dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **kadang-kadang** memberikan kontribusi dengan bahan/ material dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Dimensi *Participation in Benefit*

Dari 3 item pertanyaan pada dimensi *Participation in Benefit*, sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation in Benefit* dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Benefit*

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
9	3	0	5	46	25
10	0	2	4	35	38
11	0	3	10	27	39
Jumlah	3	5	19	108	102

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Benefit*

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	102	510	50.40	1
4	108	432	42.69	2
3	19	57	5.63	3
2	5	10	0.99	4
1	3	3	0.30	5
Jumlah	237	1012	100	

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation in Benefit* ini adalah 5 (skor tertinggi) x 3 (jumlah item pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 1185. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.012 atau 85.40%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 85.40% tersebut terletak pada daerah **selalu** (dalam batas tertinggi 81-100).

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

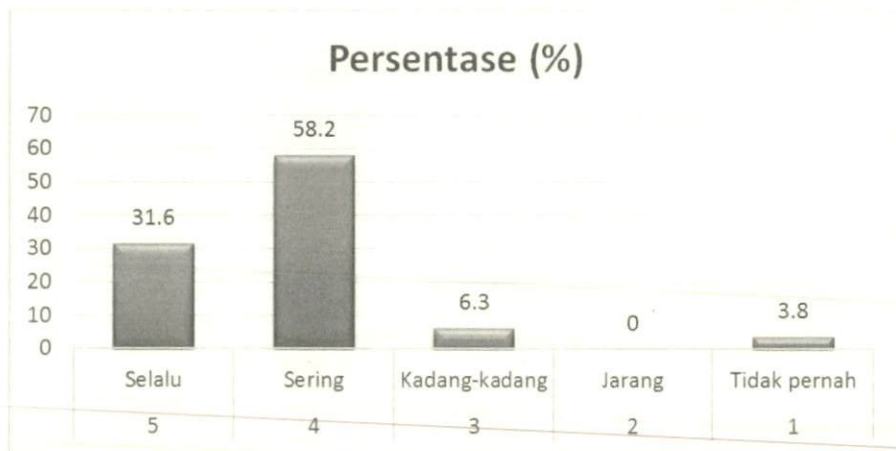


Diagram 10. Kajian Terhadap Mengikuti Kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Desa. yang akan Memberikan Tambahan Penghasilan Ekonomi Keluarga (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (58.2%) disusul kemudian selalu (31.6%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (6.3%) tidak pernah (3.8%) dan jarang (0%) mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga.

Adapun indikator keikutsertaan dalam menggunakan produk/ layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan

BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

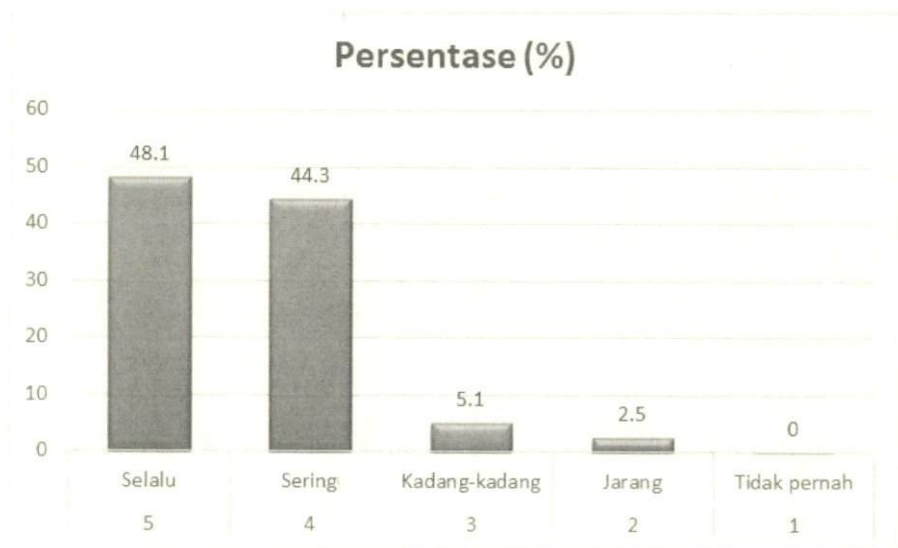


Diagram 11. Kajian terhadap Menggunakan Produk/Layanan yang Dihasilkan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **selalu** (48.1%) disusul kemudian sering (44.3%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (5.1%) jarang (2.5%) dan tidak pernah (0%) mengikuti kegiatan dalam menggunakan produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **selalu** menggunakan produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

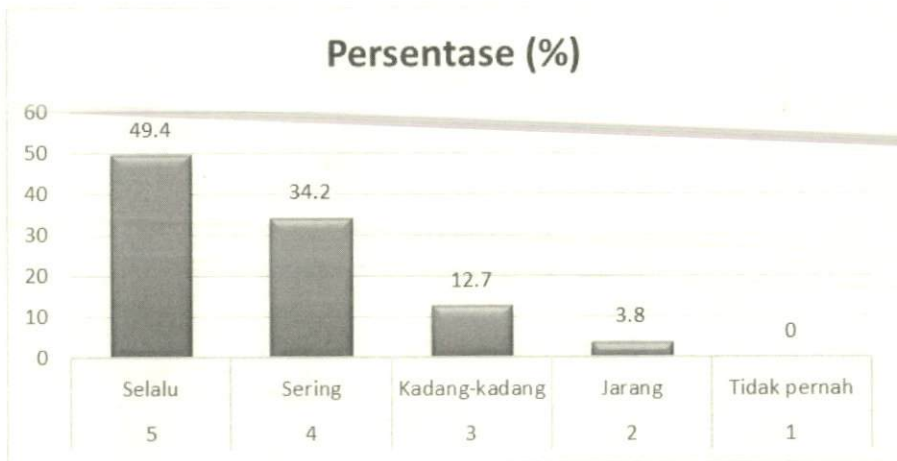


Diagram 12. Kajian Terhadap Memelihara/Merawat/Merasa Memiliki Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **selalu** (49.4%) disusul kemudian sering (34.2%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (12.7%) jarang (3.8%) dan tidak pernah (0%) mengikuti kegiatan memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **selalu** ikut serta memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes.

Dimensi *Participation in Evaluation*

Dari 2 item pertanyaan pada dimensi *Participation in Evaluation*, sebanyak 79 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation in Evaluation* dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Evaluation*

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
12	3	19	17	34	6
13	0	5	7	52	15
Jumlah	3	24	24	86	21

Diagram 13. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Evaluation*

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	21	105	18.36	2
4	86	344	60.14	1
3	24	72	12.59	3
2	24	48	8.39	4
1	3	3	0.52	5
Jumlah	158	572	100	

Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation in Evaluation* ini adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 2 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 79 \text{ (jumlah responden)} = 790$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 572 atau 72.41%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 72.41% tersebut terletak pada daerah **sering** (dalam batas tertinggi 61-80).

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-

indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

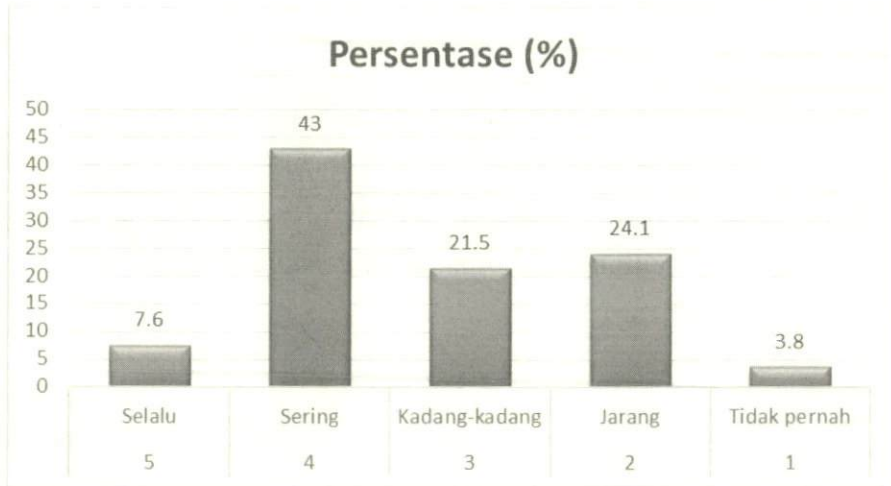


Diagram 14. Kajian Terhadap Melakukan Kritik/Koreksi terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79).

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (43%) disusul jarang (24.1%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (21.5%) selalu (7.6%) dan tidak pernah (3.8%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan dalam memberikan saran terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

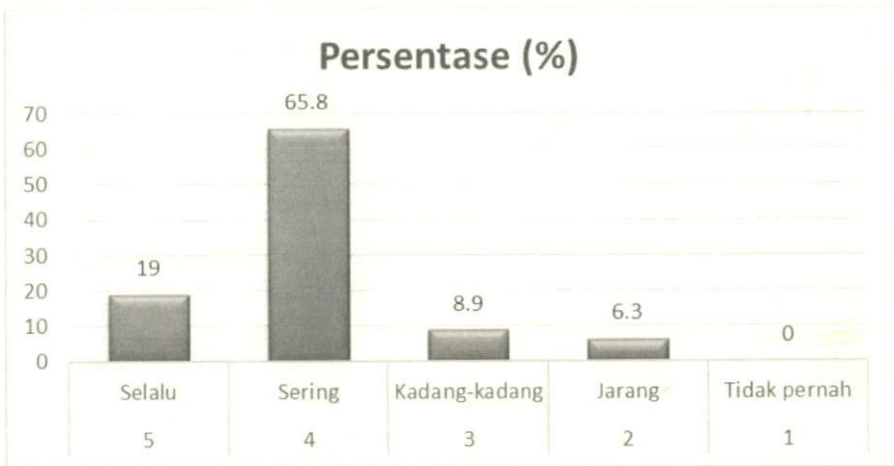


Diagram 15. Kajian Terhadap Memberikan Saran terhadap Jalannya Kegiatan Pengembangan BUMDes (n=79).

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (65%) disusul selalu (19%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (8.9%) jarang (7.6%) dan tidak pernah (0%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** memberikan saran terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan

Dari 9 item pertanyaan pada dimensi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan; perumahan; kesehatan dan perlindungan, jawaban dari 79 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
1	0	8	18	22	31
2	0	8	16	38	17
3	0	7	19	28	25
4	1	5	24	28	21
5	0	11	22	36	10
6	0	4	17	27	31
7	0	4	14	39	22
8	0	5	14	41	19
9	0	2	18	39	20
Jumlah	1	54	162	298	196

Tabel 9. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	196	980	35.42	2
4	298	1192	43.08	1
3	162	486	17.56	3
2	54	108	3.90	4
1	1	1	0.04	5
Jumlah	711	2767	100	

Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan adalah 5 (skor tertinggi) \times 9 (jumlah item pertanyaan) \times 79 (jumlah responden) = 3555. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 2767 atau 77.83%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 77.83% tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator dari dimensi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

Adapun indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
1	0	8	18	22	31
2	0	8	16	38	17
3	0	7	19	28	25
4	1	5	24	28	21
5	0	11	22	36	10
Jumlah	1	39	99	152	104

Tabel 11. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	104	520	34.57	2
4	152	608	40.43	1
3	99	297	19.75	3
2	39	78	5.19	4
1	1	1	0.07	5
Jumlah	395	1504	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 5 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 79 \text{ (jumlah responden)} = 1975$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.504 atau 76.15%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai % tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat meningkatkan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

- a. Warga Masyarakat Mampu Membeli Sembako

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Diagram 16. Kajian Terhadap Mampu Membeli Sembako (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak berpendapat bahwa masyarakat **sangat setuju** (39.2%) disusul setuju (27.8%) sementara yang berpendapat netral (22.8%) tidak setuju (10.1%) dan sangat tidak setuju (0%) mengatakan mampu membeli sembako. Artinya sebagian besar responden berpendapat **sangat setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membeli sembako.

- b. Warga Masyarakat Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

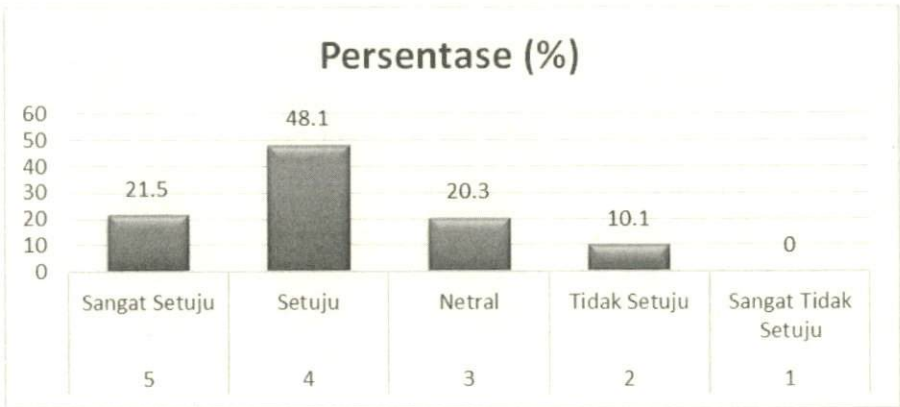


Diagram 17. Mampu Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (48.1%) disusul sangat setuju (21.5%) sementara yang berpendapat netral (20.3%) tidak setuju (10.1%) dan sangat tidak setuju (0%) dalam membangun rumah yang layak huni. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membangun rumah yang layak huni.

- c. Warga Masyarakat Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

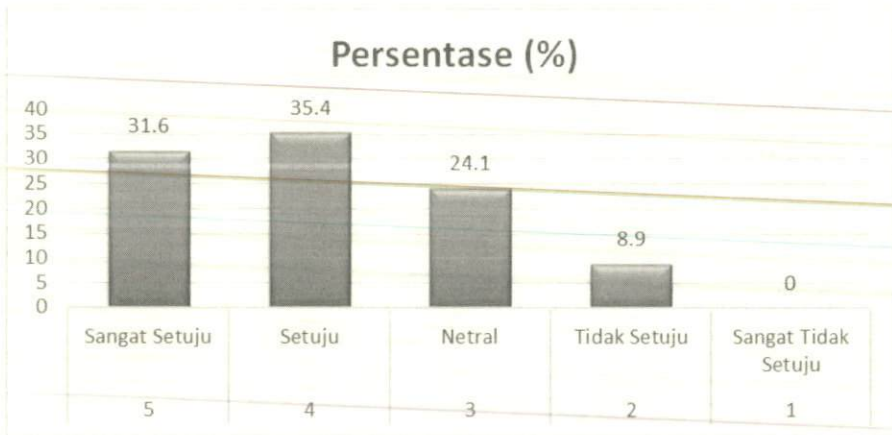


Diagram 18. Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (35.4%) disusul sangat setuju (31.6%) sementara yang berpendapat netral (24.1%) tidak setuju (8.9%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan mampu berobat ke fasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar responden

berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu berobat ke fasilitas kesehatan.

d. Warga Masyarakat Mampu Membayar Iuran BPJS

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. ditunjukkan dalam diagram berikut:

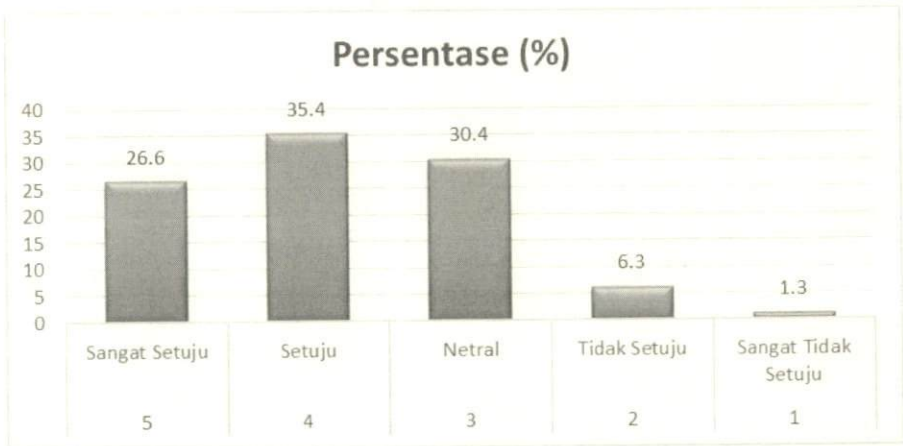


Diagram 19. Kajian Terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (35.4%) disusul netral (30.4%) sementara yang berpendapat sangat setuju (26.6%) tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (1.3%) dikatakan mampu membayar iuran BPJS. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membayar iuran BPJS.

e. Warga Masyarakat Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Permukimannya

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. ditunjukkan dalam diagram berikut:

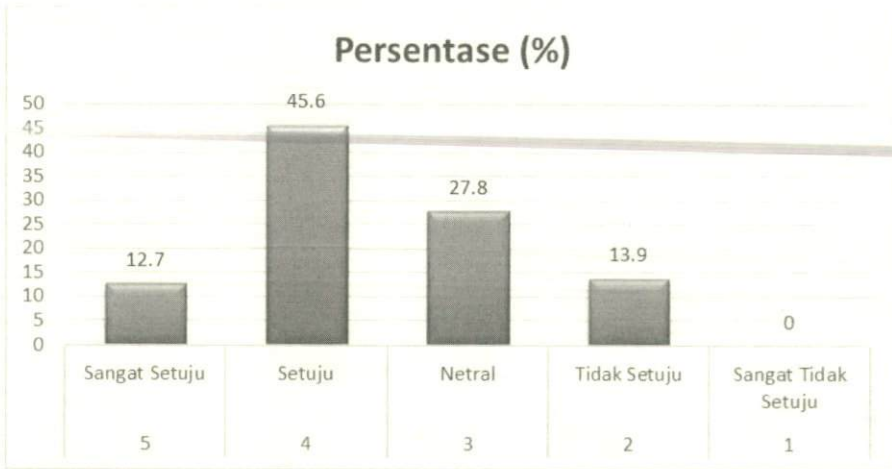


Diagram 20. Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Permukimannya (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (45.6%) disusul netral (27.8%) sementara yang berpendapat tidak setuju (13.9%) sangat setuju (12.7%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan mampu membayar iuran keamanan di lingkungan permukimannya. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membayar iuran keamanan lingkungan.

Adapun indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar, berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram 21. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
6	0	4	17	27	31
7	0	4	14	39	22
8	0	5	14	41	19
9	0	2	18	39	20
Jumlah	0	15	63	146	92

Diagram 22. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	92	460	36.42	2
4	146	584	46.24	1
3	63	189	14.96	3
2	15	30	2.38	4
1	0	0	0	5
Jumlah	316	1263	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 4 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 79 \text{ (jumlah responden)} = 1580$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.263 atau 79.94%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 79.94% tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa BUMDes dapat meratakan distribusi kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

a. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Sembako

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

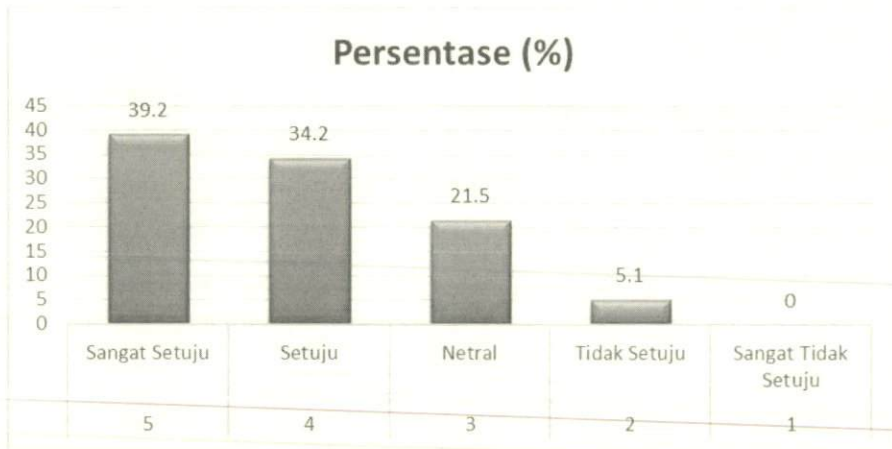


Diagram 23. Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Sembako
(n = 79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sangat setuju** (39.2%) disusul setuju (34.2%) sementara yang berpendapat netral (21.5%) tidak setuju (5.1%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan mudah mendapatkan sembako. Artinya sebagian besar responden berpendapat **sangat setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan sembako.

b. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

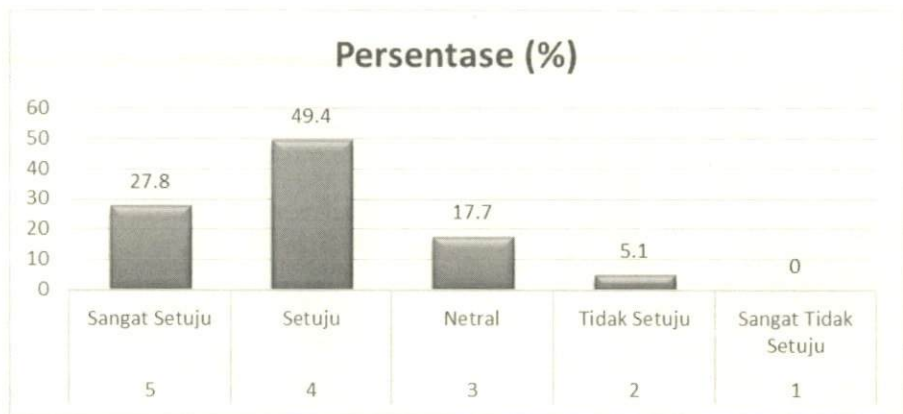


Diagram 24. Kajian Terhadap Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (49.2%) disusul sangat setuju (27.8%) sementara yang berpendapat netral (17.7%) tidak setuju (5.1%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni.

- c. Warga Masyarakat Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

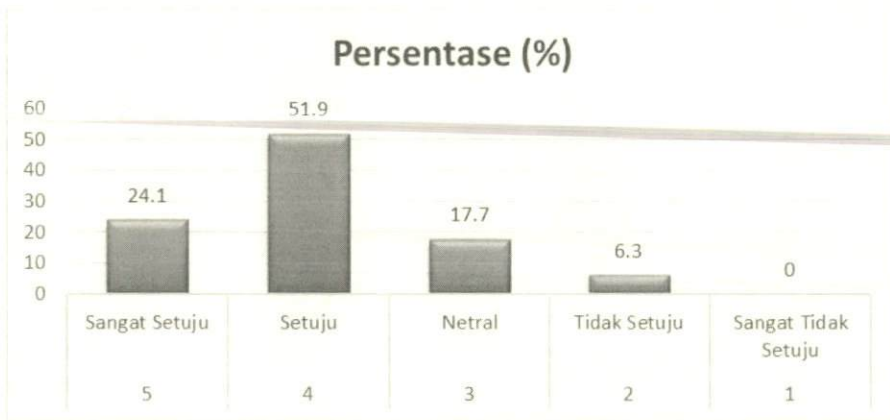


Diagram 25. Kajian Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (51.9%) disusul sangat setuju (24.1%) sementara yang berpendapat netral (17.7%) tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan memiliki akses berobat ke fasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat memiliki akses berobat ke fasilitas kesehatan.

- d. Warga Masyarakat Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. ditunjukkan dalam diagram berikut:

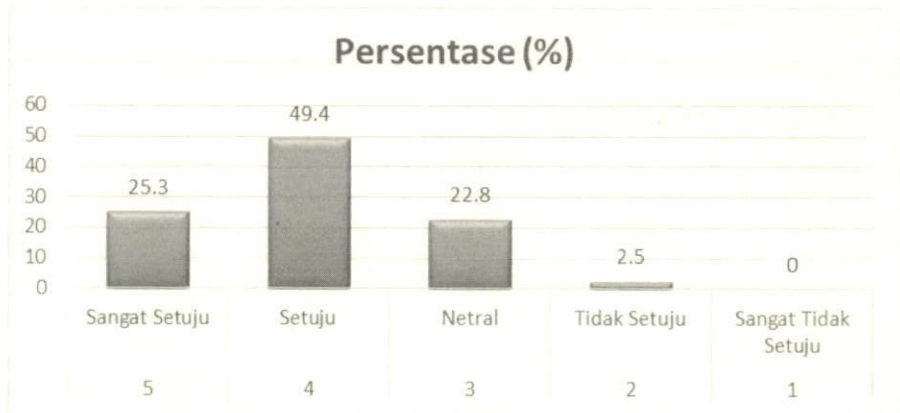


Diagram 26. Kajian Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (49.4%) disusul sangat setuju (25.3%) sementara yang berpendapat netral (22.8%) tidak setuju (2.5%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan merasa aman di lingkungan permukimannya. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat merasa aman di lingkungan permukimannya.

Dimensi Peningkatan Tingkat Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dari 5 item pertanyaan pada dimensi peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, jawaban dari 79 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
10	1	1	2	42	32
11	0	1	7	42	28
12	0	1	10	37	30
13	0	1	7	34	36
14	0	0	3	33	42
Jumlah	1	4	29	188	168

Tabel 12. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

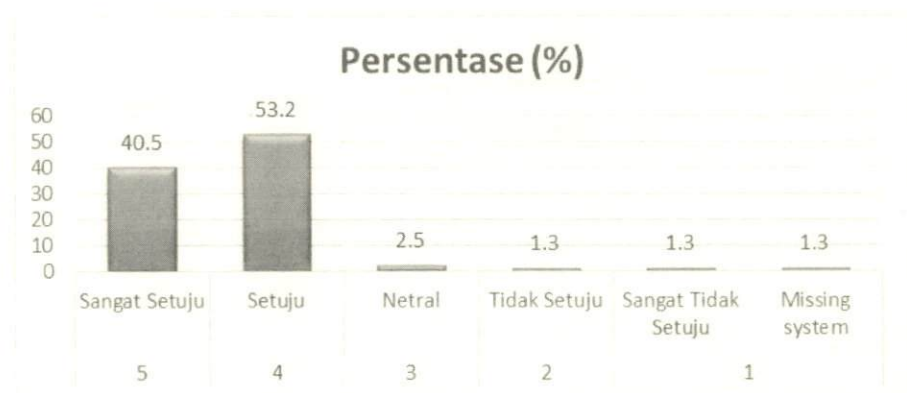
Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	168	840	49.76	1
4	188	752	44.55	2
3	29	87	5.15	3
2	4	8	0.47	4
1	1	1	0.06	5
Jumlah	390	1.688	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi kemudahan akses ini adalah 5 (skor tertinggi) x 5 (jumlah item pertanyaan) x 79 (jumlah

responden) = 1.975. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1688 atau 85.47%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 85.47% tersebut terletak pada daerah **sangat setuju**. Artinya responden berpendapat **sangat setuju** bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat merasakan peningkatan kehidupan, pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun untuk mengukur dimensi peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terdapat beberapa indikator yaitu kualitas hidup lebih baik, tingkat pendapatan menjadi lebih baik, atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan meningkat.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator dari dimensi peningkatan kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun indikator kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



**Diagram 27. Kajian terhadap Kualitas Hidup yang Lebih Baik
(n = 79)**

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (53.2%) disusul sangat setuju (40.5%) sementara yang berpendapat netral (2.5%) tidak setuju (1.3%) dan sangat tidak setuju (1.3%) dikatakan merasa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan tingkat pendapatan menjadi makin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

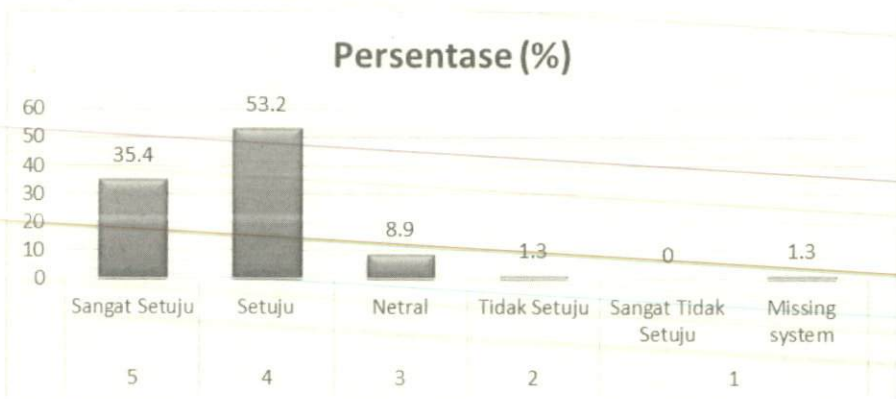


Diagram 28. Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Menjadi Makin Meningkat (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (53.2%) disusul sangat setuju (35.4%) sementara yang berpendapat netral (8.9%) tidak setuju (1.3%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan merasa mendapatkan tingkat pendapatan makin meningkat. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mendapatkan tingkat pendapatan yang makin meningkat.

Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

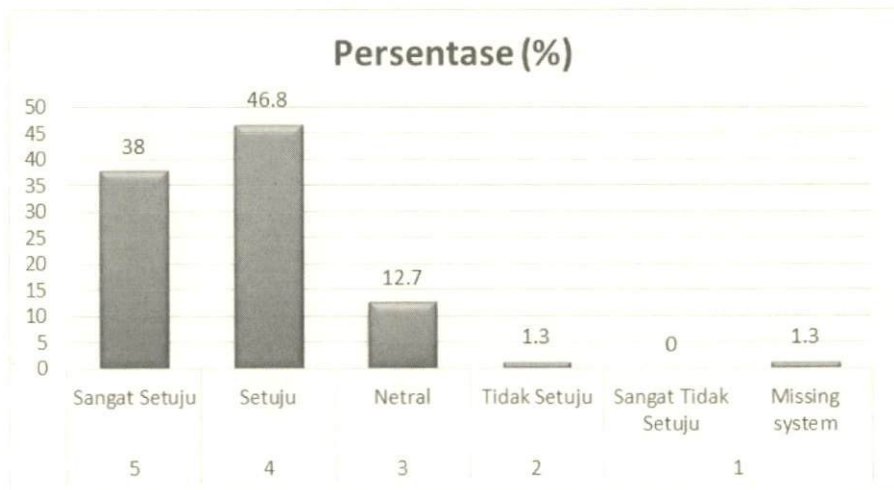


Diagram 29. Kajian terhadap Pendidikan Menjadi Lebih Baik (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (46.8%) disusul sangat setuju (38%) sementara yang berpendapat netral (12.7%) tidak setuju (1.3%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan merasa mendapatkan pendidikan menjadi lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Adapun indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
13	0	1	7	34	36
14	0	0	3	33	42
Jumlah	0	1	10	67	78

Tabel 14. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	78	390	56.52	1
4	67	268	38.84	2
3	10	30	4.35	3
2	1	2	0.29	4
1	0	0	0	5
Jumlah	156	690	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 2 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 79 \text{ (jumlah responden)} = 790$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 690 atau 87.34%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 87.34% tersebut terletak pada daerah **sangat setuju**. Artinya responden berpendapat sangat setuju bahwa BUMDes dapat meningkatkan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun untuk mengukur indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

- a. Saling Menghargai/Menghormati antar-Warga Masyarakat

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

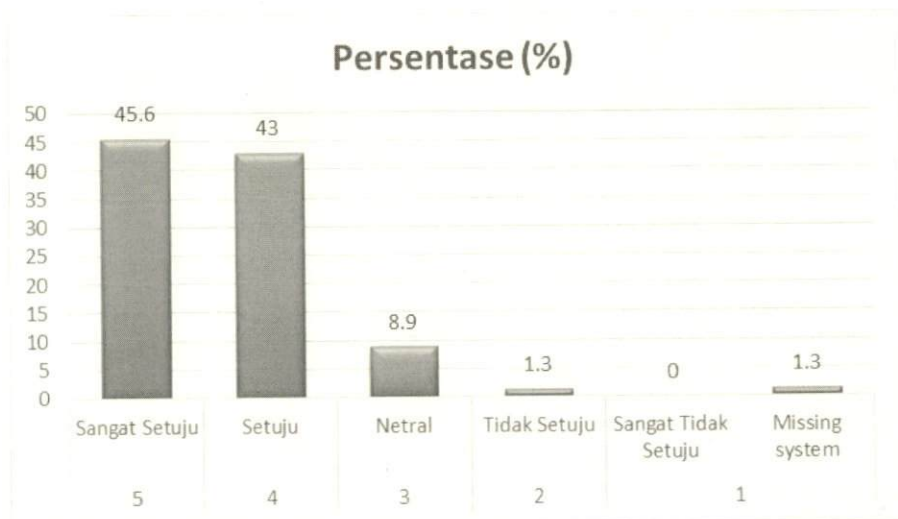


Diagram 30. Kajian Terhadap Saling Menghargai/Menghormati antar Warga Masyarakat (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sangat setuju** (45.6%) disusul setuju (43%) sementara yang berpendapat netral (8.9%) tidak setuju (1.3%) dan sangat tidak setuju (0%) saling menghargai/menghormati antarwarga masyarakat. Artinya sebagian besar responden berpendapat **sangat setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling menghargai/menghormati antar sesama.

b. Saling Bekerja Sama/Membantu antar-Warga Masyarakat

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

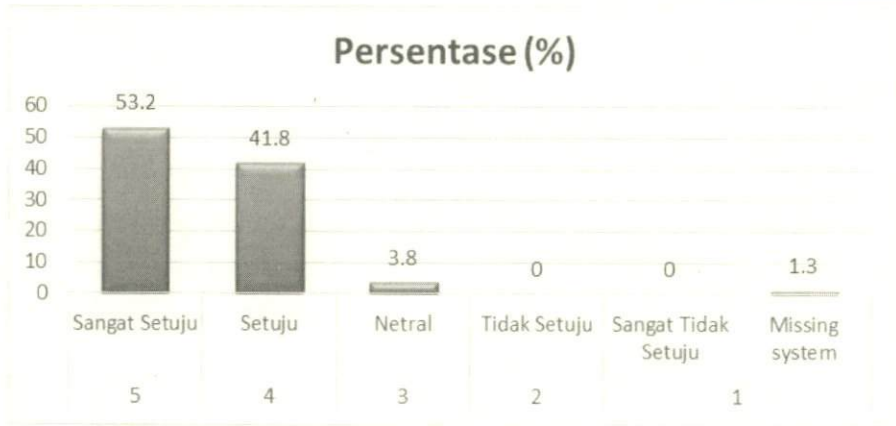


Diagram 31. Kajian Terhadap Saling Bekerja Sama/Membantu antar Warga Masyarakat (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sangat setuju** (53.2%) disusul setuju (41.8%) sementara yang berpendapat netral (3.8%) tidak setuju (0%) dan sangat tidak setuju (0%) saling bekerja sama/membantu antar-warga masyarakat. Artinya sebagian besar responden berpendapat **sangat setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling bekerja sama/membantu antarsesama.

Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Dari 6 item pertanyaan pada dimensi skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Jawaban dari 79 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan, Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
15	0	5	9	49	15
16	0	1	12	51	14
17	0	3	12	37	26
18	0	4	29	41	4
19	0	3	24	37	14
20	2	3	12	42	19
Jumlah	2	19	98	257	92

Tabel 16. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	92	460	25.25	2
4	257	1.028	56.42	1
3	98	294	16.14	3
2	19	38	2.09	4
1	2	2	0.11	5
Jumlah	468	1.822	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi kemudahan akses ini adalah 5 (skor tertinggi) x 6 (jumlah item pertanyaan) x 79 (jumlah responden) = 2.370. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban

responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.822 atau 76.88%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai % tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat merasakan skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa

Adapun untuk mengukur dimensi skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa terdapat beberapa indikator yaitu munculnya usaha bangkitan/ikutan, munculnya usaha rintisan, menurunnya tingkat pengangguran, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal dan akses terhadap teknologi informasi meningkat.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

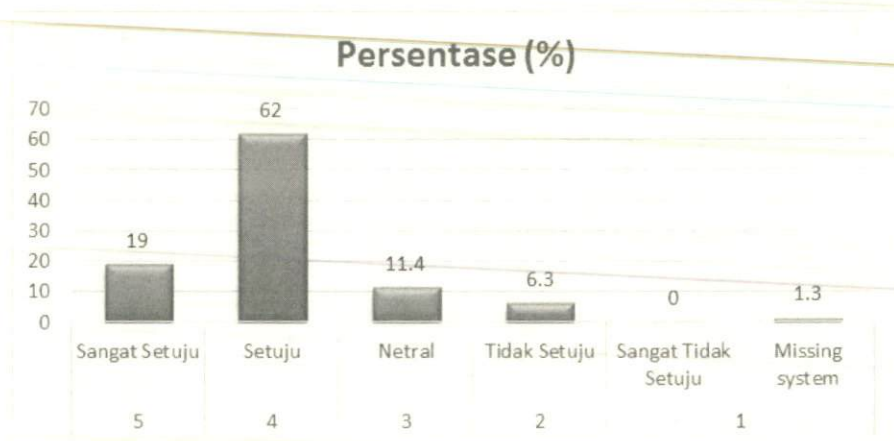


Diagram 32. Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/Ikutan (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak

menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (62%) disusul sangat setuju (19%) sementara yang berpendapat netral (11.4%) tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (0%) terhadap munculnya usaha bangkitan/ikutan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha bangkitan/ikutan.

Adapun indikator munculnya usaha rintisan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

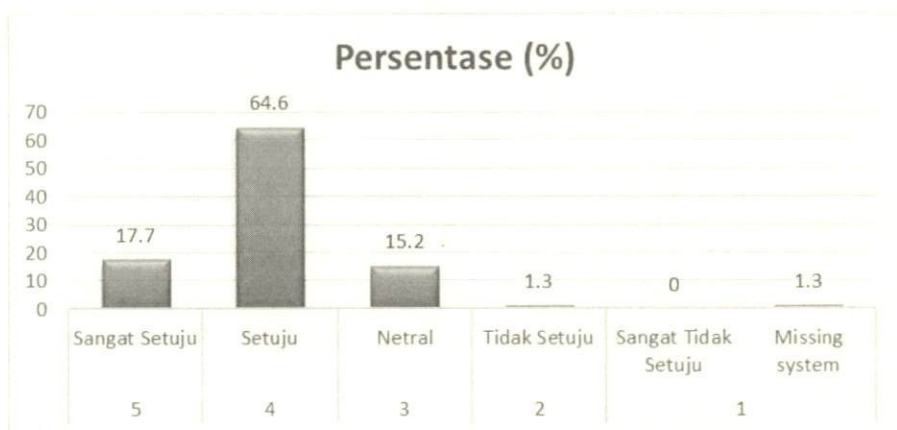


Diagram 33. Kajian terhadap Munculnya Usaha Rintisan (n=48)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (64.6%) disusul sangat setuju (17.7%) sementara yang berpendapat netral (15.2%) tidak setuju (1.3%) dan sangat tidak setuju (0%) terhadap munculnya usaha rintisan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha rintisan.

Adapun indikator menurunnya tingkat pengangguran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

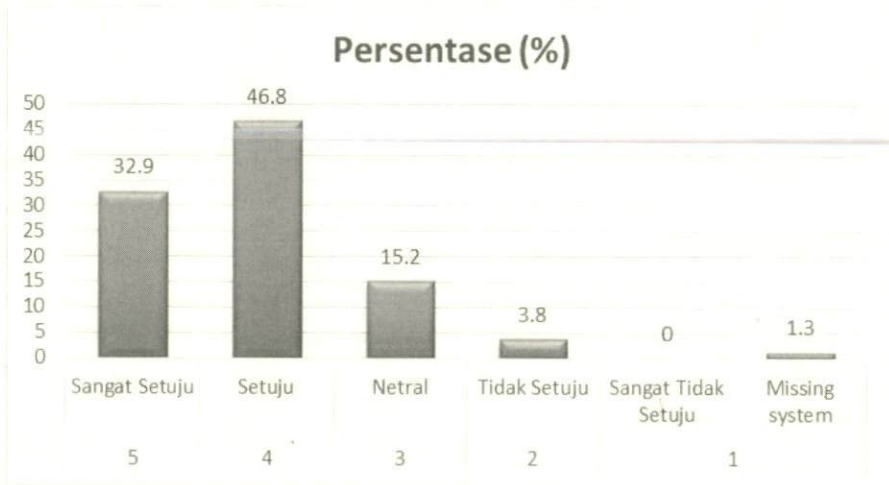


Diagram 34. Kajian terhadap Menurunnya Tingkat Pengangguran (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (46.8%) disusul sangat setuju (32.9%) sementara yang berpendapat netral (15.2%) tidak setuju (3.8%) dan sangat tidak setuju (0%) terhadap menurunnya tingkat pengangguran. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes tingkat pengangguran menurun.

Adapun indikator revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

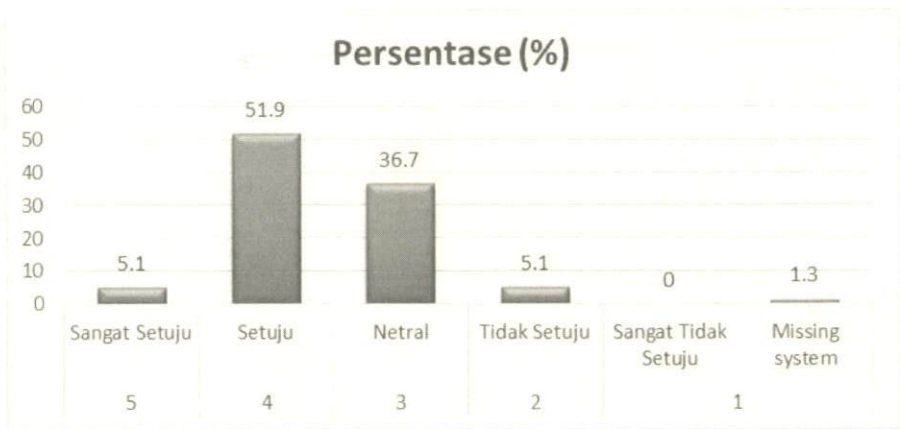


Diagram 35. Kajian terhadap Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (51.9%) disusul netral (36.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (5.1%) tidak setuju (5.1%) dan sangat tidak setuju (0%) terhadap revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes revitalisasi nilai-nilai budaya lokal meningkat.

Adapun indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
19	0	3	24	37	14
20	2	3	12	42	19
Jumlah	2	6	36	79	33

Tabel 18. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	33	165	27.36	2
4	79	316	52.4	1
3	36	108	17.91	3
2	6	12	1.99	4
1	2	2	0.33	5
Jumlah	156	603	100	

Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 2 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 79 \text{ (jumlah responden)} = 790$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 603 atau 76.33%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 76.33% tersebut terletak pada daerah setuju. Artinya responden berpendapat setuju bahwa BUMDes dapat meningkatkan akses terhadap teknologi informasi.

Adapun untuk mengukur indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

- a. Warga Masyarakat Menggunakan Komputer/Laptop

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

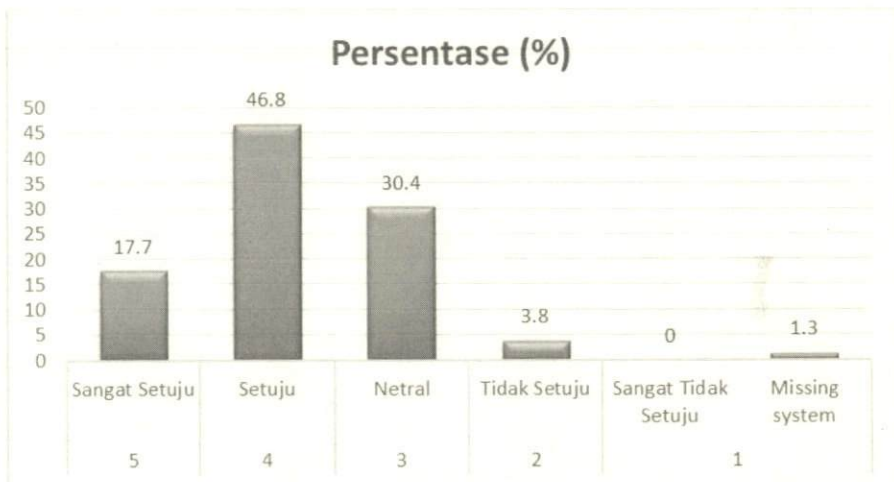


Diagram 36. Kajian Terhadap Menggunakan Komputer/Laptop (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (46.8%) disusul netral (30.4%) sementara yang berpendapat sangat setuju (17.7%) tidak setuju (3.8%) dan sangat tidak setuju (0%) menggunakan komputer/laptop. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat menggunakan komputer/laptop.

b. Warga Masyarakat Menggunakan *Handphone*

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. ditunjukkan dalam diagram berikut:

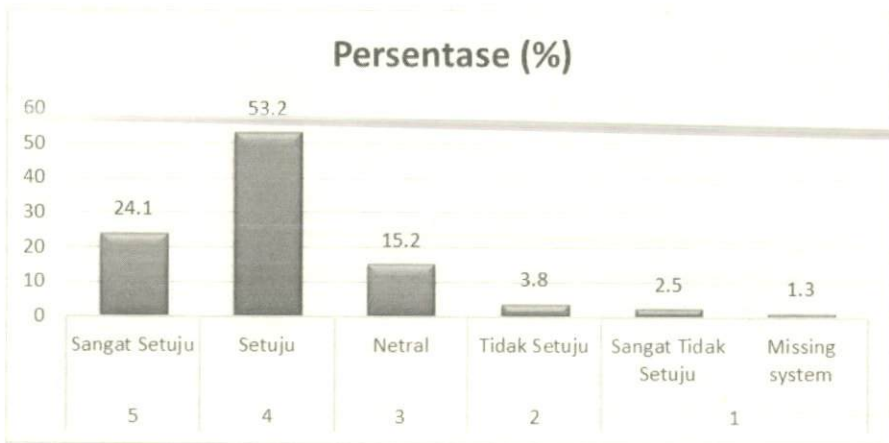


Diagram 37. Kajian Terhadap Menggunakan *Handphone* (n=79)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (53.2%) disusul sangat setuju (24.1%) sementara yang berpendapat netral (15.2%) tidak setuju (3.8%) dan sangat tidak setuju (2.5%) menggunakan *handphone*. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat menggunakan *handphone*.

4.3.2. Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden di Provinsi Jawa Tengah

4.3.2.1. Variabel Partisipasi Masyarakat

4.3.2.1.1. Dimensi *Participation In Decision Making*

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi *Participation In Decision Making*, sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation In Decision Making* dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 38. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation In Decision Making*

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
1	28	17	27	11	12
2	30	20	24	17	4
3	15	27	31	14	7
4	42	9	27	11	5
Jumlah	115	73	109	53	28

Diagram 39. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation In Decision Making*

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	28	140	14.89	4
4	53	212	22.55	2
3	109	327	34.79	1
2	73	146	15.53	3
1	115	115	12.24	5
Jumlah	378	940	100	

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation In Decision Making* ini adalah 5 (skor tertinggi) x 4 (jumlah item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 1900. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 940 atau 49.47%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 49.47% tersebut terletak pada daerah kadang-kadang (dalam batas tertinggi yaitu 41-60).

Adapun untuk mengukur dimensi *Participation In Decision Making* terdapat beberapa indikator yaitu keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes tersebut, mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes, memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat pengembangan BUMDes serta keikutsertaan masyarakat dalam proses/perumusan pembuatan keputusan.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berpendapat warga masyarakat **tidak pernah** menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes. Kondisi seperti ini sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

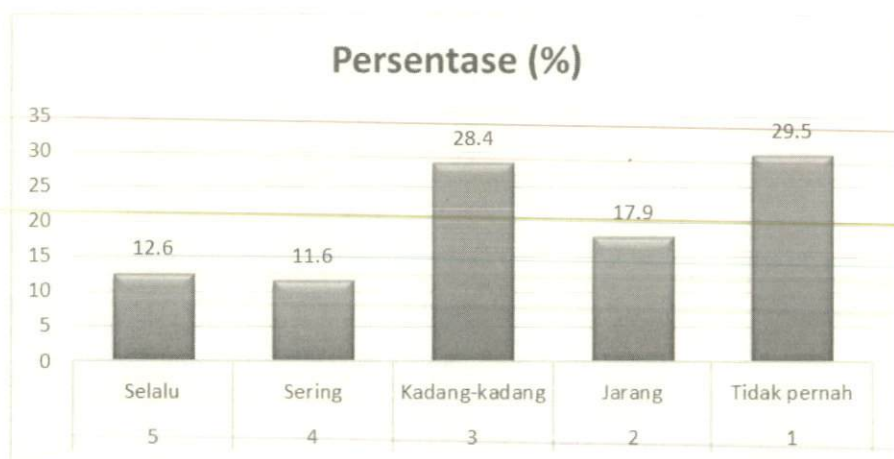


Diagram 40. Kajian terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Menghadiri Rapat Perencanaan Pengembangan BUMDes tersebut (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan **tidak pernah** (29.5%) disusul kemudian **kadang-kadang** (28.4%) sementara yang berpendapat jarang (17.9%) selalu (12.6%) dan sering (11.6%) menghadiri rapat perencanaan pengembangan

BUMDes tersebut. Artinya mayoritas responden berpendapat bahwa warga masyarakat **tidak pernah** menghadiri rapat perencanaan pengembangan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

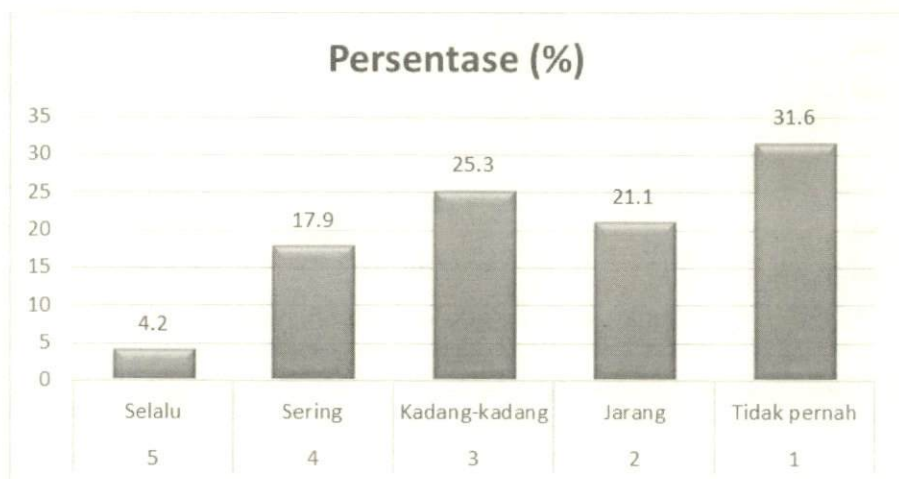


Diagram 41. Kajian Terhadap Mengemukakan Pendapat atau Saran dalam Setiap Pertemuan/Rapat BUMDes (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **tidak pernah** (31.6%) disusul kemudian **kadang-kadang** (25.3%) sementara yang berpendapat jarang (21.1%) sering (17.9%) dan selalu (4.2%) mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **tidak pernah** mengemukakan pendapat atau saran dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.

Adapun indikator memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

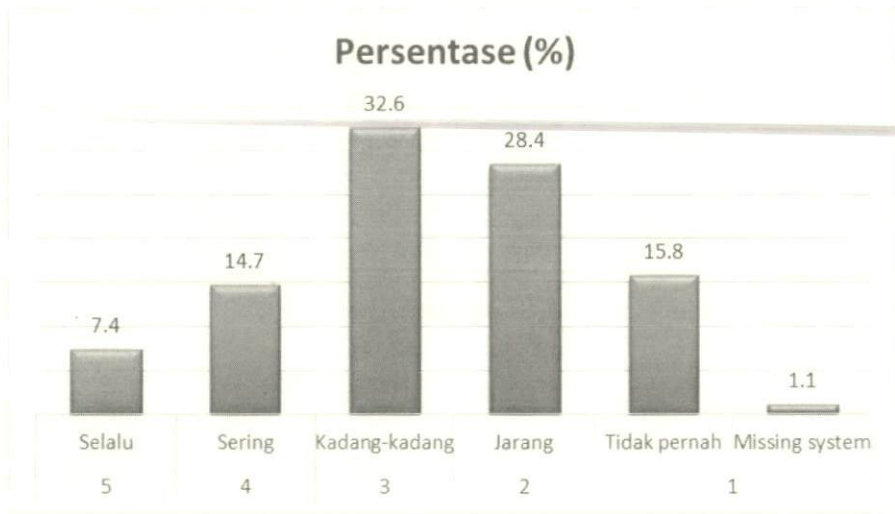


Diagram 42. Kajian Terhadap Memberikan Data/Informasi dalam Setiap Pertemuan/Rapat Pengembangan BUMDes (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (32.6%) disusul kemudian **jarang** (28.4%) sementara yang berpendapat tidak pernah (15.8%) sering (14.7%) dan selalu (7.4%) memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **kadang-kadang** memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam proses/perumusan pembuatan keputusan dalam setiap pertemuan/rapat BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

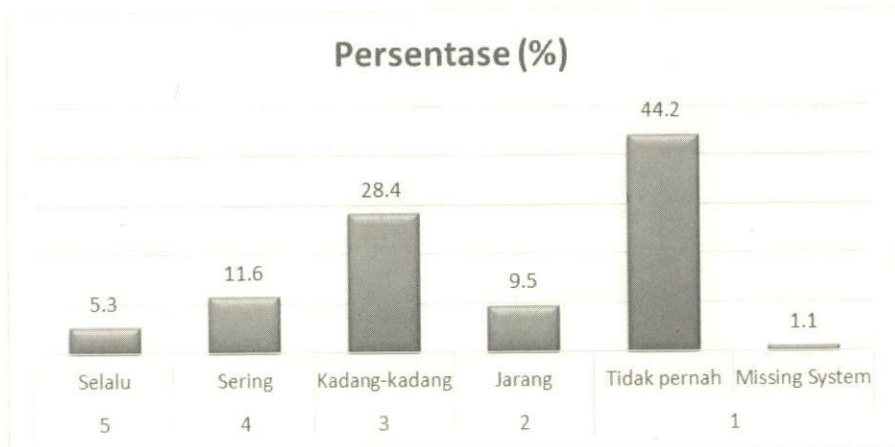


Diagram 43. Kajian Terhadap Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses/Perumusan Pembuatan Keputusan (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **tidak pernah** (44.2%) disusul kemudian **kadang-kadang** (28.4%) sementara yang berpendapat sering (11.6%) jarang (9.5%) dan selalu (5.3%) ikut serta dalam proses/pembuatan keputusan dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **tidak pernah** ikut serta dalam proses/pembuatan keputusan dalam kegiatan BUMDes tersebut.

4.3.2.1.2 . Dimensi *Participation in Implementation*

Dari 4 item pertanyaan pada dimensi *Participation in Implementation*, sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation in Implementation* dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 44. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Implementation*

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
5	20	5	33	20	16
6	37	6	19	29	3
7	19	24	28	20	3
8	49	12	24	7	2
Jumlah	125	47	104	76	24

Diagram 45. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Implementation*

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	24	120	12.6	4
4	76	304	31.8	2
3	104	312	32.7	1
2	47	94	9.8	5
1	125	125	13.1	3
Jumlah	376	955	100	

Diagram tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation in Implementation* ini adalah 5 (skor tertinggi) x 4 (jumlah item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 1900. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 955 atau 50.3%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 50.3% tersebut terletak pada daerah *kadang-kadang* (dalam batas tertinggi 41-60). Artinya responden berpendapat bahwa

kadang-kadang warga masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan BUMDes.

Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi tenaga sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:



Diagram 46. Kajian Terhadap Kontribusi dengan Tenaga (n=95)

Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (34.7%) disusul kemudian **sering** (21.1%) dengan persentase yang sama bagi responden yang menjawab tidak pernah (21.1%) sementara yang berpendapat selalu (16.8%) dan jarang (5.3%) memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **kadang-kadang** memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

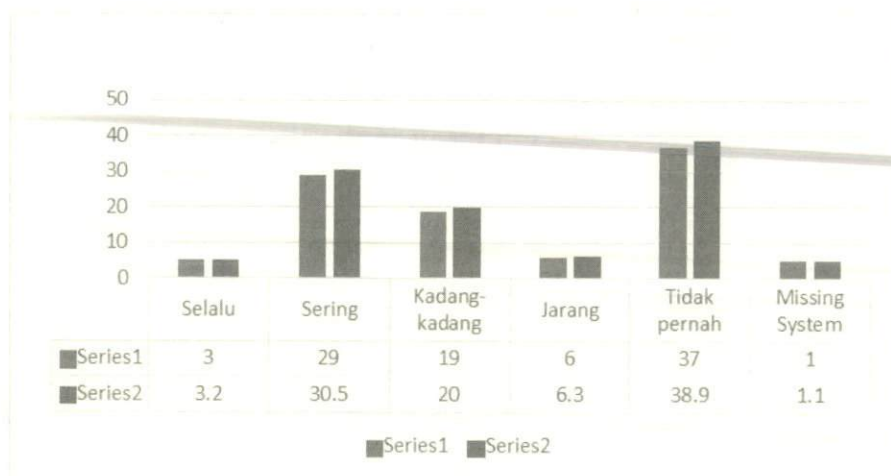
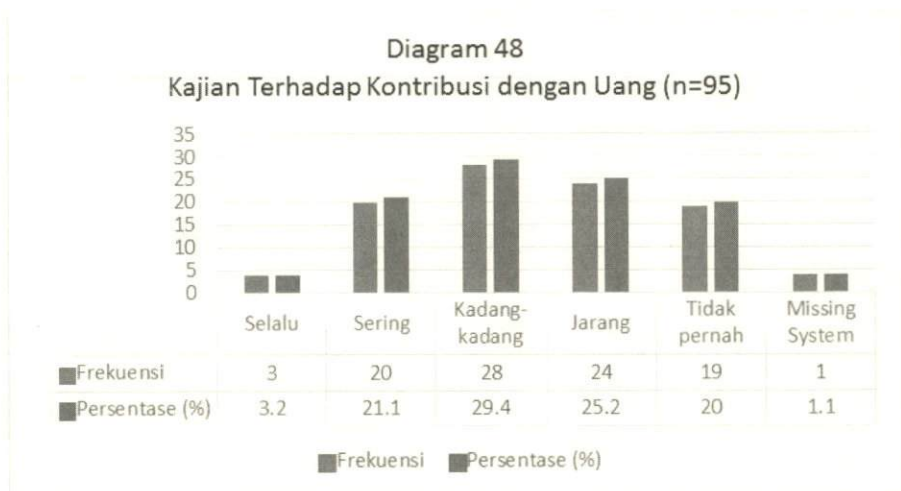


Diagram 47. Kajian Terhadap Kontribusi Ide/Pemikiran (n=95)

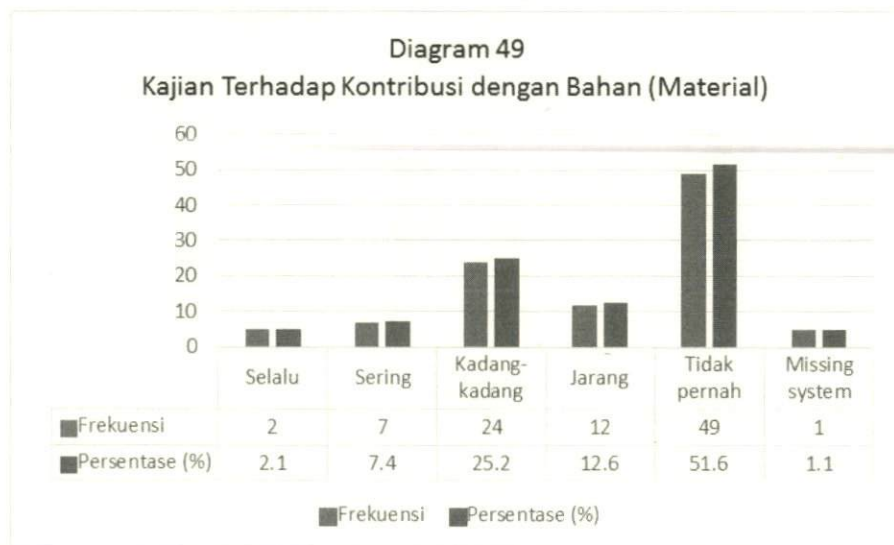
Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **tidak pernah** (38.9%) disusul kemudian **sering** (30.5%) sementara yang berpendapat kadang-kadang (20%) jarang (6.3%) dan selalu (3.2%) memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering atau juga kadang-kadang memberikan kontribusi ide/pemikiran dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui uang dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (29.4%) disusul kemudian **jarang** (25.2%) sementara yang berpendapat sering (21.1%) tidak pernah (20%) dan selalu (3.2%) memberikan kontribusi uang dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering atau juga kadang-kadang memberikan kontribusi uang dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Adapun Indikator keikutsertaan dalam berkontribusi melalui bahan/material dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **tidak pernah** (51.6%) disusul kemudian kadang-kadang (25.2%) sementara yang berpendapat jarang (12.6%) sering (7.4%) dan selalu (2.1%) memberikan bahan/material dalam kegiatan BUMDes tersebut. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **tidak pernah** memberikan kontribusi tenaga dalam kegiatan BUMDes tersebut.

Dimensi *Participation in Benefit*

Dari 3 item pertanyaan pada dimensi *Participation in Benefit*, sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation in Benefit* dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Benefit*

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
9	23	12	13	31	14
10	2	20	31	26	14
11	5	4	31	29	24
Jumlah	30	36	75	86	52

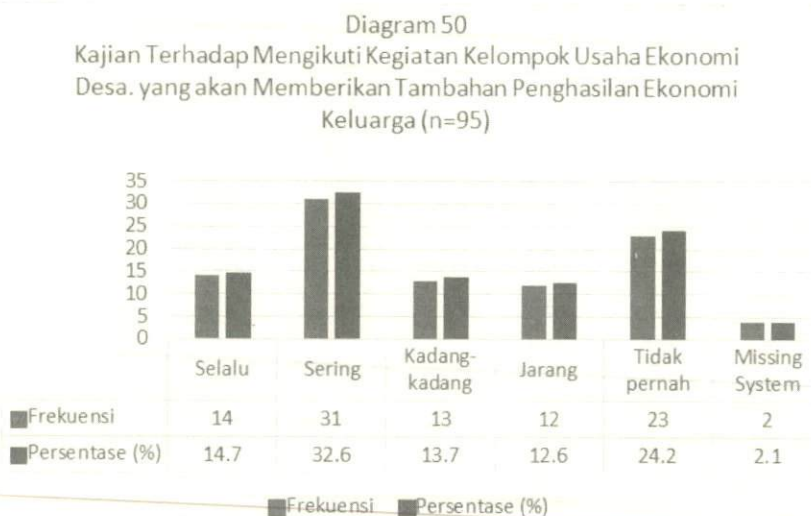
Tabel 20. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Benefit*

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	52	260	27.9	2
4	86	344	36.9	1
3	75	225	24.2	3
2	36	72	7.7	4
1	30	30	3.2	5
Jumlah	279	931	100	

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation in Benefit* ini adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 3 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 95 \text{ (jumlah responden)} = 1425$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 931 atau 65.3%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 65.3% tersebut terletak pada daerah **sering** (dalam batas tertinggi 61-80).

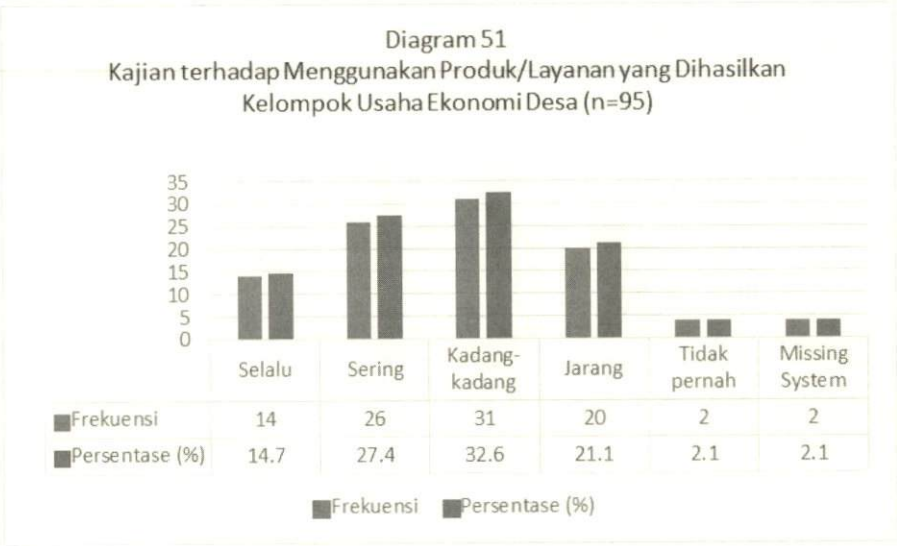
Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator

hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga.



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **sering** (32.6%) disusul kemudian **tidak pernah** (24.2%) sementara yang berpendapat selalu (14.7%) kadang-kadang (13.7%) dan jarang (12.6%) mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih **sering** mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga.

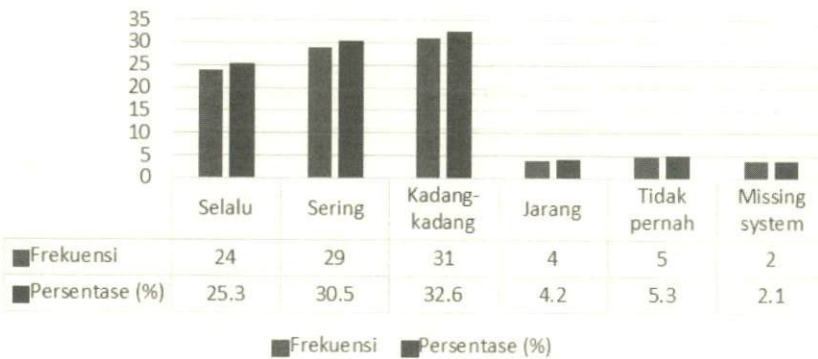
Adapun indikator keikutsertaan dalam menggunakan produk/ layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (32.6%) disusul kemudian **sering** (27.4%) sementara yang berpendapat jarang (21.1%) selalu (14.7%) dan tidak pernah (2.1%) mengikuti kegiatan dalam menggunakan produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **kadang-kadang** menggunakan produk/layanan yang dihasilkan kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram 52
Kajian Terhadap Memelihara/Merawat/Merasa Memiliki Fasilitas
Kelompok Usaha Ekonomi Desa (n=95)



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (32.6%) disusul kemudian **sering** (30.5%) sementara yang berpendapat selalu (25.3%) tidak pernah (5.3%) dan jarang (4.2%) mengikuti kegiatan memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat **kadang-kadang** ikut serta memelihara/merawat/merasa memiliki fasilitas kelompok usaha ekonomi desa dalam kegiatan BUMDes.

Dimensi *Participation in Evaluation*

Dari 2 item pertanyaan pada dimensi *Participation in Evaluation*, sebanyak 95 responden menjawab kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai *Participation in Evaluation* dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 21. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Evaluation*

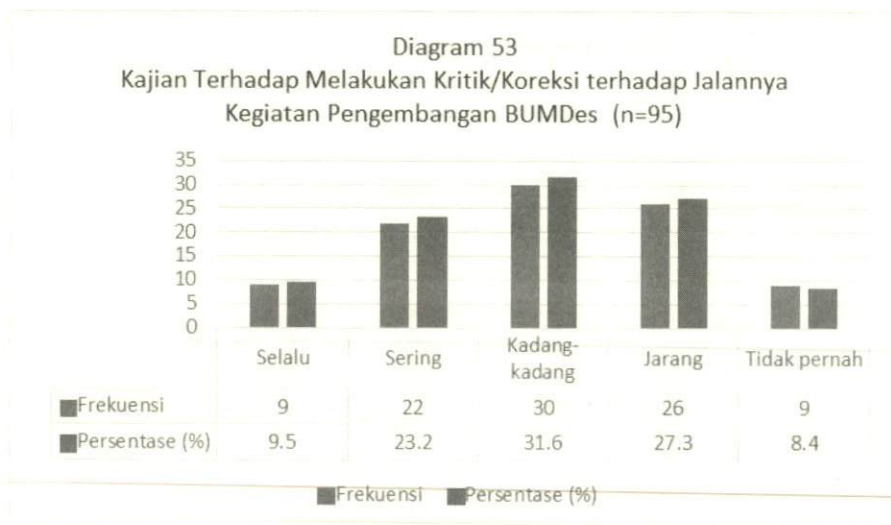
Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
12	8	26	30	22	9
13	10	28	28	23	5
Jumlah	18	54	58	45	14

Tabel 22. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi *Participation in Evaluation*

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	14	70	11.2	4
4	45	180	28.8	1
3	58	174	27.8	2
2	54	108	17.3	3
1	18	18	2.9	5
Jumlah	189	550	100	

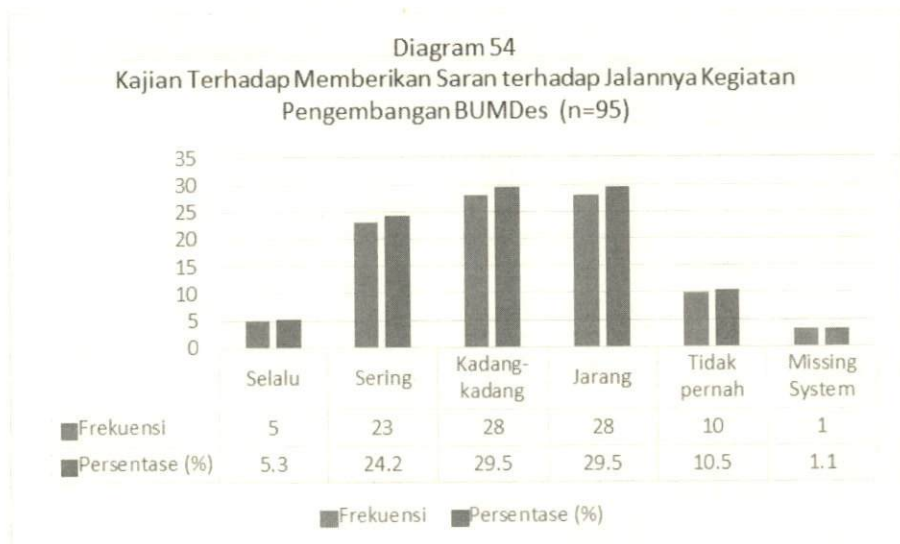
Tabel tersebut di atas menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi *Participation in Evaluation* ini adalah 5 (skor tertinggi) x 2 (jumlah item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 950. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 550 atau 57.9%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 57.9% tersebut terletak pada daerah kadang-kadang (dalam batas tertinggi 41-60).

Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (31.6%) disusul jarang (27.3%) sementara yang berpendapat sering (23.2%) selalu (9.5%) dan tidak pernah (8.4%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih sering melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Adapun indikator keikutsertaan dalam memberikan saran terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **kadang-kadang** (29.5%) dengan persentase yang sama bagi responden yang menjawab **jarang** (29.5%) sementara yang berpendapat sering (24.2%) tidak pernah (10.5%) dan selalu (5.3%) melakukan kritik/koreksi terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes. Artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa warga masyarakat lebih kadang-kadang atau juga jarang memberikan saran terhadap jalannya kegiatan pengembangan BUMDes.

Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan Perumahan Kesehatan dan Perlindungan

Dari 9 item pertanyaan pada dimensi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan; perumahan; kesehatan dan perlindungan. Jawaban dari 95 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 23. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
1	2	8	33	36	16
2	4	7	58	21	5
3	2	4	34	44	11
4	2	2	37	48	6
5	1	9	39	39	7
6	1	3	38	47	6
7	3	10	37	40	3
8	1	4	35	47	7
9	0	5	38	49	2
Jumlah	16	52	349	371	63

Tabel 24. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kemampuan dan Pemerataan Distribusi Kebutuhan Dasar yang Meliputi Makanan, Perumahan, Kesehatan dan Perlindungan

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	63	315	10.6	3
4	371	1484	50	1
3	349	1047	35.3	2
2	52	104	3.5	4
1	16	16	0.5	5
Jumlah	851	2966	100	

Diagram tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan adalah 5 (skor tertinggi) \times 9 (jumlah item pertanyaan) \times 95 (jumlah responden) = 4275. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 2966 atau 69.4%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 69.4% tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa BUMDes dapat meningkatkan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

Adapun indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Tabel 25. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
1	2	8	33	36	16
2	4	7	58	21	5
3	2	4	34	44	11
4	2	2	37	48	6
5	1	9	39	39	7
Jumlah	11	30	201	188	45

Tabel 26. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Peningkatan Daya Beli Warga terhadap Kebutuhan Dasar

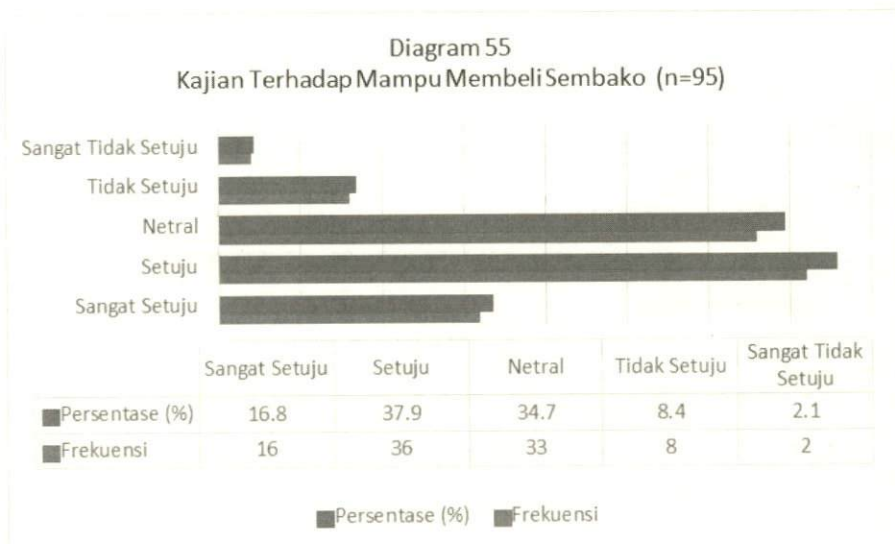
Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	45	225	13.6	3
4	188	752	45.5	1
3	201	603	36.5	2
2	30	60	3.6	4
1	11	11	0.7	5
Jumlah	475	1651	100	

Tabel tersebut di atas menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar adalah 5 (skor tertinggi) x 5 (jumlah item pertanyaan) x 95 (jumlah responden) = 2375. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1651 atau 69.5%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 69.5% tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa BUMDes dapat meningkatkan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator peningkatan daya beli warga terhadap kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

a. Warga Masyarakat Mampu Membeli Sembako

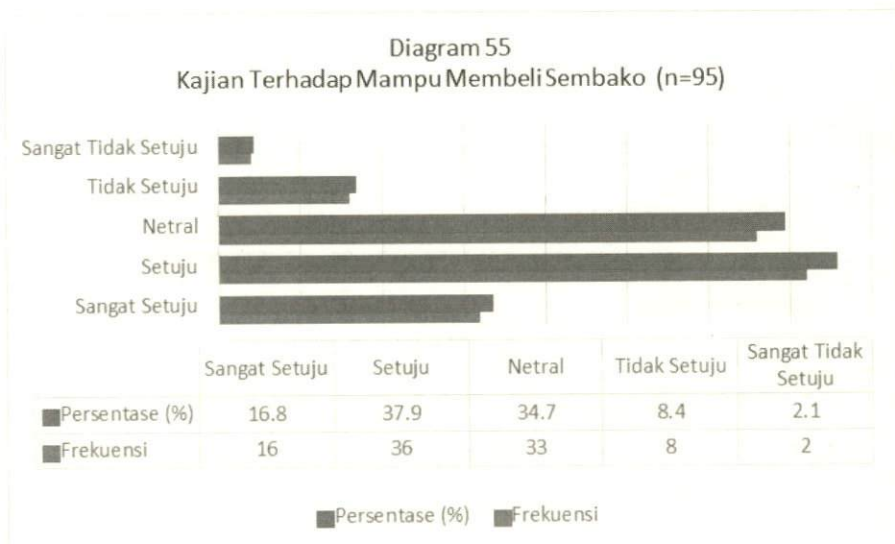
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak berpendapat bahwa masyarakat **setuju** (37.9%) disusul netral (34.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (16.8%) tidak setuju (8.4%) dan sangat tidak setuju (2.1%) mengatakan mampu membeli sembako. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membeli sembako.

a. Warga Masyarakat Mampu Membeli Sembako

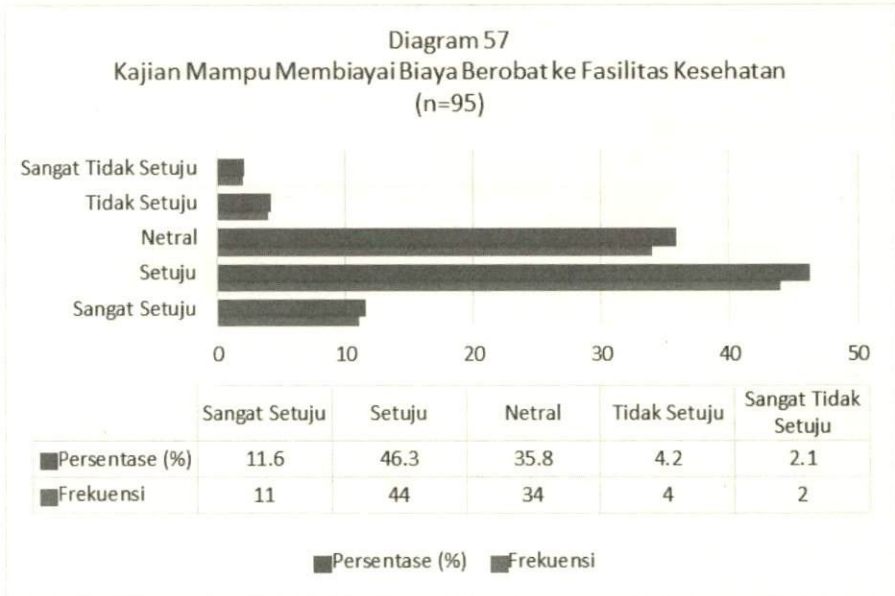
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak berpendapat bahwa masyarakat **setuju** (37.9%) disusul netral (34.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (16.8%) tidak setuju (8.4%) dan sangat tidak setuju (2.1%) mengatakan mampu membeli sembako. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membeli sembako.

- c. Warga Masyarakat Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan

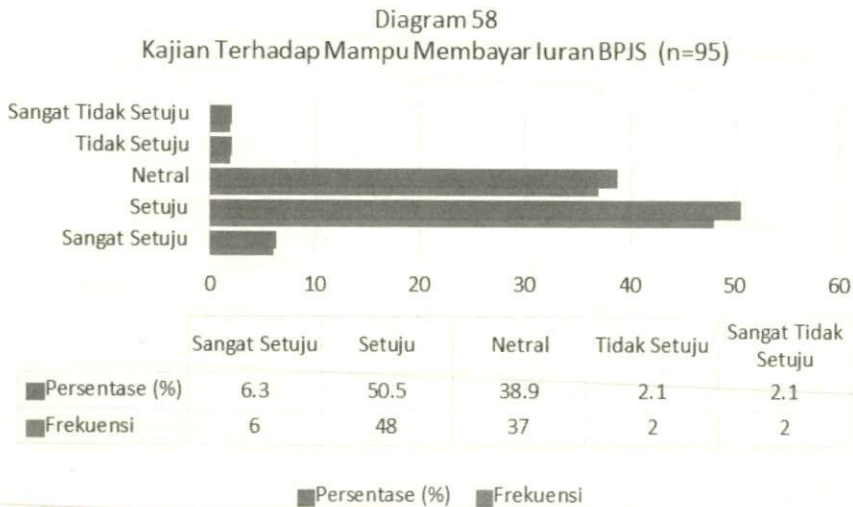
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (46.3%) disusul netral (35.8%) sementara yang berpendapat sangat setuju (11.6%) tidak setuju (4.2%) dan sangat tidak setuju (2.1%) dikatakan mampu berobat ke fasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu berobat ke fasilitas kesehatan.

d. Warga Masyarakat Mampu Membayar Iuran BPJS

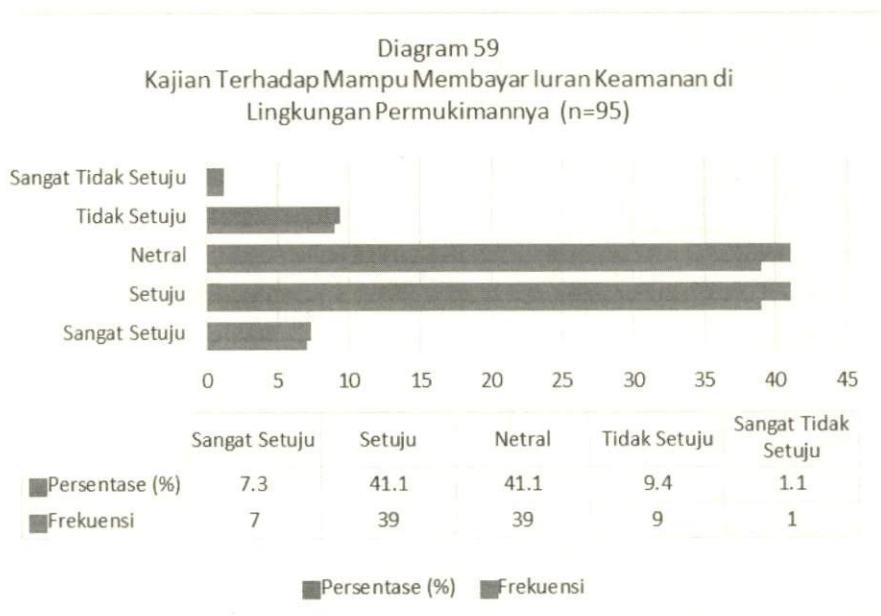
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (50.5%) disusul netral (38.9%) sementara yang berpendapat sangat setuju (6.3%) tidak setuju (2.1%) dengan persentase yang sama bagi responden yang menjawab sangat tidak setuju (2.1%) dikatakan mampu membayar iuran BPJS. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membayar iuran BPJS.

- e. Warga Masyarakat Mampu Membayar Iuran Keamanan di Lingkungan Permukimannya

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (41.1%) dengan *persentase* yang sama bagi responden yang menjawab **netral** (41.1%) sementara yang berpendapat tidak setuju (9.4%) sangat setuju (7.3%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan mampu membayar iuran keamanan di lingkungan permukimannya. Artinya sebagian besar responden berpendapat lebih **setuju atau juga netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mampu membayar iuran keamanan lingkungan.

Adapun indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Tabel 27. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
6	1	3	38	47	6
7	3	10	37	40	3
8	1	4	35	47	7
9	0	5	38	49	2
Jumlah	5	22	148	183	18

Tabel 28. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Pemerataan Distribusi terhadap Kebutuhan Dasar

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	18	90	6.8	3
4	183	732	55.7	1
3	148	444	33.8	2
2	22	44	3.3	4
1	5	5	0.4	5
Jumlah	376	1315	100	

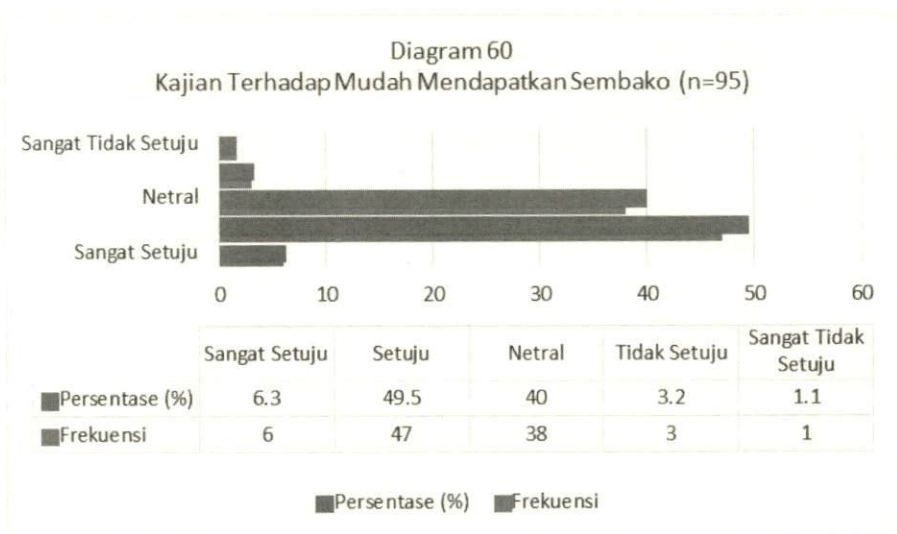
Diagram 4.92 tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 4 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 95 \text{ (jumlah responden)} = 1900$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1315 atau 69.2%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 69.2% tersebut terletak pada daerah **setuju**.

Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa BUMDes dapat meratakan distribusi kebutuhan dasar.

Adapun untuk mengukur indikator pemerataan distribusi terhadap kebutuhan dasar dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

- a. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Sembako

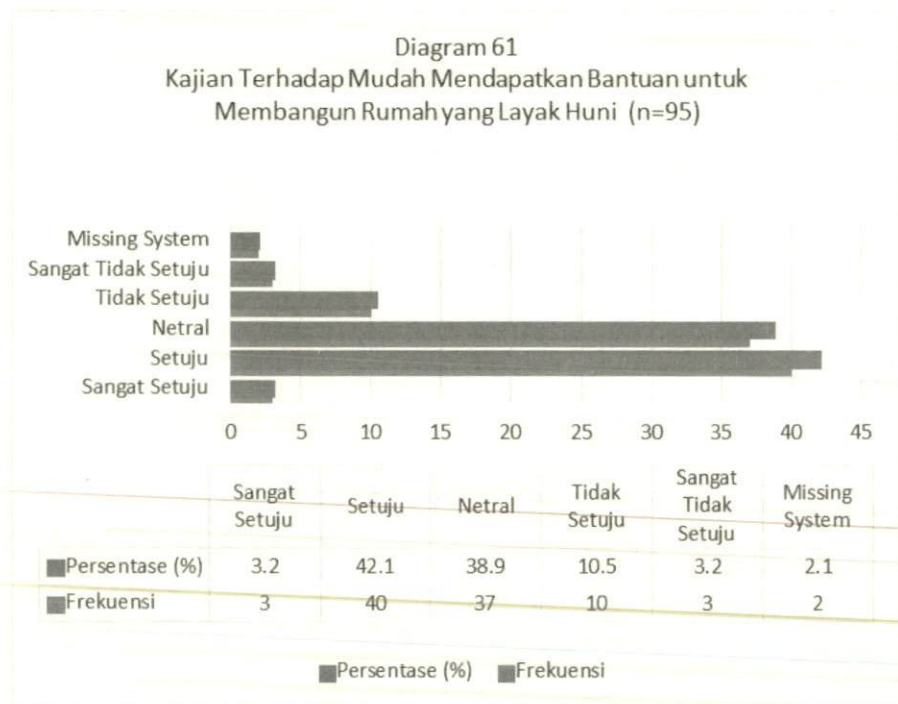
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (49.5%) disusul netral (40%) sementara yang berpendapat sangat setuju (6.3%) tidak setuju (3.2%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan mudah mendapatkan sembako. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan sembako.

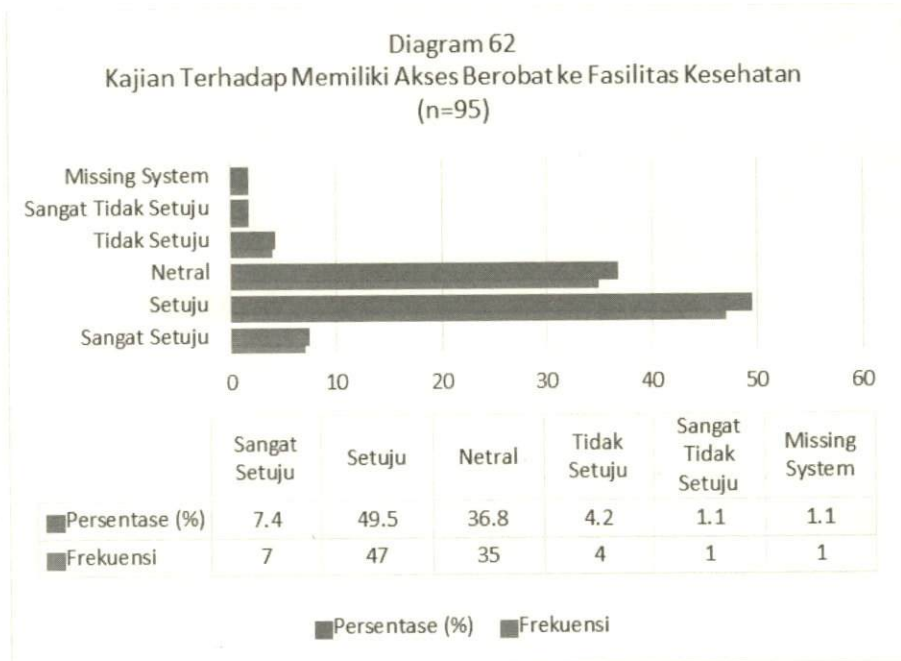
- b. Warga Masyarakat Mudah Mendapatkan Bantuan untuk Membangun Rumah yang Layak Huni

Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



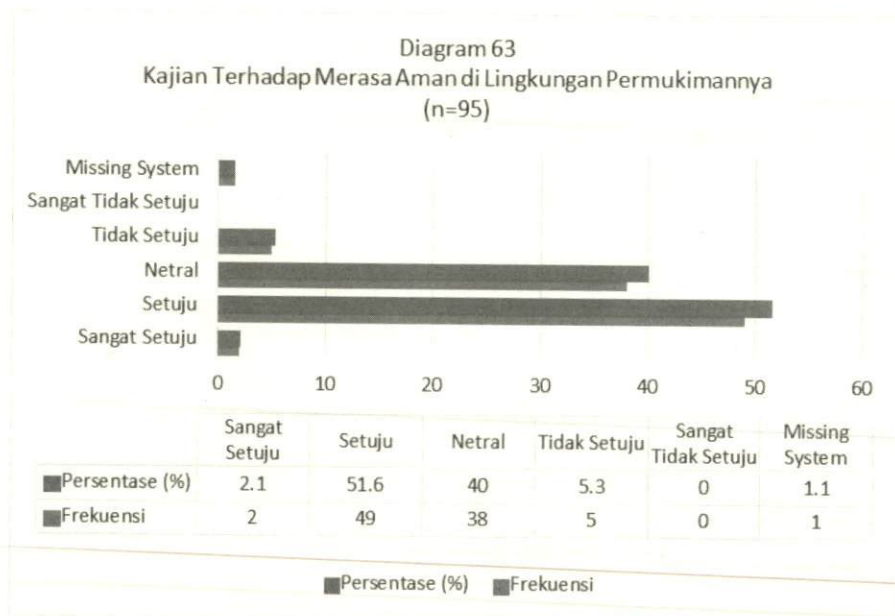
Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (42.1%) disusul netral (38.9%) sementara yang berpendapat tidak setuju (10.5%) sangat setuju (3.2%) dengan persentase yang sama responden yang menjawab sangat tidak setuju (3.2%) dikatakan mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni.

- c. Warga Masyarakat Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan
- Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (49.5%) disusul netral (36.8%) sementara yang berpendapat sangat setuju (7.4%) tidak setuju (4.2%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan memiliki akses berobat ke fasilitas kesehatan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mudah mendapatkan bantuan untuk membangun rumah yang layak huni.

- d. Warga Masyarakat Merasa Aman di Lingkungan Permukimannya
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (51.6%) disusul netral (40%) sementara yang berpendapat tidak setuju (5.3%) sangat setuju (2.1%) dan sangat tidak setuju (0%) dikatakan merasa aman di lingkungan permukimannya. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat merasa aman di lingkungan permukimannya.

Dimensi Peningkatan Tingkat Kehidupan. Tingkat Pendapatan. Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dari 5 item pertanyaan pada dimensi peningkatan tingkat kehidupan. tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, jawaban dari 95

responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 29. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
10	1	5	37	41	10
11	3	8	37	32	14
12	4	2	49	30	9
13	2	5	37	37	12
14	1	5	34	44	9
Jumlah	11	25	194	184	54

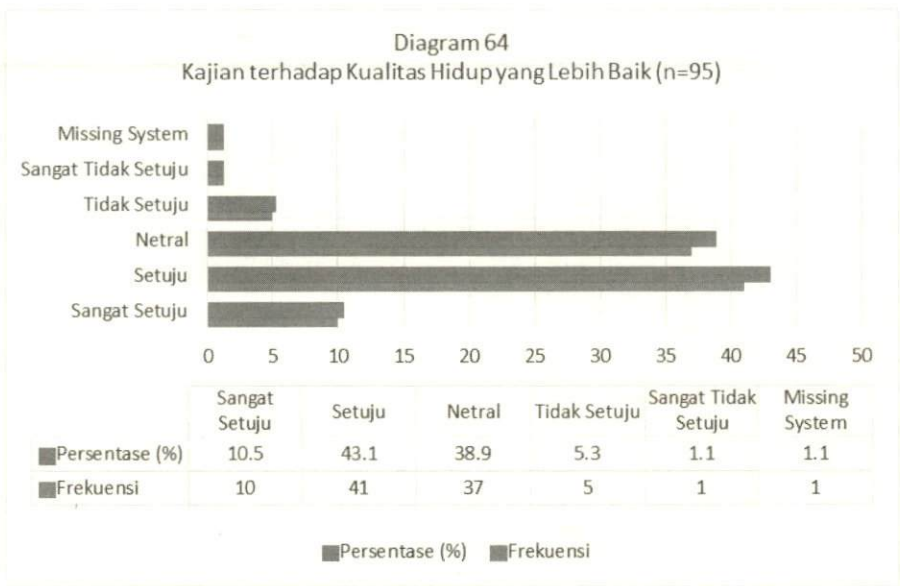
Tabel 30. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Dimensi Peningkatan Kehidupan, Tingkat Pendapatan, Pendidikan yang Lebih Baik dan Peningkatan Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	54	270	16.4	3
4	184	736	44.6	1
3	194	582	35.3	2
2	25	50	3	4
1	11	11	0.7	5
Jumlah	468	1649	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi kemudahan akses ini adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 5 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 95 \text{ (jumlah responden)} = 2.375$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 1.649 atau 69.4%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 69.4% tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat merasakan peningkatan kehidupan, pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun untuk mengukur dimensi peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terdapat beberapa indikator yaitu kualitas hidup lebih baik, tingkat pendapatan menjadi lebih baik, atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan meningkat.

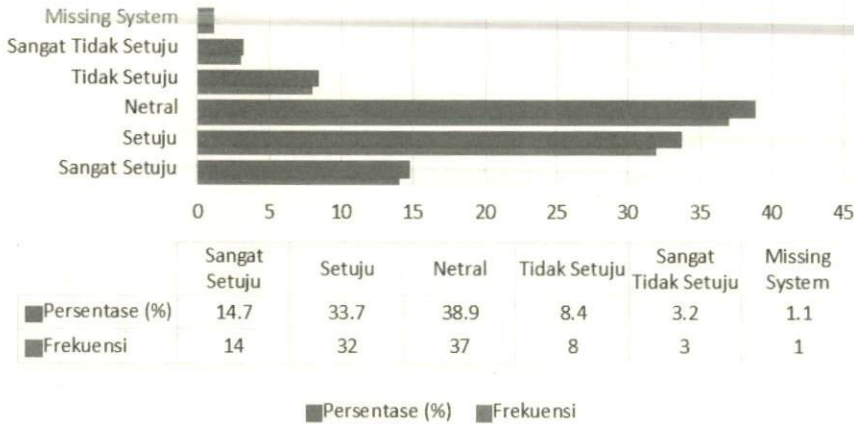
Tabel tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator dari dimensi peningkatan kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun indikator kualitas hidup yang lebih baik, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (43.1%) disusul netral (38.9%) sementara yang berpendapat sangat setuju (10.5%) tidak setuju (5.3%) dan sangat tidak setuju (1.1%) dikatakan merasa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

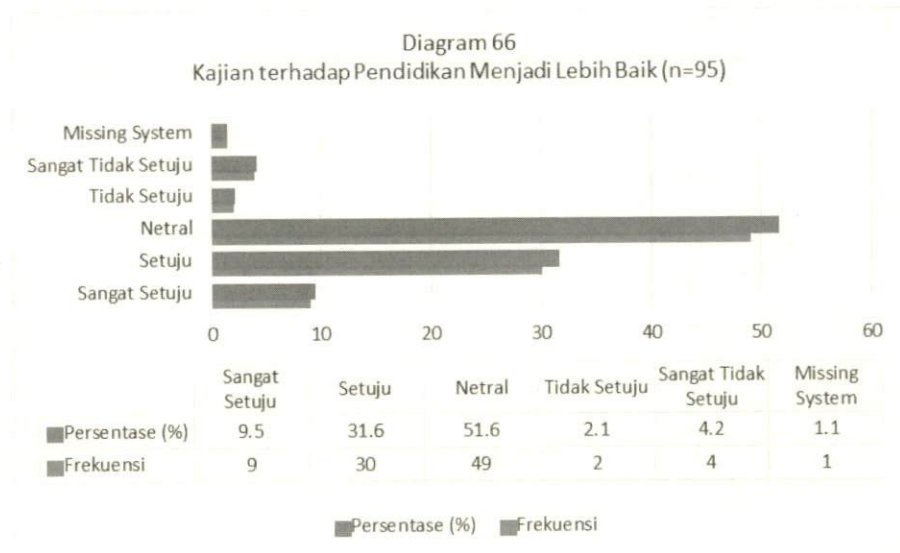
Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan tingkat pendapatan makin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram 65
Kajian terhadap Tingkat Pendapatan Makin Meningkat (n=95)



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (38.9%) disusul setuju (33.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (14.7%) tidak setuju (8.4%) dan sangat tidak setuju (3.2%) dikatakan merasa mendapatkan tingkat pendapatan makin meningkat. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mendapatkan tingkat pendapatan makin meningkat.

Adapun indikator warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (51.6%) disusul setuju (31.6%) sementara yang berpendapat sangat setuju (9.5%) sangat tidak setuju (4.2%) dan tidak setuju (2.1%) dikatakan merasa mendapatkan pendidikan menjadi lebih baik. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Adapun indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Tabel 31. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
13	2	5	37	37	12
14	1	5	34	44	9
Jumlah	3	10	71	81	21

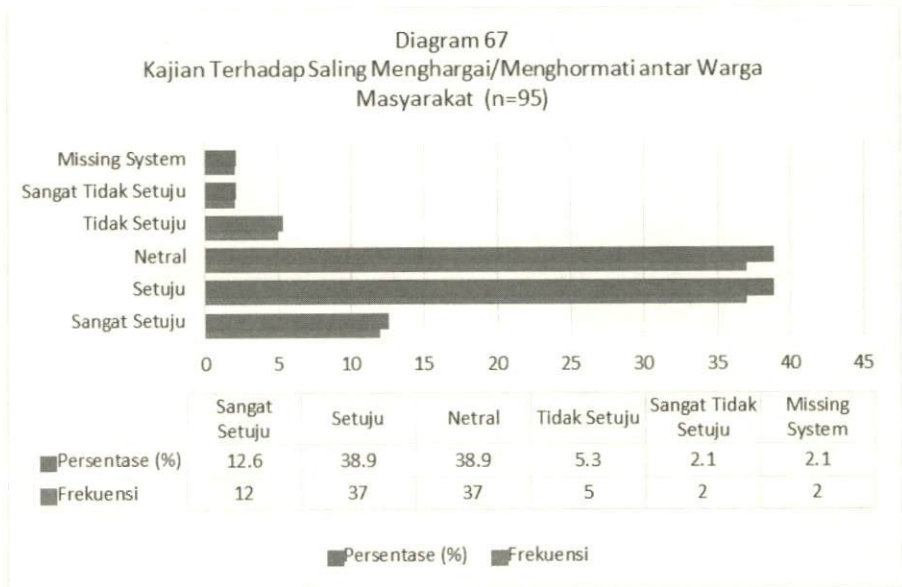
Tabel 32. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Atensi terhadap Budaya dan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	21	105	15.8	3
4	81	324	48.7	1
3	71	213	32	2
2	10	20	3	4
1	3	3	0.5	5
Jumlah	186	665	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan adalah 5 (skor tertinggi) $\times 2$ (jumlah item pertanyaan) $\times 95$ (jumlah responden) = 950 . Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 665 atau 70% . Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 70% tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa BUMDes dapat meningkatkan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan.

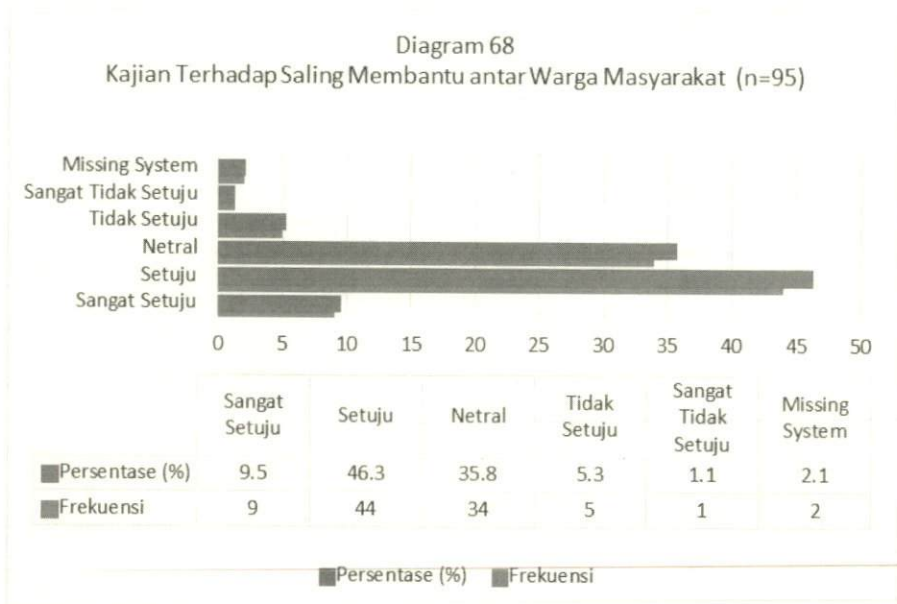
Adapun untuk mengukur indikator atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

- a. Saling Menghargai/Menghormati antar Warga Masyarakat
- Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (38.9%) dengan persentase yang sama responden yang menjawab **netral** (38.9%) sementara yang berpendapat sangat setuju (12.6%) tidak setuju (5.3%) dan sangat tidak setuju (2.1%) saling menghargai/menghormati antar warga masyarakat. Artinya sebagian besar responden berpendapat lebih **setuju** atau **juga netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling menghargai/menghormati antar sesama.

- b. Saling Bekerja Sama/Membantu antar Warga Masyarakat
Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (46.3%) disusul netral (35.8%) sementara yang berpendapat sangat setuju (9.5%) tidak setuju (5.3%) dan sangat tidak setuju (1.1%) saling bekerja sama/membantu antar warga masyarakat. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat lebih saling bekerja sama/membantu antar sesama.

Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Dari 6 item pertanyaan pada dimensi skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa, jawaban dari 95 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden dapat dilihat dalam diagram berikut:

Tabel 33. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Dimensi Skala Ekonomi dan Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
15	2	12	46	28	6
16	3	4	43	38	6
17	2	6	24	45	16
18	5	9	41	34	5
19	5	17	49	16	7
20	4	6	42	32	10
Jumlah	21	54	245	193	50

Tabel 34. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden Dimensi Skala Ekonomi, Ketersediaan dan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	50	250	13.3	3
4	193	772	40.9	1
3	245	735	39	2
2	54	108	5.7	4
1	21	21	1.1	5
Jumlah	563	1886	100	

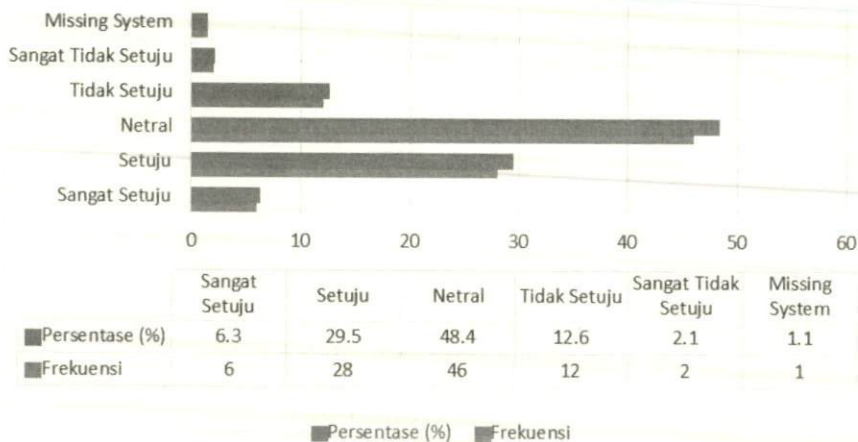
Diagram 4.107 tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang dimensi kemudahan akses ini adalah 5 (skor tertinggi) $\times 6$ (jumlah item pertanyaan) $\times 95$ (jumlah responden) = 2.850 . Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah

1.886 atau 66.2%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 66.2% tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa sejak berdirinya BUMDes, masyarakat merasakan skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Adapun untuk mengukur dimensi skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa terdapat beberapa indikator yaitu munculnya usaha bangkitan/ikutan, munculnya usaha rintisan, menurunnya tingkat pengangguran, revitalisasi nilai-nilai budaya lokal, dan akses terhadap teknologi informasi meningkat.

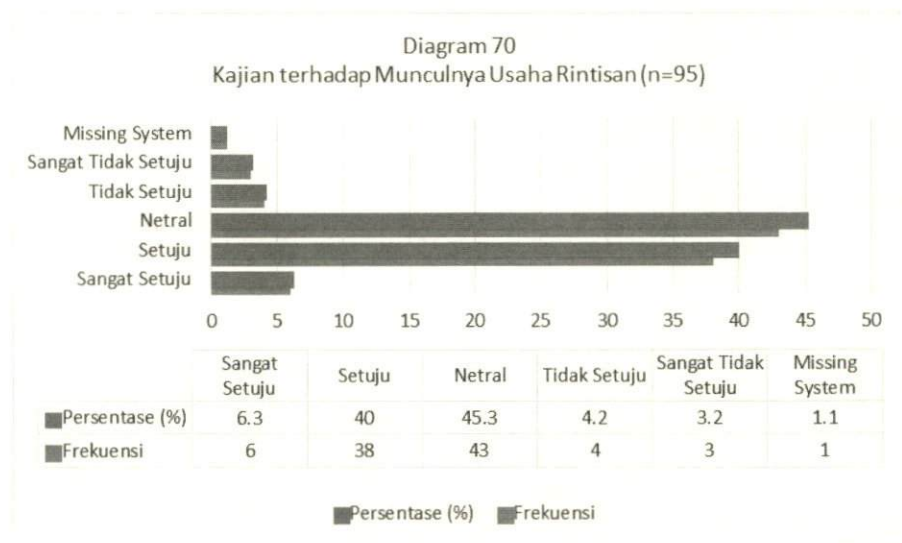
Diagram tersebut menunjukkan terdapat variasi dalam setiap jawaban responden. Berdasarkan data yang diperoleh dari indikator-indikator hasil penelitian yang dilakukan, responden berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi desa yang akan memberikan tambahan penghasilan ekonomi keluarga, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram 69
Kajian terhadap Munculnya Usaha Bangkitan/Ikutan (n=95)



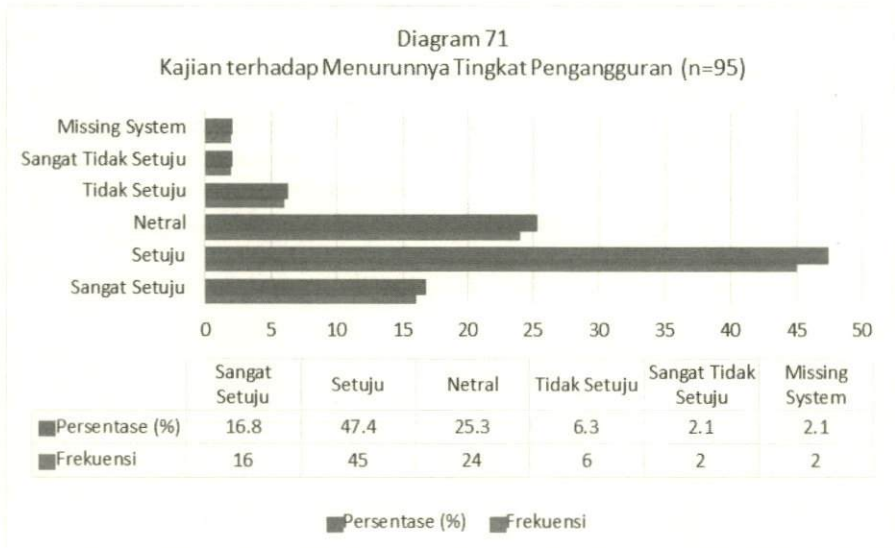
Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (48.4%) disusul setuju (29.5%) sementara yang berpendapat tidak setuju (12.6%) sangat setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (2.1%) terhadap munculnya usaha bangkitan/ikutan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha bangkitan/ikutan.

Adapun indikator munculnya usaha rintisan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



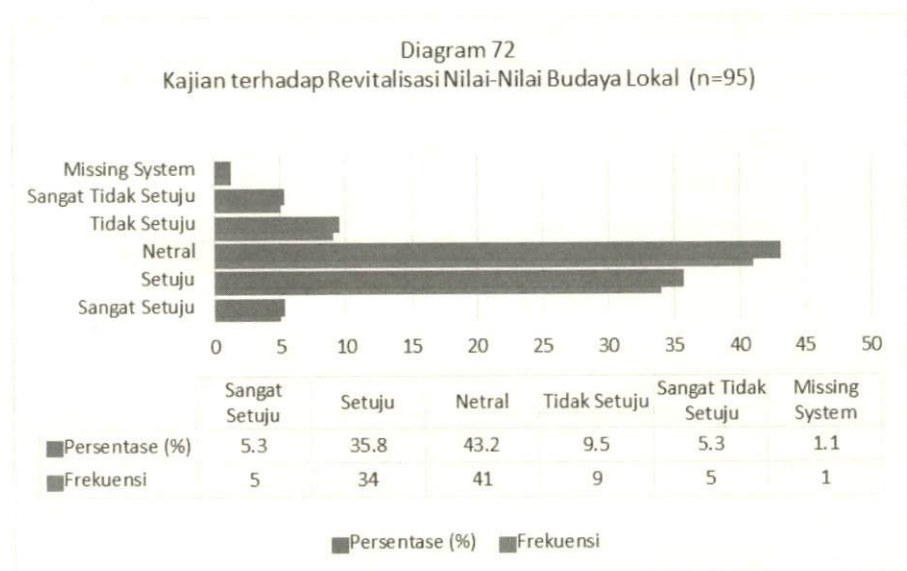
Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (45.3%) disusul setuju (40%) sementara yang berpendapat sangat setuju (6.3%) tidak setuju (4.2%) dan sangat tidak setuju (3.2%) terhadap munculnya usaha rintisan. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes muncul adanya usaha rintisan.

Adapun indikator menurunnya tingkat pengangguran. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **setuju** (47.4%) disusul netral (25.3%) sementara yang berpendapat sangat setuju (16.8%) tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (2.1%) terhadap menurunnya tingkat pengangguran. Artinya sebagian besar responden berpendapat **setuju** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes tingkat pengangguran menurun.

Adapun indikator revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (43.2%) disusul setuju (35.8%) sementara yang berpendapat tidak setuju (9.5%) sangat setuju (5.3%) dengan persentase yang sama responden yang menjawab sangat tidak setuju (5.3%) terhadap revitalisasi nilai-nilai budaya lokal. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes revitalisasi nilai-nilai budaya lokal meningkat.

Adapun indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat. Berdasarkan data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Tabel 35. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

Pertanyaan	Skor				
	1	2	3	4	5
19	5	17	49	16	7
20	4	6	42	32	10
Jumlah	9	23	91	48	17

Tabel 36. Distribusi Frekuensi dan Skor Jawaban Responden untuk Indikator Akses terhadap Teknologi Informasi Meningkat

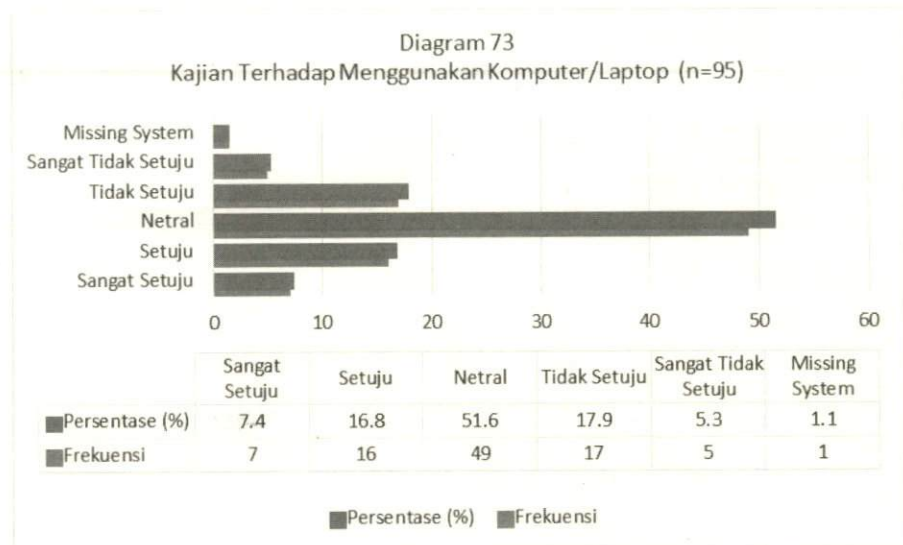
Skor	Responden			Ranking
	F	F x S	%	
5	17	85	14	3
4	48	192	31.7	2
3	91	273	45.1	1
2	23	46	7.6	4
1	9	9	1.5	5
Jumlah	188	605	100	

Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi dalam setiap jawaban responden. Secara ideal, skor tertinggi yang diharapkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan tentang indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat adalah $5 \text{ (skor tertinggi)} \times 2 \text{ (jumlah item pertanyaan)} \times 95 \text{ (jumlah responden)} = 950$. Dengan demikian rekapitulasi sebaran jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 605 atau 63.7%. Dari kriteria yang ditetapkan, apabila diinterpretasi nilai 63.7% tersebut terletak pada daerah **setuju**. Artinya responden berpendapat **setuju** bahwa BUMDes dapat meningkatkan akses terhadap teknologi informasi.

Adapun untuk mengukur indikator akses terhadap teknologi informasi meningkat dilakukan kajian terhadap setiap item pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi:

a. **Warga Masyarakat Menggunakan Komputer/Laptop**

Adapun kajian terhadap pertanyaan warga masyarakat yang menggunakan komputer/laptop. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

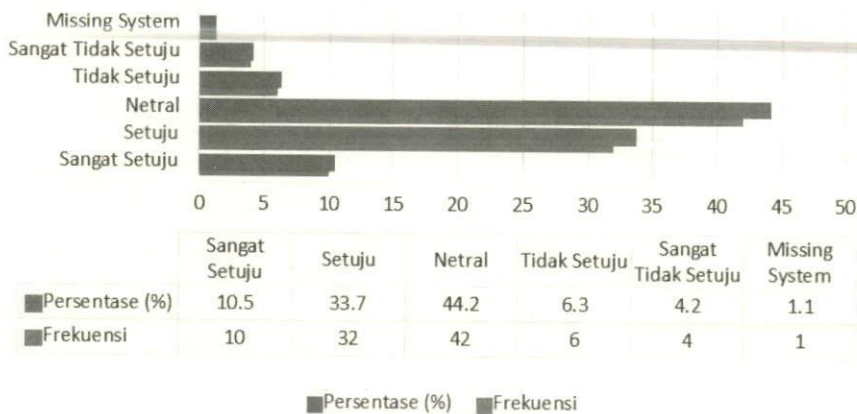


Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (51.6%) disusul tidak setuju (17.9%) sementara yang berpendapat setuju (16.8%) sangat setuju (7.4%) dan sangat tidak setuju (5.3%) menggunakan komputer/laptop. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat menggunakan komputer/laptop.

b. Warga Masyarakat Menggunakan *Handphone*

Adapun kajian terhadap pertanyaan warga masyarakat yang menggunakan *handphone*. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, ditunjukkan dalam diagram berikut:

Diagram 74
Kajian Terhadap Menggunakan Handphone (n=95)



Dari diagram tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat variasi jawaban dari responden, di mana jumlah responden terbanyak menyatakan bahwa masyarakat **netral** (44.2%) disusul setuju (33.7%) sementara yang berpendapat sangat setuju (10.5%) tidak setuju (6.3%) dan sangat tidak setuju (4.2%) menggunakan *handphone*. Artinya sebagian besar responden berpendapat **netral** bahwa sejak ikut dalam kegiatan BUMDes warga masyarakat menggunakan *handphone*.

Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes

Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk melihat pengaruh partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes. Dilihat hasil penghitungan statistik dalam diagram Model *Summary*, khususnya angka *R Square* dibawah ini:

Tabel 37. Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 ^a	.240	.230	10.04615
a. Predictors: (Constant). Partisipasi				
b. Dependent Variable: Kesejahteraan				

Besarnya angka *R square* (r^2) adalah 0.240. Angka tersebut merupakan angka besarnya pengaruh partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes, dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

$$KD = 0.240 \times 100 \%$$

$$KD = 24 \%$$

Angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes adalah 24 %. Adapun sisanya sebesar 76 % (100% - 24 %) dipengaruhi oleh faktor lain (*epsilon*).

Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut sudah benar atau salah, diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan angka F sebagaimana tertera dalam diagram di bawah ini.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2454.988	1	2454.988	24.325	.000 ^b
	Residual	7771.239	77	100.925		
	Total	10226.227	78			
a. Dependent Variable: Kesejahteraan						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi						

Dengan hipotesis, sebagai berikut:

- Ho : Tidak ada hubungan linier antara partisipasi dengan kesejahteraan anggota BUMDes.
- H₁ : Ada hubungan linier antara partisipasi dengan kesejahteraan anggota BUMDes.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 ^a	.549	.544	9.63374
a. Predictors: (Constant), Partisipasi				
b. Dependent Variable: Kesejahteraan				

Pengujian dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F diagram, di mana F penelitian dari SPSS sebesar 24.325 > F diagram sebesar 3.02. Kedua, dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0.05 (5%). Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka Ho ditolak dan H₁ diterima. Artinya, ada hubungan linier antara partisipasi dengan kesejahteraan anggota BUMDes. Dengan demikian, model regresi tersebut sudah layak dan benar.

Pengujian Hipotesis Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Tirta Mandiri Kabupaten Klaten, di Provinsi Jawa Tengah

Untuk melihat pengaruh partisipasi masyarakat partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes. Dilihat hasil penghitungan statistik dalam diagram Model *Summary*, khususnya angka *R Square* di bawah ini:

Tabel 38. Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Anggota BUMDes Tirta Mandiri Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.868	3.531		9.025	.000
	Partisipasi	1.143	.107	.741	10.635	.000
a. Dependent Variable: Kesejahteraan						

Besarnya angka *R square* (r^2) adalah 0.549. Angka tersebut merupakan angka besarnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

$$KD = 0.549 \times 100 \%$$

$$KD = 54.9 \%$$

Angka tersebut mempunyai arti bahwa pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 54.9 %. Adapun sisanya sebesar 45.1 % (100% - 54.9 %) dipengaruhi oleh faktor lain (*epsilon*).

Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut sudah benar atau salah, diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan angka F sebagaimana tertera dalam diagram di bawah ini.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10496.560	1	10496.560	113.099	.000 ^b
	Residual	8631.226	93	92.809		
	Total	19127.785	94			
a. Dependent Variable: Kesejahteraan						
b. Predictors: (Constant), Partisipasi						

Dengan hipotesis. sebagai berikut:

- H_0 : Tidak ada hubungan linier antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.
- H_1 : Ada hubungan linier antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.

Pengujian dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F diagram, di mana F penelitian dari SPSS sebesar $113.099 > F$ diagram sebesar 3.02. Kedua, dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0.05 (5%). Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, ada hubungan linier antara partisipasi dengan kesejahteraan anggota BUMDes. Dengan demikian, model regresi tersebut sudah layak dan benar.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi, diperoleh hasil bahwa besarnya pengaruh partisipasi masyarakat dalam

pengembangan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat adalah positif dan signifikan. Adapun besarnya pengaruh X terhadap Y adalah:

1. Partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes Cahaya Makmur Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah 24 %. Adapun sisanya sebesar 76 % (100%-24 %) dipengaruhi oleh faktor lain (*epsilon*). Artinya ada hubungan linier yang signifikan (berarti) antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Partisipasi terhadap kesejahteraan anggota BUMDes Tirta Mandiri Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah 54,9 %. Adapun sisanya sebesar 45,1 % (100%-54,9 %) dipengaruhi oleh faktor lain (*epsilon*). Artinya ada hubungan linier yang signifikan (berarti) antara partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes di Tirta Mandiri Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah lebih menunjukkan hasil uji pengaruh yang lebih besar atau lebih signifikan. Hal ini karena di BUMDes Tirta Mandiri masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes cukup banyak dan dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat.
2. Kegiatan BUMDes yang diikuti oleh warga masyarakat adalah kegiatan yang dapat mendatangkan tambahan pendapatan sehingga kegiatan tersebut baik untuk terus dilanjutkan.
3. Bagi para peneliti atau akademisi yang akan melanjutkan penelitian semacam ini agar perlu menambahkan beberapa variabel bebas atau variabel antara, agar besarnya pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Cohen. John M. and Norman T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation; Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation*. New York : Cornel University Press.
- Das. Maitreyi Bordia; Evans. Timothy Grant; Palu Toomas; Wilson. David. 2017. *Social Inclusion: What Does It Mean for Health Policy and Practice?*. Discussion Paper. Washington D.C.: World Bank Group.
- Khairuddin. H. 1992. *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi. Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty
- Mahardika. Timur. 2001. *Pendidikan Politik Pemberdayaan Desa. Panduan Praktis*. Jogjakarta: Pustaka Utama LAPERA.
- Moynihan. D.P. 2003. *Normative and Instrumental Perspective on Public Participation. American Review of Public Administration*. USA: Sage Publication.
- Mubyarto. 1987. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty dan P3PK UGM.
- Ndraha. Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Tinggal Landas)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Oakley. Peter. et. al. 1991. *Projects With People : The Practice of Participation in Rural Development*. Ganevallo.
- Prayitno. Ujianto Singgih. (2013). "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan", dalam Sali Susiana (ed). *Kebijakan Pemerintahan SBY*. Jakarta: P3DI Setjen DPR & Azza Grafika.Priyatna.
- Suganda. 1996. *Motivasi, Patisipasi dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Kartanegara Press.

- Sastropoetro. S. 1988. *Partisipasi. Komunikasi. Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sirajuddin. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara; Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: MCW & YAPPIKA.
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto. (2007). Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial. <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UINYogyaParadigmaKesos.pdf>. diakses 2 Februari 2018.
- Sutrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwignjo. 1985. *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: GI
- Stiglitz. Joseph. Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
- Thoha. Miftah. 1990. *"Kepemimpinan dalam Pembangunan. Pendekatan Perilaku"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sumber Internet

- "Pengertian Kesejahteraan Sosial". <http://www.mainotes.com/2015/12/definisi-kesejahteraan.html>. diakses 2 Februari 2018.

BAGIAN 3

BUMDES DAN RELEVANSINYA

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DI SEKTOR KESEHATAN

Nur Sholikhah Putri Suni¹

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini peran desa sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Selain itu, salah satu program dari Nawacita adalah memperkuat desa dan memberikan perhatian lebih ke pemerintahan desa. Pembangunan ekonomi di desa perlu adanya peningkatan sehingga tidak terlalu tertinggal dengan pembangunan ekonomi di kota, dengan kata lain tidak adanya kesenjangan yang cukup lebar. Terkait hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan dari desa bertujuan untuk mewujudkan perekonomian berkeadilan dan upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah desa bersama masyarakat harus saling bekerja sama dalam melakukan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan tersebut adalah memberikan peluang bagi kemampuan desa sebagai tulang punggung ekonomi secara regional dan nasional. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan BUMDes.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan

¹ Calon Peneliti pada Pusat Penelitian (Puslit) Badan Keahlian DPR RI.

BUMDes.² Dalam hal ini, penguatan desa tidak lepas dari penggalian potensi kearifan lokal. UU tersebut dijadikan landasan payung hukum untuk membentuk BUMDes. BUMDes dikelola menggunakan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa. Dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.³ Dengan didirikannya BUMDes maka pemenuhan kebutuhan warga desa dapat lebih mudah terpenuhi. Selain itu, warga akan menjadi lebih aktif dalam mengembangkan desanya.

Inisiasi berdirinya BUMDes sudah mulai dari terbentuknya UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap desa dapat mendirikan BUMDes untuk dapat memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Orientasi BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya dengan penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat. Setiap daerah memiliki peraturan daerah yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur mekanisme BUMDes di daerah masing-masing. BUMDes dapat menjalankan usaha perantara yang dapat memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa. Salah satu jasa pelayanannya berupa memberikan bantuan pelayanan kesehatan seperti iuran BPJS. Selain itu, BUMDes juga memberikan kontribusi dalam kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pengadaan mobil *ambulance* untuk warga desa yang membutuhkan penanganan untuk diantar ke fasilitas kesehatan.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indikator Pembangunan

² Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.

Manusia (IPM). Komponen dari IPM tersebut di antaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen tersebut sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, tingkat produktivitas yang juga dapat terwujud jika pembangunan ekonomi semakin baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang sehat.⁴ Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkualitas. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Hal ini selaras dengan deklarasi PBB 1948 Pasal 25 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya.⁵

Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga terwujud manusia yang bermutu, sehat dan produktif serta tercipta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kemandirian masyarakat untuk saling bergotong-royong mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga sangat diperlukan. Kemandirian diartikan sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Oleh karena itu, kemandirian masyarakat terutama di desa dapat diartikan sebagai suatu gerakan desa melalui pengembangan potensi yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶ Salah satu contohnya adalah peran BUMDes yang memadukan usaha ekonomi dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan.

BUMDes juga merupakan bentuk implementasi dari pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, secara tidak langsung BUMDes juga ikut andil

⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016* (Jakarta: BPS, 2017).

⁵ Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi PBB 1948.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015* (Jakarta: BPS, 2016). Hal 19.

untuk mewujudkan tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) yang mencakup pelayanan kesehatan seluruh penduduk dari aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana peran BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor kesehatan.

B. Badan Usah Milik Desa (BUMDes)

Terjadi pergeseran paradigma dari **pembangunan** masyarakat desa menjadi **pemberdayaan** masyarakat desa. Fokus dari pembangunan masyarakat adalah negara dan modal, sedangkan pemberdayaan masyarakat pada institusi, masyarakat lokal yang dibangun secara partisipatif. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan budaya. Dalam hal ini, peran masyarakat dibutuhkan dalam ikut serta pembuatan program sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat terutama dalam pemecahan masalah dengan mengidentifikasi kemudian menggerakkan swadaya masyarakat.⁷

Pemerintah sudah sejak lama melaksanakan berbagai program pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan. Akan tetapi, hasil yang dicapai belum maksimal sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan, intervensi dari pemerintah pusat cukup dominan, sehingga dapat menghambat kreativitas masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi di pedesaan. Eksistensi desa sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aspek penting dalam pembangunan desa adalah proses dan intervensi. Proses yang dimaksud adalah melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses yang dilakukan. Sedangkan intervensi tidak lepas dari campur tangan

⁷ Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

pemerintah seperti pengawasan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan relasi antara BUMDes dengan pemerintah daerah.

Dibutuhkan dua pendekatan khusus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, di antaranya: (1) kebutuhan masyarakat dalam upaya melakukan perubahan, serta (2) kemampuan pemerintah desa dengan masyarakat dalam melakukan implementasi pembangunan yang sudah disusun atau dikenal dengan sebutan *political will*.⁸

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan dapat menanggulangi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan serta mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan keadilan sosial.^{9,10} Berdasarkan hal tersebut, maka langkah yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan mendirikan kelembagaan ekonomi yang pengelolaanya dilakukan seluruhnya oleh masyarakat desa. Kelembagaan ekonomi tersebut dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan namanya, pengelolaan BUMDes seluruhnya dilakukan dari desa, oleh desa dan untuk desa. Dalam hal ini, pemerintah pusat hanya mendanai awal pembentukan BUMDes dan melakukan pengawasan terkait jalannya BUMDes. Keberadaan BUMDes menjadikan usaha masyarakat desa lebih produktif dan efektif karena disesuaikan dengan potensi asli desa. Selain itu, BUMDes dapat mendorong pemerataan ekonomi sampai ke desa. Terkait fungsinya, BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga

⁸ Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta" *Modus*, Volume: 28, 2016, hal: 155-167

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit*

¹⁰ Program Desa Lestari, *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa* (Yogyakarta: Yayasan Panabulu, 2016).

sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial, karena dalam kegiatannya, BUMDes juga menyediakan pelayanan sosial. Sedangkan dikatakan sebagai lembaga komersial desa karena salah satu tujuan BUMDes adalah mencari keuntungan dari penjualan sumber daya lokal yang hasilnya nanti dapat untuk mensejahterakan masyarakat desa.¹¹ BUMDes juga berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dengan melakukan pelayanan barang dan jasa yang pengadaan kebutuhannya tidak memberatkan masyarakat, yaitu dengan harga yang terjangkau. Terkait dengan sektor rill dan lembaga keuangan maka BUMDes tetap mempertahankan efisiensi dan efektivitas.¹²

Desa mempunyai modal sosial yang kuat dibandingkan dengan modal ekonomi. Modal sosial ini salah satu poin untuk menentukan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan modal sosial adalah ikatan sosial, jembatan sosial dan jaringan sosial. Sedangkan menurut *World Bank* (1998) dalam Anggraeni (2016) modal sosial diartikan sebagai interaksi antar-orang yang berkontribusi pada ekonomi dan pembangunan sosial.¹³ Perlu adanya rasa kepercayaan dan tanggung jawab dalam modal sosial tersebut. Modal sosial dibedakan menjadi dua yaitu: (a) modal sosial internal yang merupakan hubungan antar-orang dalam organisasi, dan (b) modal sosial eksternal hubungannya antara organisasi dengan pihak luar.¹⁴

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat (1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes

¹¹ Wijanarko. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto (Skripsi)* (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2012).

¹² Ramadana, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", *Journal Administrasi Publik, Volume 1, 2013, hal 1068-1076*.

¹³ Anggraeni, *op. cit*

¹⁴ DeMassis, "Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory Analysis", *Journal of Small Business Management, Volume 53, 2013, hal 1- 36, 2016*.

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹⁵ BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh seluruh masyarakat desa yang didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa seperti: (1) pemenuhan kebutuhan pokok, (2) pemanfaatan sumber daya desa secara optimal yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, (3) adanya unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa. Terkait dengan hal di atas, BUMDes juga dijadikan sebagai ajang pembelajaran bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha, manajerial dan tata kelola desa.¹⁶ Di sisi lain, dengan adanya BUMDes dapat menggerakkan dinamika ekonomi desa dan menangkal kekuatan korporasi baik asing maupun nasional karena sumber daya alam yang dimiliki desa rawan terjadi intervensi modal.¹⁷

Selain itu, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Semangat gotong-royong yang diciptakan BUMDes tidak hanya memberikan manfaat berupa keuntungan dalam pembangunan aspek fisik tetapi juga dalam aspek sosial.¹⁸ Eksistensi BUMDes diharapkan dapat menciptakan produk dan program unggulan lokal yang inovatif sehingga dapat menjadi citra positif. BUMDes memiliki beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut: (1) mendorong perkembangan perekonomian desa, (2) meningkatkan pendapatan asli desa, (3) meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa, (4) mendorong berkembang usaha mikro sektor informal. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, BUMDes memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Tata aturan yang terwujud dalam BUMDes termasuk dalam mekanisme

¹⁵ Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁶ Putra. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2016).

¹⁷ Ramadana, *op.cit*

¹⁸ Prasetyo, "Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialetika, Volume XI, No.1, 2016*

kelembagaan yang solid. Model usaha yang diciptakan tidak dikuasai oleh kelompok tertentu.

Lembaga perekonomian desa tidak hanya terdapat di Indonesia, melainkan negara Asia lainnya seperti Jepang dan Thailand. Di Jepang, program pengembangan ekonomi di pedesaan dikenal dengan sebutan *One Village One Commodity* (OVOC) di mana satu desa menghasilkan satu komoditas. Program ini sangat bermanfaat karena dapat mengentaskan kemiskinan. Sedangkan di Thailand dikenal dengan sebutan OTOP yaitu pengembangan produk khas lokal dengan mengandalkan tradisi setempat. Terdapat tiga prinsip dasar dalam pengembangan OTOP di antaranya: (1) produk lokal yang mengglobal, (2) produk yang dihasilkan berdasarkan kreativitas dan kemampuan sendiri, serta (3) mengembangkan kemampuan sumber daya manusia.¹⁹

C. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat sehingga dapat hidup dengan baik melalui pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan. Karakteristik pemberdayaan masyarakat menurut definisi *Asian Development Bank* mengandung unsur, (1) berbasis lokal, (2) berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan, (3) berbasis kemitraan, (4) secara holistik, serta (5) berkelanjutan.²⁰

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai program. Pemberdayaan masyarakat terutama di desa dilakukan

¹⁹ Tambunan, *Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan bagi UKM? Ekonomi Kerakyatan dalam Kancan Globalisasi* (Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2003).

²⁰ Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. (Kencana: Jakarta, 2013). Hal 76.

dengan cara: (a) Mendorong partisipasi masyarakat dari mulai perencanaan; (b) Mengembangkan program secara berkelanjutan; serta (c) Melakukan *monitoring* terhadap program yang dilaksanakan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menciptakan iklim yang dapat meningkatkan potensi masyarakat kemudian memperkuat potensi tersebut sehingga dapat menciptakan banyak peluang usaha.

Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan memiliki tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga harapan hidup meningkat. Dengan meningkatkan harapan hidup, maka dapat berkontribusi menciptakan ekonomi yang lebih baik.²¹ Pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan merupakan peran aktif masyarakat yang diberdayakan dalam kegiatan dan program kesehatan. Dalam hal ini dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, mengambil keputusan serta memanfaatkan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Selain dapat meningkatkan ekonomi, pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan juga dapat meningkatkan sosial dan transformasi budaya. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan.

Menurut Departemen Kesehatan (2009),²² terdapat empat unsur dalam pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pergerakan pemberdayaan

Inisiator, motivator dan fasilitator dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai.

2. Sasaran pemberdayaan

Masyarakat dan pemerintah berperan sebagai agen perubahan dalam penerapan perilaku hidup sehat.

²¹ Bloom dan Canning, *Health and Reconciling the Micro and Macro Evidence*, (California: Standford University, 2005).

²² Departemen Kesehatan. *Sistem Kesehatan Nasional* (Jakarta: Depkes, 2009).

3. Kegiatan hidup sehat

Kegiatan hidup sehat yang dilakukan sehari-hari akan membentuk pola dan lama kelamaan akan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Sumber daya

Dalam proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, potensi yang digunakan meliputi dana, sarana prasarana, budaya, metode, pedoman dan media.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Partisipasi masyarakat harus dimaksimalkan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat selalu terlibat secara aktif dalam proses-proses kegiatan masyarakat sehingga tercipta kemandirian. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan merupakan bentuk upaya kesehatan, baik perorangan dan masyarakat secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.²³ Di samping itu, harus dilihat sebagai upaya komprehensif dalam membangun masyarakat secara langsung di tingkat desa.

D. Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mencapai kesejahteraaannya. Kesejahteraan dimulai dari pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Rhames Mishra dalam bukunya berpendapat bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah negara berusaha untuk memelihara dan menetapkan standar

²³ Sulaeman, *op.cit*

kehidupan minimum serta menjunjung tinggi kepentingan bersama.²⁴ Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, definisi dari kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan baik material, spiritual, serta sosial warga negara sehingga mendapatkan penghidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri untuk dapat melaksanakan fungsi sosial.

Salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan masyarakat harus selalu dipelihara dan ditingkatkan. Kesehatan masyarakat dapat menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam pembangunan nasional.

Masalah kesehatan di Indonesia cukup kompleks terutama terkait pelayanan kesehatan. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai karena terkendala oleh biaya. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkannya. Hasil dari sidang *World Health Assembly* (WHA) salah satunya adalah diperlukan adanya sistem pembiayaan kesehatan yang dapat menjamin akses masyarakat sehingga dapat memperoleh pembiayaan yang berkelanjutan melalui *Universal Health Coverage* (UHC) antara lain dengan asuransi kesehatan sosial. Selain itu, UHC disepakati masuk rancangan resolusi Sidang Majelis Umum PBB ke-67 tahun 2012 yang diselenggarakan di New York. Oleh karena itu, UHC merupakan agenda prioritas global yang harus segera diwujudkan di Indonesia. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai UHC di Indonesia akan meluaskan sektor informal yang salah satu kendalanya adalah mendapatkan kesulitan terkait pengumpulan iuran.²⁵ Kelompok informal mendominasi perekonomian di Indonesia, proporsi kelompok informal sebesar 62,1%.²⁶

Suatu negara sudah dikatakan mencapai UHC apabila semua penduduk sudah terdaftar menjadi peserta, mendapatkan pelayanan

²⁴ Rames Mishra. *The Welfare State in Crisis Social Thought and Social*, (Canada: Havester Press. 1987). Hal. 130.

²⁵ Shihab, *BPJS Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Depok: Cinta Indonesia, 2013).

²⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *op.cit*

kesehatan secara komprehensif, kemudahan akses serta pemerataan tenaga dan fasilitas kesehatan. UHC juga merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan perlindungan keuangan terhadap pengeluaran kesehatan yang disebabkan karena sakit terutama pada penduduk yang miskin. Menurut WHO dalam Badan Pusat Statistik (2017), UHC mempunyai tiga tujuan penting, yaitu: (1) kesetaraan dalam akses pelayanan kesehatan. Dalam hal ini semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan apabila membutuhkan tanpa terkecuali, (2) peningkatan kualitas pelayanan, serta (3) terlindunginya masyarakat dari risiko finansial sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan ekonomi karena mengakses pelayanan kesehatan.²⁷

Dalam upaya mewujudkan UHC dan perilaku serta lingkungan yang sehat, maka pemerintah tetap berperan aktif dan mendanai program-program kesehatan yang manfaatnya dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan jaminan kesehatan sampai ke tingkat desa.

Pelaksanaan UHC di Indonesia masih banyak permasalahan selain pencapaian target, seperti kekurangan dana, fasilitas dan SDM kesehatan yang belum merata serta kualitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang belum optimal. Berbeda dengan negara berkembang lainnya yang sudah mencapai UHC seperti negara Thailand sekitar 20 tahun. Di negara tersebut, UHC cenderung sukses karena adanya standar fasilitas dan kualitas pelayanan. Negara Asia lainnya yang dapat mencapai UHC adalah Korea dan Jepang. Seluruh penduduk di Korea tercakup dalam program asuransi kesehatan dalam kurun waktu 12 tahun, sedangkan Jepang mencapai 40 tahun.^{28,29}

²⁷ Badan Pusat Statistik, *op.cit*

²⁸ *ibid*

²⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *op.cit*

Berdasarkan pengalaman dari negara yang mencapai UHC, reformasi terhadap jaminan kesehatan sebagian besar dilaksanakan secara bertahap yaitu dari PNS, kelompok formal dan kelompok miskin. Beberapa negara berkembang mendapatkan tantangan yang harus dihadapi ketika harus berambisi untuk mencakup UHC, yaitu dalam menjangkau populasi tertentu. Banyak kelompok informal yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan lokasi usaha mereka sebagian tidak permanen.

E. Kontribusi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Dalam hal menciptakan *Universal Health Coverage* melalui jaminan kesehatan sebagai salah satu wujud dari kesejahteraan masyarakat, seperti diketahui bersama bahwa dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan, masuknya sektor informal dalam skema berbasis iuran menjadikan tantangan tersendiri bagi Negara. Hal ini dikarenakan banyak pekerja informal yang memiliki pekerjaan tidak stabil sehingga dapat menghambat pengumpulan iuran reguler. Dalam hal ini, peran BUMDes sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Di negara seperti Filipina dan Vietnam, banyak intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kelompok informal seperti subsidi iuran, sosialisasi tentang cara mendaftar, menjelaskan keuntungan yang didapat, membuat pendaftaran melalui bank ataupun toko serta telepon seluler.³⁰ Cara tersebut bisa diadopsi bekerja sama dengan BUMDes, di mana warga masyarakat desa bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran melalui BUMDes.

Pemanfaatan dana BUMDes dalam bidang kesehatan selain terkait jaminan kesehatan adalah pembangunan fasilitas kesehatan. Salah satu contoh adalah BUMDes yang berada di Kabupaten Bojonegoro,

³⁰ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *op.cit*

tepatnya di Desa Pejambon. BUMDes tersebut sudah berhasil membangun puskesmas untuk keperluan masyarakat, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) ditemukan bahwa sebanyak 2% dana BUMDes digunakan untuk membangun/memperbaiki fasilitas kesehatan. Walaupun persentase tersebut cukup kecil tetapi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan melalui fasilitas kesehatan perlu diapresiasi.³¹ Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peduli akan kesehatan. Selain dari sisi fasilitas kesehatan, BUMDes di Desa Pejambon juga memberikan program bantuan berupa pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Bahkan sebanyak 48% masyarakat di Desa Pejambon mengharapkan bahwa salah satu manfaat dari BUMDes dapat meningkatkan derajat kesehatan. Dari sisi kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, BUMDes yang berada di Desa Puuwonua, Sulawesi Utara menyediakan mobil *ambulance* untuk masyarakat desa terutama yang tidak mampu. Sehingga masyarakat lebih cepat tertangani apabila dalam kondisi darurat.

Beberapa BUMDes yang sudah menjalankan program terkait kesehatan di antaranya BUMDes di Desa Talaitad Utara. BUMDes tersebut sudah membantu memudahkan masyarakat terkait iuran BPJS. BUMDes bekerja sama dengan BPJS di mana masyarakat dapat membayarkan iuran BPJS. Kemudian ada BUMDes di Desa Manjungan Klaten yang sudah membiayai 300 warga untuk menjadi peserta BPJS. Biaya tersebut diperoleh dari hasil laba usaha yang dijalankan BUMDes tersebut yaitu sebesar 10%. Hal ini membuktikan peran BUMDes sangat besar untuk terciptanya *Universal Health Coverage* (UHC).³²

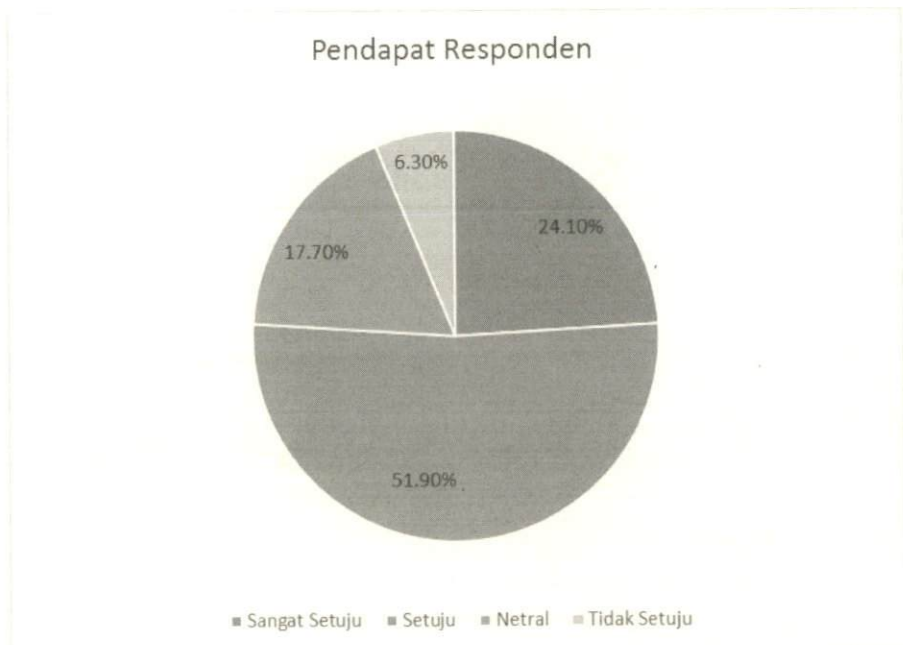
³¹ Prasetyo, *op.cit*

³² "BPJS Kesehatan Teken MoU dengan BUMDes Manjungan", <https://manjungan.desa.id/bpjs-kesehatan-teken-mou-dengan-bumdes-manjungan/>, diakses 6 April 2018.

Selain kedua desa di atas, BUMDes yang letaknya di Desa Doudo tepatnya di Kabupaten Gresik juga sudah menerapkan kerjasama dengan BPJS demi terciptanya UHC dengan membuka loket pendaftaran dan pembayaran iuran JKN. Selain jarak yang menguntungkan karena memudahkan masyarakat untuk tidak langsung datang ke kantor BPJS, BUMDes juga diuntungkan karena mendapatkan biaya administrasi yang nantinya dapat digunakan untuk masyarakat desa setempat.³³

Hasil penelitian terkait BUMDes yang dilakukan di daerah Palu dan Klaten menunjukkan bahwa sejak berdirinya BUMDes memberikan manfaat yang cukup besar terutama di sektor kesehatan seperti, masyarakat menjadi mampu membiayai berobat ke fasilitas kesehatan dan mampu membayar iuran BPJS. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian:

- a. Kajian terhadap kemampuan berobat ke fasilitas kesehatan di daerah Palu

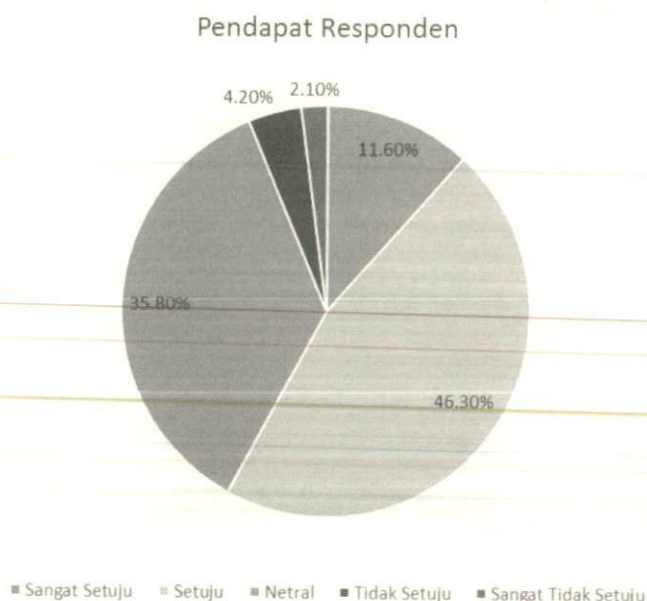


Gambar 1. Kajian Terhadap Memiliki Akses Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=79)

³³ BPJS Kesehatan, "Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mencapai *Universal Health Coverage*". *Media Eksternal BPJS Kesehatan*, Edisi 44, 2018

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (51,9%) bahwa sejak berdirinya BUMDes, warga masyarakat memiliki kemudahan akses dan mampu berobat di fasilitas kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa manfaat BUMDes sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

- b. Kajian terhadap kemampuan berobat ke fasilitas kesehatan di daerah Klaten

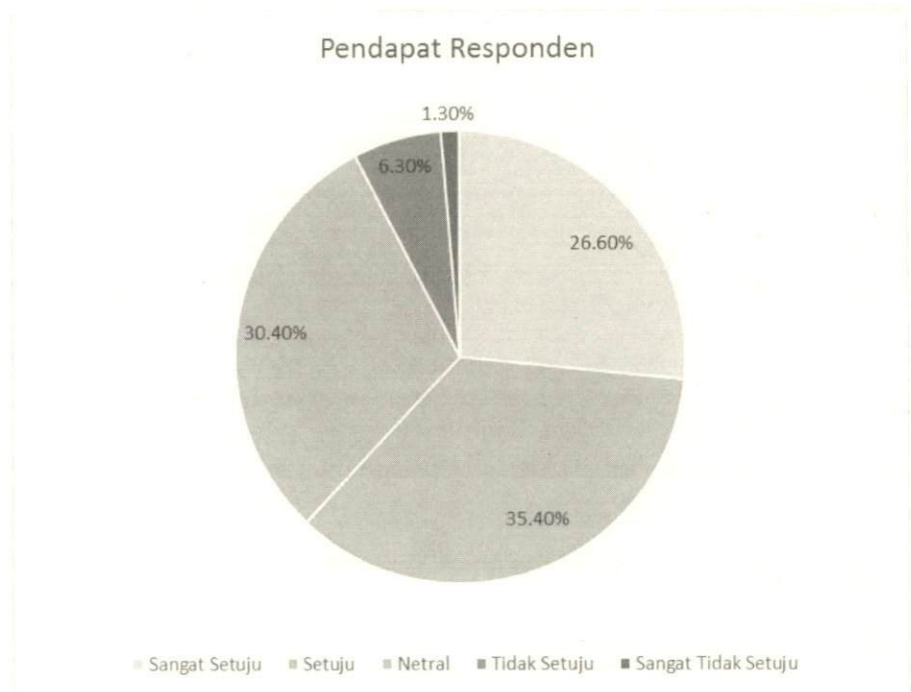


Gambar 2. Kajian Terhadap Mampu Membiayai Biaya Berobat ke Fasilitas Kesehatan (n=95)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir setengah dari responden menyatakan setuju (46,3%) bahwa sejak berdirinya BUMDes, warga masyarakat memiliki kemudahan akses dan mampu berobat di fasilitas kesehatan.

Sedangkan kajian terhadap kemampuan membayar Iuran BPJS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

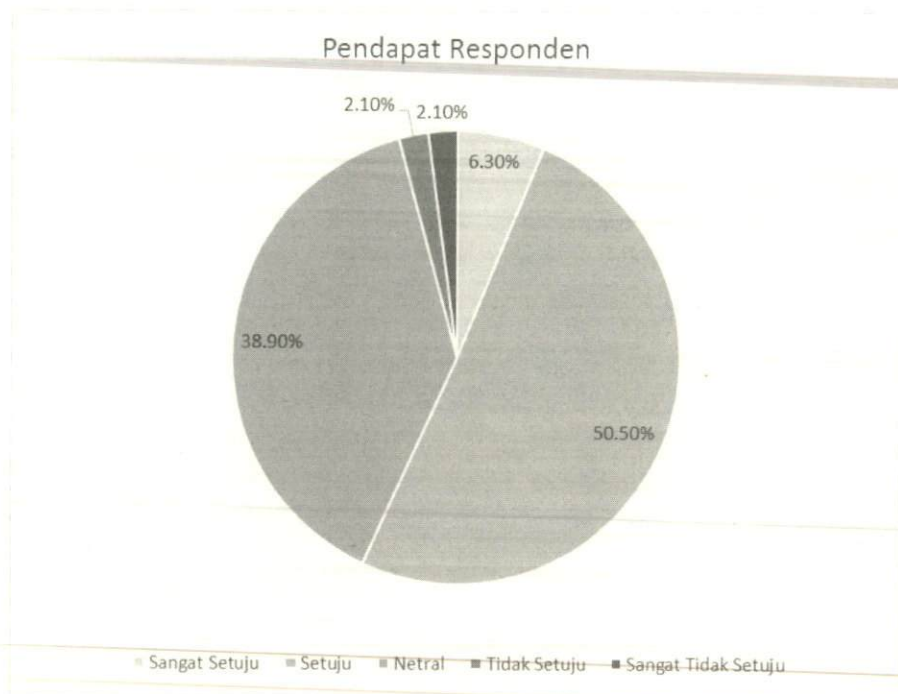
- a. Kajian kemampuan membayar iuran BPJS di daerah Palu



Gambar 3. Kajian Terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=79)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir setengah dari responden menyatakan setuju (35,4%) bahwa sejak berdirinya BUMDes, warga masyarakat menjadi mampu membayar iuran BPJS.

b. Kajian kemampuan membayar iuran BPJS di daerah Klaten

**Gambar 4. Kajian Terhadap Mampu Membayar Iuran BPJS (n=95)**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa setengah dari responden menyatakan setuju (50,5%) bahwa sejak berdirinya BUMDes, warga masyarakat menjadi mampu membayar iuran BPJS.

F. Penutup

BUMDes memiliki manfaat yang cukup besar terutama di sektor kesehatan. BUMDes juga dapat menciptakan kesejahteraan di sektor kesehatan. Banyak masyarakat yang merasa terbantu semenjak adanya BUMDes. BUMDes juga memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah kesehatan terutama terkait akses dan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, secara tidak langsung BUMDes dapat dijadikan terobosan untuk terciptanya *Universal Health Coverage* (UHC) yang merupakan cita-cita global termasuk Indonesia. UHC merupakan konsep pelayanan kesehatan yang mencakup aspek aksesibilitas pelayanan kesehatan dari preventif, promotif, kuratif sampai rehabilitatif yang berkualitas dan komprehensif. Selain itu, UHC bertujuan untuk mengurangi masalah finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara. Dalam hal ini, implementasi UHC sudah dilakukan di Indonesia yaitu melalui JKN.

Di Indonesia diperlukan inovasi dan langkah strategis supaya program dapat berjalan optimal dan cita-cita UHC dapat tercapai. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang tidak hanya bertahun-tahun melainkan dekade untuk mencapai UHC. Sebagian besar negara di Asia yang sudah mencapai UHC rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Mereka mempunyai strategi perencanaan jangka panjang yang digunakan sebagai referensi. BUMDes bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan bantuan berupa iuran BPJS kesehatan kepada masyarakat desa yang belum terdaftar. Dengan adanya kerjasama tersebut maka dapat menguntungkan kedua belah pihak demi terciptanya jaminan kesehatan yang adil dan merata. Selain itu, BUMDes juga mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiyoso .2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press Institute.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta : BPS.
- Bloom dan Canning. 2005. *Health and Reconciling the Micro and Macro Evidence*. Standford University: California.
- Departemen Kesehatan. 2009. *Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta.
- Program Desa Lestari. 2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Rames Mishra. 1987. *The Welfare State in Crisis Social Thought and Social*. Canada: Havester Press.
- Shihab, Ahmad Nizar. 2013. *BPJS Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Depok: Cinta Indonesia.
- Soendoro, Emir. 2009. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta: Dlnov Progress Indonesia.
- Sulaeman, Endang. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2015. *Perjalanan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. TNP2K: Jakarta.

Jurnal

- DeMassis dkk. 2015. Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory Analysis. *Journal of Small Bussiness Management, Volume.53, No.1: 1- 36,2016.*
- Prasetyo, Ratna Azis.2016. Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.*Jurnal Dialetika*,Volume XI, No.1, Maret 2016.
- Ramadana, dkk. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik, Volume.1, No. 6: 1068-1076, 2013.*

Dokumen

Deklarasi PBB 1948

Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2012. *Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Tambunan 2003. *Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan bagi UKM? Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Wijanarko. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto (Skripsi)*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Koran dan Majalah

- Anggraeni, Maria Rosa. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta. *Modus, Volume. 28, No. 2: 155-167, 2016.*
- BPJS Kesehatan. 2018. Pentingnya Dukungan Pemda Untuk Mencapai *Universal Health Coverage. Media Eksternal BPJS Kesehatan*, Edisi 44, 2018.
- Nuriwan Trihendrawan, “Undang-undang SJSN dan BPJS Dinilai Tidak Efektif”, *Sindonews* 1 Agustus 2018.

Internet

- BPJS Kesehatan Teken MoU dengan BUMDes Manjungan”, <https://manjungan.desa.id/bpjs-kesehatan-teken-mou-dengan-bumdes-manjungan/>, diakses 6 April 2018.

Epilog

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di pedesaan adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa.

Fakta membuktikan bahwa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, jumlah BUMDes mengalami peningkatan yang sangat banyak. Hal ini setidaknya dipicu dari aturan pada Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut yang menyatakan bahwa salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan BUMDes. Hal ini memicu pembentukan BUMDes di seluruh Indonesia kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.

Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat karena salah satu amanah dalam penggunaan dana desa, selain untuk pembangunan infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah satunya melalui wadah bernama BUMDes. Di bawah pengelolaan BUMDes, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa menjadi sangat mandiri. Di samping itu, desa tampak mulai bergeliat dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga ditandai oleh adanya 'patron-klien' antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. Di sini terbentang hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang murni (*genuine*) dan substantif sebagai salah satu tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas partisipasi simbolik (*degree of tokenism*), bahkan masih ditemukan partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi.

Hal ini disebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keinginan dan harapan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen

kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat.

Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal (NGO/LSM). Hal ini menyebabkan organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

Apabila menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat berjalan dengan baik, dan hal ini sangat tergantung pada cara-cara pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak mengikutsertakan mereka.

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi

bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Harus diakui bahwa upaya pengelolaan BUMDes yang dapat semakin memperkuat peran partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah dicapai. Sejumlah faktor turut berperan, di antaranya, *pertama*, faktor sosial ekonomi. Hal ini mencakup beberapa aspek penting seperti tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan, konteks tingkat pendidikan, sosial budaya dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. *Kedua*, faktor peran kepemimpinan daerah untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam struktur kelembagaan baik dari tingkat perencanaan sampai tingkat evaluasi. *Ketiga*, faktor sumber daya ekonomis/sosial lokal yang dijadikan sebagai landasan pembentukan sebuah BUMDes. Data menunjukkan bahwa sejumlah BUMDes yang dinilai berhasil lebih didominasi oleh 'nilai jual' sumber daya ekonomis/sosial lokal yang telah dikembangkan sebelumnya.

Indeks

A

akses 166, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 186

aksi 168, 170, 174, 187, 191

anggaran 188, 189

APBD 191

APBN 191

B

barang 170

basis 168, 172, 177

bisnis 191

budaya 174, 189, 190

BUMDes 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191

bumdes 178, 186

C

capaian 176

cara 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 183, 187, 188, 189, 190

D

daerah 166, 176, 179, 180, 181, 182, 189, 190

dana 169, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 185, 187, 188, 191

Data 190

desa 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 191

Desa Ponggok 191

dominasi 175, 188, 190

E

ekonomi 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 187, 188, 189, 190

Eksistensi 168, 171

Eksternal 179, 186

evaluasi 190

F

Fakta 187

fasilitas 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181

formal 171, 175, 177, 189

- G**
gerakan 167, 168, 171, 173, 187, 191
kontribusi 166, 170, 171, 173, 183, 184
kooperatif 187
- H**
hambatan 188
hasil 168, 170, 172, 178, 179, 190, 191
hukum 166, 189
- I**
Indonesia 165, 167, 172, 174, 175, 176, 183, 184, 187, 189, 191
infrastruktur 188, 191
Inisiasi 166
IPM 167
iuran 166, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183
- J**
Jaminan 175, 176, 184, 185
Jaminan Sosial 175, 184, 185
jaringan 170
- K**
keberhasilan 191
kebijakan 165, 188, 189, 191
kesejahteraan 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 183, 184, 187, 189, 190
komersial 170
- L**
laba 178
landasan 166, 190
layanan 166, 167, 168, 170, 175, 176, 178, 183, 184, 188, 189
lembaga 169, 170, 172, 184, 187, 189, 190
- M**
mandiri 167, 172, 174, 187, 188
masalah 168, 176, 183
masyarakat 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190
- Mekanisme** 166, 172
Modal 168, 170, 171
- N**
Nasional 170, 173, 175, 176, 177, 184, 185, 186
negara 168, 172, 174, 175, 176, 177, 183, 189
nelayan 189
- O**
operasional 188
optimal 167, 171, 176, 183

P

partisipasi 173, 188, 189, 190
 pejabat 188
 pengembangan 167, 168, 169,
 172, 187
 Permendesa 166, 186
 potensi 166, 167, 169, 171, 172,
 173, 174, 187, 188
 produktivitas 167

R

regional 165
 RELEVANSI 165
 responden 180, 181, 182

S

sejahtera 165, 166, 167, 168,
 169, 170, 171, 172, 174,
 175, 177, 183, 184, 185,
 186, 187, 189, 190
 sektor 168, 170, 171, 173, 174,
 175, 177, 179, 183, 184
 skema 177
 sosial 166, 167, 170, 173, 174,
 175, 189, 190

T

tingkat 167, 174, 175, 176, 187,
 188, 189, 190

U

UHC 168, 175, 176, 177, 179, 183
 Unit 166
 upaya 165, 167, 169, 172, 174,
 175, 176, 183, 187, 190

W

warga 166, 174, 175, 177, 178,
 180, 181, 182
 wisata 188

Indeks Pengarang

C

Cohen 42, 162

M

Maulani 41

O

Oakley 42, 162

P

Pearse 42

U

Uphoff 42, 162

W

Wirutomo 41

